

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Juli 2013

Menanggapi berbagai tekanan



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions
for an Emerging Indonesia

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Menanggapi berbagai tekanan

Juli 2013



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions
for an Emerging Indonesia

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal, unit Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (*Poverty Reduction and Economic Management/PREM*), Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai *Sector Manager* dan *Lead Economist*, Ndiame Diop sebagai *Economic Adviser* dan *Lead Economist* dan Ashley Taylor sebagai *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dengan tanggung jawab di bagian A (perkembangan ekonomi terkini), pengeditan dan produksi adalah Gomez Agou, Arsianti, Magda Adriani, Brendan Coates, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Shakira Jones, Alex Sienaert, Ashley Taylor dan Violeta Vulovic. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Dini Sari Djalal, Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Timothy Brown, Werner Kornexl dan Yue Man Lee (Bagian A.7, diskusi dampak asap), (Edgar Janz, Matthew Wai-Poi dan Vivi Alatas (Bagian B.1, kebijakan bantuan sosial), Mitchell Wiener and Iene Muliati (Bagian B.2, Sistem Jaminan Sosial Nasional), Claudia Rokx and Roger Shrimpton (Bagian C.1 Nutrisi), Erwin Ariadharna, Sheheryar Banuri, Zahid Hasnain, Richard Hooper, Matthew Kearney, Philip Keefer, Brendan Murphy, Staffan Synnerstrom and Maria Tambunan (Bagian C.2 reformasi birokrasi). Masukkan utama juga diterima dari Ekaterine Vashakmadze (perkembangan internasional terkini), Djauhari Sitorus, Neni Lestari dan The Fei Ming (sektor perbankan, kredit dan korporasi), Mark Ahern (reformasi birokrasi), Darren Dorkin, Megha Kapoor, Eko Setyo Pambudi, Leslie Elder dan Puti Marzoeki (nutrisi). Soekarno Wirokartono juga memberikan tambahan masukan yang penting. Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Arsianti, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Erwin Ariadharna, Indra Budi Sumantoro and Talitha Fauzia.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia - AusAID melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan dan bagian dalam diambil oleh Josh Estey dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi asienaert@worldbank.org.

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	II
RINGKASAN EKSEKUTIF: MENANGGAPI BERBAGAI TEKANAN	VII
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI	1
1. Aset-aset pasar negara berkembang turun tajam dalam beberapa bulan terakhir	1
2. APBN-P: kenaikan harga BBM bersubsidi dan pelebaran proyeksi defisit	4
3. Pasar keuangan, valuta, dan kredit Indonesia: kuartal yang bergejolak	9
4. Prospek ekonomi Indonesia mengalami penurunan	11
5. Inflasi akan naik untuk sementara mengikuti kenaikan harga BBM bersubsidi	17
6. Defisit neraca berjalan berlanjut walau pertumbuhan impor telah melambat	21
7. Risiko terhadap outlook tetap tinggi dari dalam dan luar negeri	28
B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA	31
1. Mencermati paket kompensasi subsidi BBM	31
a. Program-program jangka pendek untuk melindungi rumah tangga yang miskin dan rentan	32
b. Program-program jangka panjang untuk mendorong rumah tangga miskin dan rentan	36
2. Tantangan Indonesia: pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru	40
a. Menempatkan perubahan ke dalam konteks: dimana posisi Indonesia sekarang	40
b. Pertimbangan cakupan, biaya dan keberlanjutan fiskal	42
c. Pertimbangan administrasi, tata kelola dan kapasitas	43
d. Komunikasi menjadi kunci sebagai bagian dari rangkaian proses penerapan yang panjang	45
e. Kesimpulan: perjalanan panjang menuju cakupan jaminan sosial yang menyeluruh	45
C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN	46
1. Indonesia: Menghadapi Beban Ganda Malnutrisi	46
a. Sifat dan akibat serius dari Beban Ganda Malnutrisi	47
b. Beban Ganda Malnutrisi adalah masalah yang berat dan mendesak di Indonesia	48
c. Memahami penyebab BGM di Indonesia	50
d. Mengatasi BGM di Indonesia	52
2. Reformasi birokrasi di Indonesia: kemajuan dan tantangan	53
a. Dampak reformasi birokrasi	53
b. Keberlanjutan reformasi birokrasi	54
c. Restrukturisasi dan <i>right-sizing</i> di dalam Pemerintah Indonesia	55
d. Menyederhanakan lembaga pemerintah	56
e. Pengangkatan pegawai untuk struktur baru	57
f. Kendala dan pilihan reformasi bagi <i>right-sizing</i>	57
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	59

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Pasar-pasar negara berkembang (EM) mencatat kuartal 2 yang lemah, dengan kinerja saham di bawah kinerja saham AS.....	2
Gambar 2: ...bersamaan dengan penyimpangan momentum ekonomi yang signifikan lintas ekonomi beberapa negara utama.....	2
Gambar 3: Saham dan obligasi pemerintah Indonesia telah melemah tajam sejak bulan Mei.....	3
Gambar 4: ...di tengah penjualan besar-besaran obligasi dan saham luar negeri.....	3
Gambar 5: Dalam beberapa tahun kedepan, penghematan fiskal cukup besar, dibandingkan belanja BBM bersubsidi tanpa reformasi.....	5
Gambar 6: Rupiah telah terapresiasi secara nominal dan berdasarkan pembobotan perdagangan selama tahun 2013.....	10
Gambar 7: Pinjaman investasi menurun sejalan dengan perlambatan laju pertumbuhan investasi riil.....	10
Gambar 8: Harga rumah tinggal terus meningkat walau pertumbuhan kredit perumahan menurun.....	11
Gambar 9: ...dengan pesatnya pertumbuhan harga dan kuatnya permintaan properti komersial di Jabodetabek.....	11
Gambar 10: Pertumbuhan PDB riil terus melemah, dengan kontribusi dari investasi semakin mengecil.....	12
Gambar 11: PDB nominal masih tetap lemah, sejalan dengan lemahnya pertumbuhan dalam deflator PDB.....	12
Gambar 12: Moderasi investasi umumnya didorong oleh penurunan tajam dalam permesinan dan peralatan asing dan transportasi.....	12
Gambar 13: Produksi sektor pertambangan masih lemah.....	14
Gambar 14: Berlanjutnya pelemahan impor barang modal menunjukkan pelemahan lanjutan dalam pertumbuhan investasi tetap.....	15
Gambar 15: ...sementara indikator ekonomi berfrekuensi tinggi menunjukkan berlanjutnya moderasi pertumbuhan.....	15
Gambar 16: Proyeksi inflasi IHK, dengan dan tanpa reformasi BBM bersubsidi.....	17
Gambar 17: Inflasi mencatat penurunan pada beberapa bulan terakhir.....	19
Gambar 18: ...dengan turunnya harga sejumlah bahan pangan pokok.....	19
Gambar 19: Neraca pembayaran kembali ke defisit pada kuartal pertama.....	21
Gambar 20: Surplus perdagangan non-migas naik pada kuartal 1/2013, sebelum kembali ke defisit kecil pada April.....	22
Gambar 21: ...sementara defisit perdagangan migas yang besar telah tercatat sejak pertengahan tahun 2012.....	22
Gambar 22: Barang modal memimpin pelambatan impor yang luas.....	23
Gambar 23: ...sementara penerimaan ekspor Indonesia masih tertekan.....	23
Gambar 24: Ekspor Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangganya yang sebanding.....	24
Gambar 25: Ekspor manufaktur mendatar, di tengah tanda-tanda pelemahan pertumbuhan ekspor manufaktur di Asia.....	24
Gambar 26: Batu bara berkualitas rendah merupakan 20 persen dari ekspor batu bara Indonesia dan dapat terpengaruh oleh pelarangan di Cina.....	24
Gambar 27: Metriks solvabilitas hutang telah meningkat, namun demikian juga sejumlah indikator risiko likuiditas.....	27
Gambar 28: Hutang swasta dari luar negeri mencatat distribusi yang merata pada seluruh sektor ekonomi.....	27
Gambar 29: Cadangan devisa Indonesia cukup besar demikian juga paparan risiko luar negerinya.....	29
Gambar 30: Penghematan dapat mendukung sejumlah program.....	32
Gambar 31: Tingkat kemiskinan akan terus turun dengan BLSM.....	35
Gambar 32: Program-program akan memperluas cakupan rumah tangga miskin dan rentan secara signifikan.....	36
Gambar 33: ...dan tingkat bantuan juga meningkat.....	36
Gambar 34: Bertumbuhnya proporsi penduduk Indonesia berusia paruh baya yang mengalami kelebihan berat badan.....	48

Gambar 35: Hipertensi adalah masalah yang signifikan pada penduduk dewasa Indonesia... ..	50
Gambar 36: ...dan sebagian besar penduduk Indonesia tidak berolahraga cukup	50

DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan.....	59
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran.....	59
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	59
Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil.....	59
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen.....	59
Lampiran Gambar 6: Indikator kegiatan industri.....	59
Lampiran Gambar 7: Aliran perdagangan riil	60
Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran	60
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang.....	60
Lampiran Gambar 10: Impor barang.....	60
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan aliran masuk portfolio modal asing.....	60
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter	60
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan tingkat harga konsumen	61
Lampiran Gambar 14: perbandingan tingkat inflasi antar negara tetangga	61
Lampiran Gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional.....	61
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	61
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	61
Lampiran Gambar 18: Indeks spot dolar AS dan rupiah.....	61
Lampiran Gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal.....	62
Lampiran Gambar 20: spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dolar AS	62
Lampiran Gambar 21: Tingkat kredit bank umum.....	62
Lampiran Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan	62
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah	62
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan 5,9 persen untuk tahun 2013.....	ix
Tabel 2: Harga komoditas masih di bawah tekanan	3
Tabel 3: Penghematan fiskal dari reformasi subsidi BBM tahun 2013 hanyalah kecil, setelah dikurangi paket kompensasi yang cukup besar	5
Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,1 persen, sedikit lebih rendah dari asumsi APBN-P	6
Tabel 5: Realisasi APBN untuk Jan – Mei telah meningkat dibanding tahun-tahun yang lalu namun masih menantang	7
Tabel 6: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>) proyeksi pertumbuhan PDB adalah 5,9 persen untuk 2013, dan meningkat menjadi 6,2 persen untuk 2014.....	16
Tabel 7: Kompensasi menjangkau 15,5 juta rumah tangga	32
Tabel 8: Keadaan BGM di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di ASEAN.....	49
Tabel 9: Terdapat bukti survei akan kinerja SDM yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang turut serta dalam reformasi birokrasi	54
Tabel 10: Kendala terpilih terhadap restrukturisasi dan perampingan dan pilihan reformasi tingkat tinggi.....	58

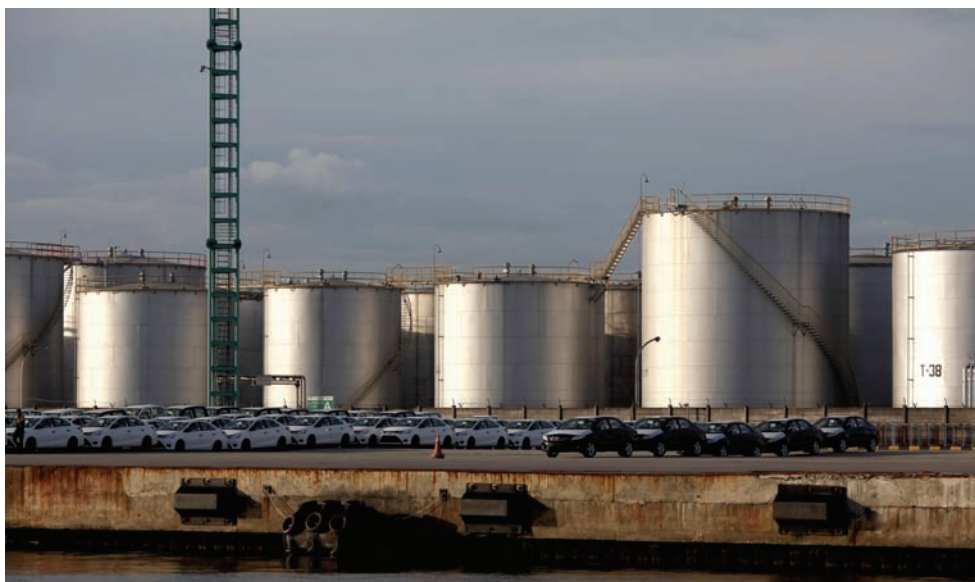
DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah	63
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	63
Lampiran Tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia	64
Lampiran Tabel 4: Sekilas tentang perkembangan indikator sosial Indonesia	65

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Usulan pelarangan impor batu bara berkualitas rendah oleh Cina membawa risiko terhadap ekspor batu bara Indonesia.....	24
Kotak 2: Tingkat hutang eksternal tetap rendah namun risiko likuiditas telah meningkat	26

Ringkasan Eksekutif: Menanggapi berbagai tekanan



Menanggapi peningkatan tekanan dan berbagai peristiwa terbaru, kuartal kedua tahun 2013 mencatat perkembangan yang signifikan dalam ekonomi, kebijakan, dan pasar keuangan di Indonesia

Kuartal kedua tahun 2013 merupakan kuartal yang penting, dimana perekonomian, kebijakan-kebijakan, dan pasar keuangan Indonesia mengalami penyesuaian terhadap tekanan-tekanan yang telah meningkat selama beberapa kuartal terakhir dan terhadap perubahan lingkungan perekonomian global. Setelah mencatat pertumbuhan yang sedikit lebih lemah dari perkiraan pada kuartal pertama, terdapat tanda-tanda bahwa permintaan dalam negeri, terutama investasi, terus mengalami perlambatan. Pada sisi fiskal, kombinasi penurunan pendapatan dan peningkatan belanja subsidi terus menekan keuangan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), yang menyertakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah lama ditunggu-tunggu, bersama dengan paket kompensasi yang menyeluruh untuk mengurangi dampak peningkatan harga BBM bagi rakyat miskin, disetujui pada tanggal 17 Juni. Sementara itu, pasar keuangan internasional bereaksi kuat terhadap prospek berakhirnya kebijakan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) di Amerika Serikat (AS) pada kuartal-kuartal berikut, yang mendorong penjualan besar-besaran aset-aset pasar berkembang (*emerging market*), termasuk Indonesia, yang mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan suku bunga.

Gejolak pasar keuangan internasional meningkat...

Ditandai dengan munculnya sinyal-sinyal baru yaitu dengan adanya rencana Bank Sentral AS akan menghentikan program pembelian obligasinya pada pertengahan tahun 2014, menjadikan imbal hasil (*yield*) surat-surat berharga pemerintah AS mengalami peningkatan secara signifikan pada kuartal bulan Juni, yang berdampak pada pasar-pasar keuangan internasional. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tanda-tanda yang semakin meningkat akan divergensi (perbedaan) yang signifikan dalam momentum ekonomi antar negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama AS dan Jepang, yang menunjukkan perkembangan positif, dan negara-negara berkembang utama yang mencatat laju pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan, terutama China. Faktor-faktor tersebut memicu tajamnya peningkatan penjualan aset-aset negara berkembang dan gejolak pasar, termasuk di Indonesia. Sebagian besar nilai tukar mata uang pasar-pasar berkembang mencatat depresiasi terhadap dolar AS, nilai ekuitas negara berkembang turun sebesar 7,5 persen selama kuartal tersebut (seperti diukur dengan indeks valuta lokal MSCI EM), dan biaya pendanaan pemerintah meningkat dengan signifikan, dengan selisih (*spread*) obligasi dolar AS, misalnya, meningkat hingga 50 basis poin (seperti diukur oleh indeks JP Morgan EMBIG).

...dan harga aset-aset Indonesia ikut terpengaruh

Pasar aset/saham Indonesia mencatat koreksi yang tajam dalam beberapa minggu terakhir, sejalan dengan pasar-pasar berkembang lainnya. Para investor asing berbalik menjadi penjual bersih ekuitas dan obligasi *emerging markets* menjelang penghujung kuartal, dengan aliran modal keluar sekitar 3,6 miliar dolar AS yang tercatat dari awal bulan Mei hingga akhir bulan Juni. Aliran keluar itu berkontribusi kepada penurunan ekuitas Indonesia sebesar 4 persen pada periode awal Mei hingga akhir kuartal kedua dan peningkatan kurva imbal hasil (*yield*) surat utang pemerintah secara signifikan, dengan peningkatan *yield* sebesar 150-220 basis poin sejak awal bulan Mei. Rupiah mencatat depresiasi sebesar 2 persen terhadap dolar AS, walau BI telah melakukan intervensi yang signifikan, yang menyebabkan penurunan cadangan devisa hingga 2 miliar dolar AS pada bulan Mei ke 105 miliar dolar AS.

Pemintaan luar negeri diproyeksikan akan meningkat dengan lambat pada kuartal-kuartal berikut

Bank Dunia tetap memperkirakan peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan bertahap pada kuartal-kuartal berikut. Hal ini mencerminkan proyeksi melambatnya kegiatan ekonomi pada negara berpenghasilan tinggi, di mana pertumbuhan pada umumnya tetap lambat namun dengan tren yang menguat, yang terbantu oleh kokohnya pemulihan sektor swasta AS dan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di Jepang, sementara kondisi ekonomi di zona Euro masih tetap menantang. Jalur pertumbuhan negara-negara berkembang juga tidak merata, tetapi diperkirakan akan sedikit menguat. Secara keseluruhan, negara-negara mitra dagang Indonesia diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan sebesar 3,4 persen pada tahun 2013, sama dengan pertumbuhan tahun 2012, dengan penurunan sebesar 0,3 poin persentase dibanding proyeksi Triwulanan Maret 2013, yang mencerminkan realisasi pertumbuhan kuartal pertama yang dibawah perkiraan, seperti yang terjadi di China. Pertumbuhan para mitra perdagangan utama diproyeksikan akan meningkat menjadi 4,0 persen pada tahun 2014. Prospek pertumbuhan dunia yang masih lambat, dan penguatan dolar AS selama gejolak pasar baru-baru ini, juga terus menekan harga-harga komoditas, dengan harga komoditas ekspor utama Indonesia juga turun selama kuartal tersebut.

APBN-P telah disahkan dan harga BBM bersubsidi telah dinaikkan

APBN-P 2013 dilakukan ditengah perlemahan kondisi pasar keuangan dan tanda-tanda perlemahan momentum pertumbuhan diantara beberapa negara berkembang lainnya. Beberapa hal penting dari APBN-P yang disetujui oleh DPR termasuk revisi proyeksi belanja subsidi BBM (hingga Rp 200 triliun), dengan harga BBM bersubsidi akan segera dinaikkan, dan paket kompensasi untuk mengurangi dampak harga kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin. Defisit anggaran tahun 2013 telah direvisi naik sebesar 0,7 poin persentase menjadi 2,4 persen dari PDB, karena penurunan proyeksi pendapatan nominal, sejalan denganantisipasi pertumbuhan PDB yang lebih lemah, dan jumlah belanja yang lebih besar (termasuk untuk subsidi BBM, walau harganya baru saja ditingkatkan). Harga BBM bersubsidi naik secara efektif mulai 22 Juni dengan peningkatan harga premium bersubsidi sebesar 44 persen menjadi Rp 6.500 per liter dan harga solar bersubsidi naik sebesar 22 persen menjadi Rp 5.500 per liter.

Walaupun tetap tidak pasti, penghematan fiskal dari reformasi subsidi BBM kemungkinan cukup besar

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang signifikan merupakan sebuah reformasi yang besar, dan mengikuti hilangnya kesempatan penyesuaian harga pada tahun 2012. Dalam jangka pendek reformasi ini membantu membatasi peningkatan defisit APBN tahun 2013. Dalam jangka panjang, reformasi itu menjadi bagian dari tanggapan yang dibutuhkan dalam penyesuaian yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia – meningkatkan permintaan terhadap impor energi karena kuatnya pertumbuhan dan penurunan produksi minyak dalam negeri, dan, yang sangat penting, desakan untuk mengarahkan kembali belanja fiskal secara lebih efisien dan merata untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia. Bank Dunia memperkirakan bahwa penghematan fiskal langsung dari peningkatan harga BBM bersubsidi akan mencapai Rp 42 triliun pada 2013, dan meningkat menjadi Rp 85 triliun pada tahun 2014, yang merupakan tahun penuh pertama dengan harga yang baru. Walau signifikan, perkiraan penghematan dasar (*baseline*) ini sangat tidak pasti. Peningkatan harga energi global atau berlanjutnya perlemahan Rupiah dapat meningkatkan selisih antara harga bersubsidi dan harga pasar, sehingga mendorong belanja subsidi menjadi lebih tinggi, walau penyesuaian harga baru saja dilakukan. Dengan demikian, masih terdapat alasan yang kuat untuk terus melanjutkan reformasi ini dengan meningkatkan fleksibilitas harga-harga bersubsidi dan membawa mereka lebih dekat dengan harga pasar.

Peningkatan inflasi yang bersifat sementara merupakan dampak utama ekonomi makro dalam jangka pendek

Dampak paket reformasi subsidi BBM terhadap ekonomi makro diperkirakan akan dapat ditangani dan sebagian besar bersifat jangka pendek. Paket reformasi itu diperkirakan hanya akan membawa dampak negatif jangka pendek yang kecil terhadap pertumbuhan, dengan dampak negatif bagi daya beli kaum miskin akan diimbangi secara signifikan dengan paket kompensasi. Harga BBM yang lebih tinggi pada awalnya akan membawa dampak yang besar terhadap inflasi, dengan meningkatkan rata-rata inflasi tahunan pada tahun 2013 sebesar sekitar 1,8 poin persentase menjadi 7,2 persen, dan memuncak pada kisaran 9 persen tahunan (yoy) menjelang akhir tahun. Penyesuaian itu hanyalah peningkatan harga satu kali saja, yang berarti bahwa dampak inflasi akan berangsur menghilang pada pertengahan tahun 2014, dengan asumsi bahwa perkiraan inflasi jangka panjang tidak terpengaruh dan kebijakan moneter tetap cepat tanggap terhadap tanda-tanda tekanan harga putaran kedua. Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan harga BBM bersubsidi akan menurunkan defisit neraca berjalan sebesar 0,2 poin persentase dari PDB pada 2013, dibanding bila tanpa reformasi. Dalam jangka menengah, dampak terhadap neraca luar negeri Indonesia akan sulit untuk diukur namun akan tetap positif secara umum, dengan mendorong penggunaan BBM impor secara lebih efisien dan dengan mendorong kepercayaan investor terhadap kebijakan dan posisi fiskal Indonesia.

Prospek pertumbuhan telah melemah, mendorong penurunan proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan PDB 2013, menjadi 5,9 persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun 2013 sebesar 6,0 persen yoy sedikit lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya. Prospek ekonomi juga melemah, dengan semakin menurunnya harga komoditas dan adanya indikasi perlambatan pertumbuhan investasi yang lebih besar dibanding perkiraan awal. Menurunnya kepercayaan konsumen sebagai antisipasi reformasi subsidi BBM, karena kenaikan inflasi sementara, dan koreksi terhadap pasar saham/aset akhir-akhir ini, juga membebani permintaan dalam negeri. Lambatnya pertumbuhan ekspor bersih diperkirakan akan menghilang pada sisa tahun 2013, walau pemulihan ekspor diperkirakan akan lebih lemah dan pertumbuhan impor diperkirakan akan lebih kecil, yang mencerminkan melamahnya prospek investasi. Secara keseluruhan, Bank Dunia telah menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB-nya untuk tahun 2013 menjadi 5,9 persen, dari 6,2 persen seperti yang diproyeksikan pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013.

Tabel 1: Menurut skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan 5,9 persen untuk tahun 2013

		2011	2012	2013	2014
Produk domestik bruto *	(Persen perubahan tahunan)	6,5	6,2	5,9	6,2
Indeks harga konsumen *	(Persen perubahan tahunan)	5,4	4,3	7,2	6,7
Defisit neraca berjalan	(Persen dari PDB)	0,2	-2,8	-2,7	-2,1
Surplus/defisit anggaran**	(Persen dari PDB)	-1,1	-1,8	-2,4	-1,4
Pertumbuhan mitra perdagangan utama	(Persen perubahan tahunan)	3,6	3,4	3,4	4,0

Catatan: *Rata-rata tahunan **Angka Pemerintah untuk defisit anggaran: 2012 adalah realisasi belum diaudit, 2013 adalah APBN-P dan 2014 dari Nota Keuangan RAPBN 2013
Sumber: Kementerian Keuangan; BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Prospek pertumbuhan Indonesia dihadapi pada berbagai risiko ...

Walaupun dalam perhitungan dasar (*base case*) Bank Dunia, perekonomian Indonesia akan sedikit melambat untuk tahun 2013, dan kembali meningkat pada 2014, terdapat risiko yang tinggi terhadap perlambatan yang lebih besar. Risiko ini dapat didorong oleh perlemahan yang lebih besar permintaan dalam negeri, misalnya karena dampak dari inflasi sementara yang lebih tinggi dari yang diantisipasi karena peningkatan harga BBM, atau penurunan pertumbuhan belanja investasi yang lebih tajam atau lebih lama, dengan gejolak pasar keuangan yang belakangan terjadi mempengaruhi tingkat kepercayaan dan meningkatkan biaya pendanaan. Penurunan harga komoditas yang lebih besar juga merupakan risiko yang signifikan, dengan pentingnya kegiatan yang berkaitan dengan komoditas terhadap pendapatan dalam valuta asing, keuntungan dunia usaha dan kegiatan investasi. Ketidakpastian yang akhir-akhir ini terjadi terhadap perkembangan ekonomi China juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prospek tersebut.

...yang menekankan perlunya kebijakan ekonomi makro yang tetap tanggap terhadap perubahan keadaan...

Peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini dan prospek *base case* bagi kuartal-kuartal yang akan datang menunjukkan bahwa penetapan kebijakan Indonesia tampaknya harus menyesuaikan kepada kondisi ekonomi yang sedikit melemah, dan kemungkinan kondisi pembiayaan luar negeri yang lebih sulit. Keputusan Bank Indonesia untuk meningkatkan BI Rate dan suku bunga *overnight* pada awal bulan Juni, dan peningkatan harga BBM bersubsidi, merupakan contoh-contoh kebijakan untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika keadaan, yang dapat membantu mengamankan stabilitas makro, demi pertumbuhan di masa depan. Mengizinkan kurs tukar Rupiah terus menyesuaikan secara bertahap juga dapat membantu, bila hal ini dapat mendukung posisi eksternal Indonesia. Menjaga pendekatan yang fleksibel, dapat diprediksi dan dikomunikasikan dengan baik dalam pembuatan kebijakan ekonomi makro, dan juga kemajuan yang berkelanjutan di dalam penerapan kebijakan dan perbaikan lingkungan peraturan, akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam melalui masa yang penuh dengan tantangan ekonomi dalam dan luar negeri.

...dan pentingnya mengarahkan kembali belanja untuk kelompok yang paling rentan, dimana paket kompensasi reformasi subsidi BBM berkontribusi dalam hal ini

Peningkatan belanja sosial dalam APBN-P, sebagian untuk membantu melindungi keluarga miskin dari dampak kenaikan harga BBM, cukup signifikan, dan rancangan paket kompensasi sosial menunjukkan pengambilan langkah-langkah yang penting menuju sistem jaminan sosial yang lebih menyeluruh, terintegrasi dan memiliki penargetan yang baik. Paket kompensasi yang disetujui berjumlah Rp 29 triliun, atau sekitar tiga per empat dari perkiraan penghematan subsidi BBM pada tahun 2013. Paket kompensasi itu terdiri dari dua komponen utama. Pertama, Program Kompensasi Khusus, yang termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi 15,5 juta keluarga termiskin di Indonesia selama empat bulan, penambahan penerima program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan peningkatan belanja bagi program-program infrastruktur. Kedua, di bawah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), belanja untuk program-program bantuan keuangan bagi pelajar miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), mengalami peningkatan. Bukti-bukti dari pengalaman Indonesia dalam pemberian bantuan tunai langsung yang lalu, menunjukkan upaya-upaya tersebut umumnya dapat memberikan bantuan yang memadai, tepat waktu dan efektif bagi perlindungan keluarga yang miskin dan rentan sehingga setidaknya mereka dapat menghadapi pengaruh dari kenaikan harga BBM, dengan asumsi kendala pelaksanaan yang minimum dengan menekankan pada sistem pemantauan dan umpan balik (*feedback*) dan melaksanakan peningkatan penargetan secara terus-menerus.

Dalam jangka yang lebih panjang, implementasi SJSN Indonesia yang baru dapat membawa perubahan yang besar tetapi akan cukup menantang...

Perlindungan sosial di Indonesia akan segera diperkuat ketika Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai di laksanakan pada tahun 2014. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan layanan kesehatan, pensiun (manfaat pasti), tabungan hari tua (iuran pasti), jaminan kompensasi kematian dan kecelakaan kerja bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan penerapan yang baik, SJSN akan dapat menurunkan kerentanan, memberi perlindungan terhadap kejutan ekonomi, mendorong mobilitas kerja, menurunkan kemiskinan orang lanjut usia, membantu menurunkan ketidakmerataan, dan memobilisasi kelangkaan tabungan. Keberhasilan sistem baru itu pada akhirnya akan bergantung kepada seberapa baik rancangan, penerapan dan pengelolanya. Upaya Pemerintah untuk menerapkan suatu sistem jaminan sosial nasional yang dirancang dengan baik, berkelanjutan secara fiskal, kokoh dan menyeluruh akan merupakan tantangan dan membutuhkan serangkaian tindakan besar dari Pemerintah dan badan-badan pengelola yang berkaitan agar dapat berhasil.

...dan akan berlangsung dengan perubahan lingkungan sosial, termasuk perubahan kebutuhan layanan kesehatan penduduk Indonesia dalam beberapa dekadeke depan

Program perlindungan kesehatan SJSN akan mulai digelar karena Indonesia menghadapi masalah kesehatan dan gizi yang semakin rumit, yang didorong oleh cepatnya laju pembangunan dan urbanisasi. Dengan sepertiga dari anak balita mengalami hambatan pertumbuhan, tidak hanya mengganggu kemampuan angkatan kerja masa depan, namun kecenderungan mereka menderita kelebihan berat badan dan penyakit jantung di kemudian hari juga turut meningkat. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan berat badan, terutama dengan semakin meningkatnya gaya hidup perkotaan di Indonesia, semakin memperburuk keadaan, dengan masalah kelebihan gizi yang telah mempengaruhi sebagian besar orang dewasa. Kecuali diambil tindakan sekarang, untuk menangani masalah kekurangan gizi pada masa kehamilan dan pada anak-anak, dan juga untuk menghadapi masalah kelebihan gizi pada anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa, frekuensi terjadinya Penyakit Tidak Menular dapat meningkat secara drastis, dengan dampak buruk terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Keberlanjutan peningkatan efisiensi layanan pegawai negeri sipil merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Indonesia yang ambisius

Untuk meningkatkan layanan dan kapasitas Pemerintah demi keberhasilan penerapan program-program baru yang ambisius seperti SJSN, dibutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam kinerja birokrasi pegawai negeri sipil Indonesia. Bukti-bukti menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan telah membawa dampak yang positif terhadap dinamika sumber daya manusia pada lembaga-lembaga yang turut serta, termasuk proses penerimaan dan promosi jabatan pegawai, dan terhadap produktivitas pegawai. Namun masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga peningkatan produktivitas sementara memastikan gaji sektor publik berkelanjutan, dan modernisasi sistem pengendalian dan rancangan organisasi. Perampingan (penyesuaian ukuran) birokrasi pemerintah adalah masalah yang peka secara politis namun telah menerima prioritas dari Pemerintah. Sejumlah kendala dalam perampingan dari bidang hukum, peraturan perundangan dan kapasitas masih harus diatasi, namun akan dapat diatasi, dan hal tersebut akan menjadi langkah yang penting dalam penciptaan layanan sipil yang lebih efisien dan efektif.

A. Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini



1. Aset-aset pasar negara berkembang turun tajam dalam beberapa bulan terakhir

Aset-aset *emerging market* turun dengan tajam, sebagai penyesuaian terhadap informasi baru tentang pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) dan *outlook* ekonomi dunia...

Perkembangan pasar keuangan internasional pada kuartal kedua telah memberikan pengingat yang jelas akan kerentanan berkelanjutan di pasar negara berkembang (*emerging market*), termasuk Indonesia, terhadap cepatnya perubahan kondisi keuangan dunia. Prospek penurunan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*) di AS, dan penilaian kembali terhadap outlook pertumbuhan ekonomi relatif pada ekonomi-ekonomi berpenghasilan tinggi dan berkembang utama, memicu penjualan besar-besaran aset-aset pasar negara berkembang. Imbal hasil surat utang pemerintah AS mulai meningkat dengan tajam pada awal bulan Mei, dengan surat utang acuan 10-tahun meningkat sebesar 80 basis poin menjadi 2,5 persen pada akhir bulan Juni. Dari awal bulan Mei hingga akhir Juni, nilai ekuitas pasar berkembang merosot sebesar 7 persen (seperti diukur dengan indeks MSCI EM dalam mata uang lokal, (Gambar 1), dan imbal hasil obligasi dalam negeri dan selisih (*spread*) obligasi dolar AS meningkat masing-masing sebesar 120 dan 70 basis poin (seperti diukur oleh indeks acuan JP Morgan). Valuta komoditas dan pasar berkembang seperti mata uang Real Brazil, Rand Afrika Selatan dan Dolar Australia turun sebesar 10 persen.

...dan Indonesia telah menerima dampak yang signifikan...

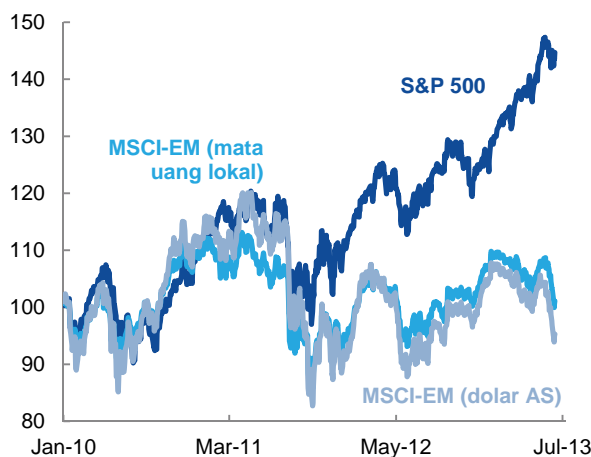
Pasar aset-aset Indonesia telah mengalami koreksi pada beberapa minggu terakhir, seperti yang dialami oleh pasar negara berkembang lainnya. Sejak awal bulan Mei hingga akhir kuartal kedua, saham – saham di Indonesia mencatat penurunan sebesar 4 persen, dan investor asing beralih menjadi penjual bersih dengan nilai penjualan saham yang mencapai lebih dari Rp 18 triliun (1,8 miliar dolar AS), yang secara efektif menghilangkan aliran masuk modal yang cukup besar yang tercatat sebelumnya di tahun 2013 (Gambar 4). Kurva imbal hasil (*yields*) surat utang Pemerintah telah meningkat dan mendatar secara signifikan, dengan imbal hasil yang meningkat sebesar 150-220 basis poin sejak awal bulan Mei. Kepemilikan obligasi Indonesia juga turun tajam dengan penyusutan sebesar Rp 14 triliun (1,4 miliar dolar AS) sejak bulan April (Gambar 4). Derasnya modal keluar dari pasar-pasar saham dan obligasi Indonesia pada beberapa minggu terakhir tampaknya sejalan dengan yang terlihat di pasar negara-negara berkembang utama lainnya, yang juga mencatat aliran modal keluar yang besar. Kinerja harga saham cukup sebanding, sementara kinerja obligasi dalam negeri tercatat lebih lemah bila dibandingkan dengan kinerja beberapa negara pembanding Indonesia, yang didasari ekspektasi meningkatnya inflasi sejak bulan Februari dikarenakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan naiknya defisit APBN 2013 yang mendorong tekanan naik bagi imbal hasil.

...dengan pasar menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan global dan penyimpangan momentum ekonomi

Kemungkinan penurunan program pembelian obligasi dari Bank Sentral AS pada tahun ini mencerminkan perkiraan bahwa ekonomi AS akan terus menguat, mengikuti pertumbuhan pada kuartal pertama yang disetahunkan sebesar 1,8 persen, naik dari 0,4 persen pada kuartal terakhir tahun 2012, dan sebagian besar data ekonomi pada bulan-bulan terakhir menunjukkan kejutan yang positif. Sebaliknya, kinerja terbaru ekonomi berkembang tidaklah menggembirakan. Pertumbuhan PDB di Brasil hanya mencapai 2,2 persen pada kuartal pertama bila disetahunkan dan PDB riil India mencapai angka 4,7 persen yang lebih tinggi dari angka tahun lalu, mendekati laju pertumbuhan yang paling lambat sejak tahun 2009. PDB China pada kuartal pertama meningkat sebesar 7,7 persen tahun-ke-tahun (*yoy*) – pertumbuhan yang kuat, namun berada di bawah perkiraan konsensus. Data ekonomi terbaru yang tersedia menunjukkan berlanjutnya penyimpangan momentum ekonomi yang signifikan antar ekonomi-ekonomi berpenghasilan menengah utama (terutama AS, Jepang dan Jerman) dan ekonomi berkembang utama (terutama China) (Gambar 2).

Gambar 1: Pasar-pasar negara berkembang (EM) mencatat kuartal 2 yang lemah, dengan kinerja saham di bawah kinerja saham AS...

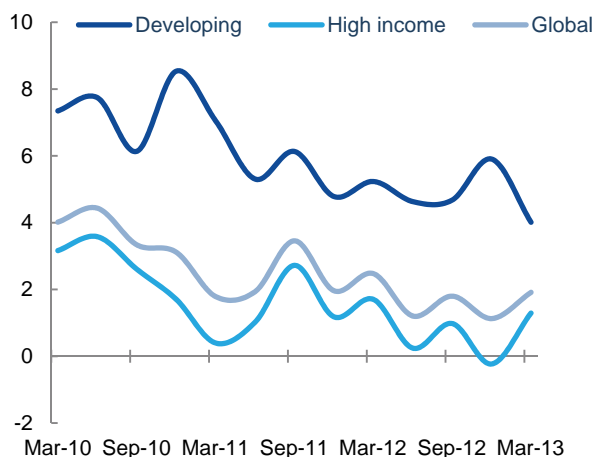
(Indeks acuan saham AS dan US, Jan 4 2010 = 100)



Catatan: Data hingga 28 Juni 2013
Sumber: CEIC; MSCI; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 2: ...bersamaan dengan penyimpangan momentum ekonomi yang signifikan lintas ekonomi beberapa negara utama

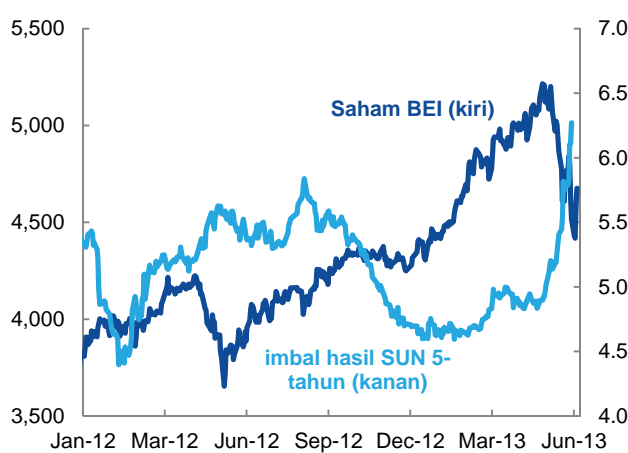
(Pertumbuhan PDB, tingkat disetahunkan dengan penyesuaian musiman, persen)



Sumber: Bank Dunia

Gambar 3: Saham dan obligasi pemerintah Indonesia telah melemah tajam sejak bulan Mei...

(indeks; imbal hasil, persen)

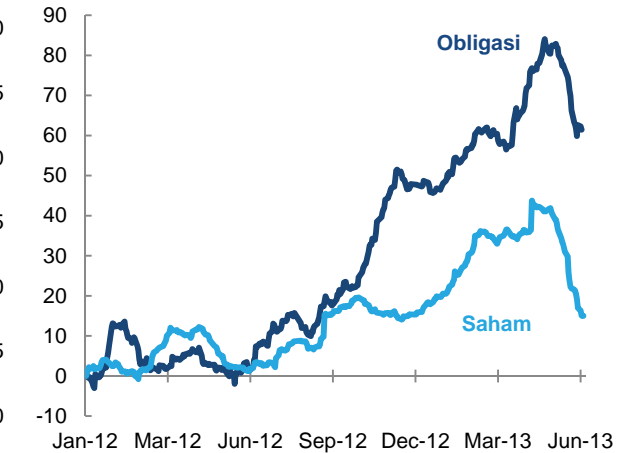


Catatan: Data hingga 28 Juni 2013

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 4: ...di tengah penjualan besar-besaran obligasi dan saham luar negeri

(pembelian kumulatif bersih luar negeri, triliun Rp)



Catatan: Data aliran obligasi sampai 25 Juni, saham sampai 28 Juni 2013

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Harga-harga ekspor komoditas utama Indonesia masih tetap ter tekanan

Kinerja ekonomi global yang tidak merata saat ini, masih rendahnya prospek pertumbuhan dunia dan koreksi harga-harga aset pasar negara berkembang, bersama-sama dengan menguatnya dolar AS, terus memberi tekanan terhadap harga komoditas. Keranjang tertimbang produk komoditas ekspor utama Indonesia mencatat pergerakan yang relatif mendatar hingga akhir bulan Mei, dan lebih rendah sebesar 21 persen dibanding pasca puncak keuangan global pada bulan Januari 2011, dengan penurunan lanjutan sebagian besar komoditas utama yang signifikan pada bulan Juni (Tabel 2). Berlanjutnya perlemahan harga-harga komoditas membebani investasi dan ekspor, dan berpengaruh terhadap pertumbuhan.

Tabel 2: Harga komoditas masih di bawah tekanan (Harga komoditas dolar AS, persentase perubahan; bagian ekspor, persen)

	Perubahan s.d. akhir Juni 2013 dari:				Bagian terhadap ekspor *
	Jan05	Jun11	Dec12	Mei13	
Bata bara	53,1	-32,4	-12,6	-7,1	13,8
Gas alam	-39,7	-17,6	12,3	-8,5	10,2
Minyak sawit	84,9	-34,4	-4,2	-12,5	9,3
Minyak mentah	129,6	-10,7	-7,3	-1,3	6,5
Karet	137,2	-43,1	-9,7	-7,6	4,2
Tembaga	111,5	-26,0	-15,8	-7,5	2,4

Catatan: Batubara Australia, indeks gas alam Bank Dunia, minyak sawit Malaysia, minyak mentah Brent, karet pasar Singapura, tembaga pasar London; *Bagian ekspor per 2012

Sumber: BPS; Bank Dunia dan perhitungan staf

Permintaan eksternal diperkirakan tidak akan meningkat dengan tajam dalam beberapa kuartal ke depan

Bank Dunia tetap memproyeksikan peningkatan yang stabil dan bertahap dalam pertumbuhan ekonomi dunia pada kuartal-kuartal yang akan datang. Hal ini mencerminkan laju kegiatan ekonomi yang lambat di beberapa negara berpenghasilan tinggi, dengan pertumbuhan yang umumnya masih lemah namun dengan kecenderungan yang menguat, dibantu dengan kokohnya pemulihan sektor swasta AS dan prospek pertumbuhan yang lebih kuat di Jepang, sementara kondisi ekonomi di zona Eropa masih sulit untuk diprediksikan. Lintasan pertumbuhan pada negara-negara berkembang juga tidak merata, tetapi secara umum diperkirakan akan sedikit menguat. Untuk proyeksi tahunan, ekonomi negara - negara mitra dagang utama Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4 persen pada tahun 2013, setara dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012, dan 0,3 poin persentase lebih rendah dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, yang mencerminkan realisasi pertumbuhan yang di bawah perkiraan untuk beberapa mitra dagang utama seperti

China di kuartal pertama. Negara – negara mitra dagang utama diproyeksikan akan mencatat peningkatan menjadi 4,0 persen pada tahun 2014. Penjualan besar-besaran yang belakangan terjadi pada aset-aset pasar berkembang, dan potensi dampaknya terhadap biaya dan ketersediaan pendanaan, dan pada kepercayaan investor, tetap membawa risiko terhadap proyeksi condong ke arah penurunan.

2. APBN-P: kenaikan harga BBM bersubsidi dan pelebaran proyeksi defisit

APBN-P telah disahkan dan harga BBM bersubsidi telah dinaikkan

Dengan latar belakang pelemahan pada pasar keuangan dalam dan luar negeri, DPR menyetujui APBN-P tahun 2013 pada tanggal 17 Juni. Bagian terpentingnya adalah perubahan pada proyeksi belanja bagi subsidi BBM, yang berkaitan dengan peningkatan harga BBM bersubsidi jangka pendek, paket kompensasi yang dirancang untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin, dan proyeksi peningkatan defisit APBN untuk tahun berjalan, yang berasal dari penurunan proyeksi penerimaan nominal, peningkatan jumlah belanja dan pelemahan antisipasi pertumbuhan PDB. Kenaikan harga BBM diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 21 Juni (Permen ESDM No. 18/2013); mulai berlaku pada 22 Juni, dengan peningkatan harga premium bersubsidi sebesar 44 persen menjadi Rp 6.500 per liter dan harga solar bersubsidi meningkat sebesar 22 persen menjadi Rp 5.500 per liter.

Target defisit anggaran 2013 kini 2,4 persen dari PDB, naik dari 1,7 persen

Target defisit APBN-P 2013 sebesar 2,4 persen dari PDB, meningkat dari nilai sebelumnya sebesar 1,7 persen (Tabel 4). Perkiraan defisit yang lebih besar ini berasal dari menurunnya proyeksi penerimaan sebesar 2 persen, menjadi Rp 1.502 triliun, dan meningkatnya belanja sebesar 3 persen menjadi Rp 1.726 triliun. Defisit primer diproyeksikan akan mencapai Rp 112 triliun (1,2 persen dari PDB), yang merupakan penambahan sebesar Rp 72 triliun dibanding APBN 2013 sebelum perubahan. Proyeksi penerimaan yang lebih rendah umumnya berasal dari penurunan perkiraan penerimaan pajak tahun 2013, yang diturunkan sebesar 4 persen dari APBN awal menjadi Rp 1.148 triliun, di mana penyesuaian terbesar terjadi pada proyeksi pajak penghasilan dan pajak perdagangan internasional, yang masing-masing penurunannya sebesar 7,9 persen dan 17,5 persen. Penurunan proyeksi penerimaan juga diikuti oleh penurunan pertumbuhan PDB dari 6,8 ke 6,3 persen. Proyeksi produksi minyak untuk tahun berjalan juga diturunkan menjadi 840 ribu barel per hari (bpd) dari 900 ribu barel per hari. Namun demikian peningkatan harga minyak mentah sebesar 8 dolar AS untuk rata-rata tahun 2013, menjadi 108 dolar AS per barel, akan meningkatkan penerimaan yang berkaitan dengan penerimaan minyak sebesar hampir 7 persen dibanding APBN awal tahun 2013.

Belanja meningkat relatif terhadap APBN sebelumnya karena meningkatnya belanja sosial dan subsidi energi

Pada sisi pengeluaran, belanja subsidi BBM diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp 6,1 triliun dibanding APBN sebelum perubahan sebesar Rp 193,8 triliun, walau harga BBM bersubsidi telah dinaikkan. Hal ini mencerminkan bahwa tanpa reformasi, belanja subsidi energi akan melampaui anggaran secara signifikan sebelumnya, yang menggambarkan tekanan harga dan konsumsi BBM. Subsidi listrik ditargetkan mencapai Rp 100 triliun (Rp 19,1 triliun lebih besar dibanding APBN), sehingga keseluruhan belanja untuk subsidi energi diproyeksikan akan mencapai 9,1 persen di atas APBN sebelum perubahan, sebesar Rp 300 triliun. Hal lain dari sisi pengeluaran adalah peningkatan belanja sosial sebesar Rp 7 triliun menjadi Rp 81 triliun, yang sebagian berasal dari paket kompensasi yang dirancang untuk mengurangi dampak peningkatan harga BBM bersubsidi. Bagian B.1 membahas kebijakan bantuan sosial yang baru ini secara lebih rinci.

Reformasi subsidi BBM berdampak positif namun kecil terhadap fiskal bersih tahun 2013...

Bank Dunia memproyeksikan bahwa tanpa adanya reformasi, belanja untuk subsidi BBM untuk tahun 2013 akan melampaui APBN 2013 sebesar Rp 25 triliun. Dengan adanya reformasi ini, Bank Dunia memproyeksikan bahwa belanja subsidi BBM akan menjadi Rp 177 triliun – sedikit di bawah angka APBN-P yaitu Rp 200 triliun, yang disebabkan oleh perbedaan asumsi ekonomi makro pada harga minyak, pertumbuhan PDB dan nilai tukar (Tabel 4). Penghematan fiskal langsung untuk tahun 2013 dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun diperkirakan oleh Bank Dunia akan mencapai Rp 42,1

triliun (atau 0,5 persen dari proyeksi PDB), dan Rp 13 triliun bersih dari paket kompensasi sebesar Rp 29 triliun (atau 0,14 persen dari PDB). Manfaat fiskal utama dari reformasi subsidi pada tahun 2013 adalah bahwa Pemerintah dapat menghindari kelebihan belanja yang terlalu besar untuk subsidi BBM, yang akan memberikan tekanan tambahan terhadap defisit fiskal yang kini telah semakin melebar dengan perkiraan perlemahan penerimaan.

...sementara penghematan fiskal pada tahun selanjutnya, walaupun pada dasarnya tidak pasti, berjumlah signifikan dibanding skenario tanpa-perubahan

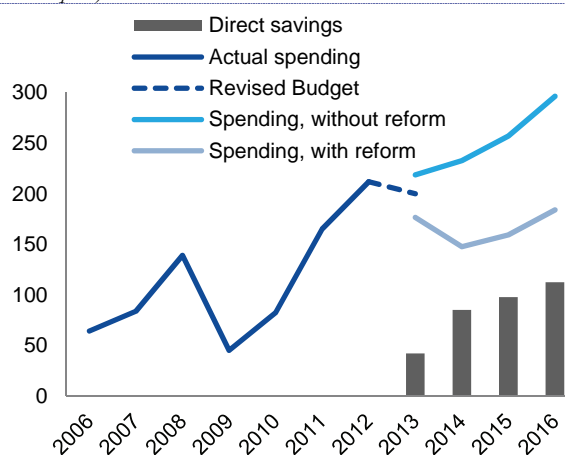
Relatif terhadap skenario tanpa reformasi, “*business as usual*”, penghematan fiskal untuk beberapa tahun berikut dari kenaikan harga BBM bersubsidi berjumlah cukup signifikan (Gambar 5). Menggunakan proyeksi ekonomi makro dasar (*baseline*) dan mengasumsikan kurs tukar dan harga minyak yang stabil, Bank Dunia memproyeksikan belanja BBM bersubsidi akan turun menjadi Rp 148 triliun pada tahun 2014 dari Rp 177 triliun pada tahun 2013 dan Rp 212 triliun pada tahun 2012. Hal ini merupakan penghematan setahun penuh sebesar Rp 85,2 triliun pada tahun 2014 (0,8 persen dari PDB), dibanding bila harga BBM tidak naik. Penghematan relatif terhadap skenario tanpa reformasi diproyeksikan akan meningkat pada dua tahun berikutnya (Rp 97,7 triliun pada tahun 2015, dan Rp 112,4 triliun pada tahun 2016). Namun perkiraan penghematan beberapa tahun kedepan ini sangat tidak pasti, karena sangat bergantung kepada harga energi internasional dan nilai tukar Rupiah. Peningkatan harga energi dunia atau depresiasi Rupiah yang berkelanjutan dapat memperbesar selisih antara harga subsidi dan harga pasar, yang mendorong belanja subsidi ke tingkat yang lebih besar.

Tabel 3: Penghematan fiskal dari reformasi subsidi BBM tahun 2013 hanyalah kecil, setelah dikurangi paket kompensasi yang cukup besar
(triliun Rupiah)

	2013 tanpa reformasi	2013 dengan reformasi
Belanja subsidi BBM	193,8*	199,9**
Proyeksi Bank Dunia untuk pengeluaran subsidi BBM	218,7	176,6
Proyeksi Bank Dunia untuk penghematan langsung dari reformasi		42,1
Paket kompensasi:		29,1
BLSM (Rp 150.000 untuk 4 bulan bagi 15,5 juta keluarga)		9,3
Pengeluaran fiskal untuk program kompensasi lainnya		19,8
Proyeksi Bank Dunia untuk penghematan bersih dari reformasi		13,1

Catatan: *APBN sebelum perubahan **APBN-P
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 5: Dalam beberapa tahun kedepan, penghematan fiskal cukup besar, dibandingkan belanja BBM bersubsidi tanpa reformasi
(triliun Rupiah)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,1 persen, sedikit lebih rendah dari asumsi APBN-P
(triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2010 Realisasi	2011 Realisasi	2012 Realisasi (belum diaudit)	2013 APBN	2013 APBN-P	2013 Triwulan Juli Bank Dunia
A. Penerimaan	995	1.211	1.336	1.530	1.502	1.448
1. Penerimaan pajak	723	874	980	1.193	1.148	1.131
2. Penerimaan bukan pajak	269	331	352	332	349	313
B. Pengeluaran	1.042	1.295	1.482	1.683	1.726	1.637
1. Pemerintah pusat, yaitu	697	884	1.001	1.154	1.197	1.108
Pegawai	148	176	198	242	233	228
Barang	98	125	137	201	203	179
Modal	80	118	140	184	188	166
Subsidi, yaitu	193	295	346	317	348	318
Subsidi BBM	82	165	212	194	200	177
Sosial	69	71	75	74	81	74
2. Transfer ke daerah	345	411	480	529	529	529
C. Neraca primer	42	9,0	-46	-40	-112	-87
D. SURPLUS / DEFISIT	-47	-84	-146	-153	-224	-189
Defisit (persen dari PDB)	-0,7	-1,1	-1,8	-1,7	-2,4	-2,1
E. Pembiayaan bersih	92	131	180	153	224	n.a
1. Pembiayaan dalam negeri	96	149	199	173	241	n.a
2. Pembiayaan luar negeri	-4,6	-17,8	-19,2	-19,5	-16,9	n.a
Asumsi ekonomi utama						
Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,1	6,5	6,2	6,8	6,3	5,9
IHK (persen)	7,0	3,8	4,3	4,9	7,2	7,2
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9.078	8.779	9.384	9.300	9.600	9.750
Harga minyak (dolar AS/barel)	79	112	113	100	108	106
Produksi minyak (ribu barel/hari)	954	899	861	900	840	840

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Defisit anggaran selama Jan–Mei 2013 berjumlah Rp 26 triliun

Defisit anggaran selama lima bulan pertama tahun 2013 tercatat mendekati Rp 26 triliun. Jumlah ini tidak umum di awal tahun; kecuali tahun 2012 yang mencatat defisit anggaran sebesar Rp 4 triliun, saldo anggaran biasanya mencatat nilai positif untuk periode ini. Defisit separuh tahun yang tidak umum ini disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan penerimaan dan tingginya belanja, yang menjadikan semakin pentingnya mengurangi belanja subsidi BBM.

Pengumpulan penerimaan mengalami perlambatan pada lima bulan pertama tahun 2013

Jumlah penerimaan pada bulan Januari-Mei 2013 meningkat sebesar 10,1 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2012 (8,3 persen), namun lebih rendah dari tahun 2011. Relatif terhadap proyeksi tahunan, penerimaan pada lima bulan pertama tahun 2013 adalah yang paling rendah pada beberapa tahun terakhir (pada 33,4 persen dari target penerimaan setahun penuh), walau dengan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan bukan pajak (yang hanya merupakan 23 persen dari jumlah penerimaan). Perlambatan dalam pertumbuhan penerimaan ini tercatat diseluruh jenis pajak, sejalan dengan penurunan pertumbuhan nominal PDB, dan perlambatan pada pertumbuhan konsumsi secara khusus, seperti dibahas pada Bagian 4, dan juga lesunya ekspor dan harga komoditas. Perlemahan dalam pertumbuhan pendapatan pajak umumnya didorong oleh lambatnya penerimaan pajak penghasilan badan karena penurunan pertumbuhan nominal PDB dan harga komoditas, dan juga karena pengaruh oleh peningkatan yang signifikan dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).¹

Tabel 5: Realisasi APBN untuk Jan – Mei telah meningkat dibanding tahun-tahun yang lalu namun masih menantang
(triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Nilai nominal (Jan – Mei)				Bagian (Jan – Mei) APBN				Pertumbuhan nominal yoy (Jan - Mei)			
	(triliun Rupiah)				(persen)				(persen)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Penerimaan negara dan hibah	356	421	456	502	35,9	36,0	33,6	33,4	20,4	18,3	8,3	10,1
Penerimaan pajak, dari	275	327	373	397	37,1	37,2	36,8	34,5	14,9	18,6	14,4	6,2
Pajak non-migas	128	150	168	170	41,7	40,9	37,7	36,5	7,9	17,0	12,0	1,0
PPN	82	92	121	138	31,3	30,9	36,0	32,5	24,1	12,0	31,1	14,1
Pajak ekspor	1	14	9	6	25,2	53,7	39,6	33,9	251,1	893,3	-32,6	-35,2
Penerimaan bukan pajak	80	94	82	105	32,5	33,0	24,0	30,0	44,1	17,5	-13,4	28,2
Pengeluaran	295	364	460	528	26,2	27,6	29,7	30,6	2,7	23,5	26,3	14,8
Pemerintah, yaitu	175	213	273	317	22,4	23,4	25,5	26,5	1,1	21,3	28,2	16,3
Pegawai	56	68	79	89	34,5	37,0	37,0	38,1	8,7	20,5	16,0	13,1
Barang	21	24	31	33	18,4	17,0	18,8	16,1	21,4	16,9	26,0	6,9
Modal	12	14	23	25	13,0	9,7	13,0	13,5	-15,6	10,5	67,6	11,1
Subsidi energi	37	54	70	95	25,6	27,8	34,7	31,6	90,8	47,1	29,4	35,2
Bantuan sosial	15	7	22	16	20,6	8,9	25,9	20,3	-10,9	-50,5	207,6	-26,6
Transfer ke daerah	119	151	187	211	34,7	36,7	39,1	39,8	5,2	26,8	23,5	12,6

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

¹ Pada tanggal 22 Oktober 2012 Pemerintah meningkatkan batas pendapatan tidak kena pajak dari Rp 15,8 juta ke Rp 24,3 juta per tahun, berlaku mulai 1 Januari 2013.

Penyerapan APBN pada lima bulan pertama sedikit membaik dibanding tahun lalu tapi tetap menghadapi tantangan

Pada sisi pengeluaran, penyerapan APBN menunjukkan pola musiman pada umumnya dimana pencairan yang relatif rendah di awal tahun, namun sedikit meningkat dibanding tahun-tahun yang lalu. Pada akhir bulan Mei, 30,6 persen dari proyeksi belanja tahunan dari APBN-P telah dicairkan, yang merupakan tingkat penyerapan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan bila belanja subsidi dikeluarkan dari perhitungan, pencairan anggaran masih dianggap cukup tinggi bila dibanding tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,4 persen. Namun demikian secara keseluruhan pencairan anggaran masih menjadi tantangan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan alokasi belanja (pemotongan anggaran) sebagai akibat dari APBN-P yang dapat menambah kerumitan pelaksanaan anggaran untuk sisa tahun 2013. Selain itu, tantangan yang masih berjalan dalam kaitannya dengan blokir DIPA (tanda bintang) pada kuartal pertama masih menyebabkan penundaan belanja pada sejumlah Kementerian negara.

Pembiayaan bruto telah meningkat secara signifikan

Kondisi pembiayaan, baik dalam maupun luar negeri, dengan peningkatan suku bunga global sejak bulan Mei, makin menegat sejak edisi Triwulanan terakhir. Mengikuti APBN-P dan peningkatan tambahan proyeksi defisit sebesar Rp 70,9 triliun, pembiayaan hutang bruto untuk tahun 2013 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 52,6 triliun relatif terhadap sasaran tahun 2013 sebelum perubahan, menjadi Rp 380,6 triliun, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Prospek penawaran tambahan hutang ini telah menjadi satu faktor yang mendorong koreksi yang signifikan dalam pasar obligasi dalam negeri sejak Februari, bersama-sama denganantisipasi pengaruh inflasi dari reformasi subsidi BBM dan kondisi pasar internasional; imbal hasil obligasi telah meningkat sebesar 150-200 basis poin lintas kurva *yield* ke tingkat yang terakhir tercatat pada pertengahan tahun 2011 (lihat Bagian 3 untuk diskusi selanjutnya tentang perkembangan pasar keuangan). Hal ini menggambarkan keadaan yang lebih menantang untuk penerbitan surat utang baru, dengan perlemahan pasar primer menjelang akhir kuartal kedua dan penerbitan bruto sebesar 56 persen yang masih tersisa untuk tahun 2013 per tanggal 25 Juni.² Risiko-risiko pembiayaan pemerintah dari *yield* yang lebih tinggi termitigasi dengan relatif rendahnya proporsi hutang dengan suku bunga variabel pada jumlah persediaan hutang (sekitar 16 persen pada tahun 2012, menurut perhitungan DJPU), dan Pemerintah memiliki cadangan dana dan pembiayaan darurat yang dapat digunakan dalam hal terjadi dislokasi yang lebih buruk pada pasar obligasi.

Bank Dunia memproyeksikan bahwa defisit fiskal tahun 2013 akan mencapai 2,1 persen dari PDB, sedikit lebih rendah dari asumsi pada APBN-P

Bank Dunia memproyeksikan bahwa keseluruhan pengumpulan penerimaan tahun 2013 akan sedikit lebih rendah dari proyeksi pada APBN-P (Tabel 4), yang merefleksikan proyeksi PDB nominal yang lebih lemah begitu juga dalam harga-harga komoditas (seperti dibahas pada Bagian 4), kondisi sektor sumber daya alam yang masih menantang, dan sedikit pengaruh negatif bersih dari pengumpulan PPN dari peningkatan subsidi BBM. Bank Dunia juga memproyeksikan bahwa keseluruhan pengeluaran akan berada sedikit di bawah APBN-P, yang mencerminkan masih banyaknya tantangan dalam upaya pencairan anggaran (terutama bagi belanja barang dan modal), dan juga belanja subsidi energi yang sedikit lebih rendah karena asumsi harga minyak yang lebih rendah (106 dolar AS per barel dibanding asumsi sebesar 108 dolar AS per barel). Pada akhirnya, Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN yang sedikit lebih kecil untuk tahun 2013 yaitu 2,1 persen dari PDB, dibanding target APBN-P sebesar 2,4 persen.

² Lihat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Presentasi Pertemuan Investor bulan Juni 2013, yang tersedia secara *online*.

3. Pasar keuangan, valuta, dan kredit Indonesia: kuartal yang bergejolak

Penurunan yang belakangan terjadi di pasar keuangan, terjadi setelah pembukaan yang kuat pada kuartal kedua

Sementara penyesuaian yang cukup pada pasar keuangan Indonesia yang terjadi sejak bulan Mei (Gambar 3), hal ini harus ditempatkan dalam konteks kinerja yang kuat secara umum pada lima bulan pertama tahun 2013. Saham-saham Indonesia mencatat prestasi yang kuat secara khusus pada paruh pertama kuartal tersebut, meningkatkan naiknya harga pada kuartal pertama dengan berlanjutnya pertumbuhan keuntungan perusahaan lintas sebagian besar sektor dan kuatnya pembelian bersih ekuitas Indonesia oleh investor asing, yang mencapai Rp 26 triliun (2,7 miliar dolar AS) dari awal tahun hingga pertengahan bulan Mei 2013, yang dipimpin oleh sektor properti (yang naik sebanyak 57 persen) dan barang konsumsi (yang meningkat sebesar 38 persen). Kinerja pasar obligasi lebih bercampur, dengan peningkatan inflasi yang mendorong imbal hasil menjadi agak lebih tinggi, namun investor asing masih menjadi pembeli bersih obligasi negara Indonesia sebesar Rp 33 triliun selama periode tersebut.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan, dan Bank Indonesia telah meningkatkan suku bunganya...

Setelah melemah di bulan Maret dan April, dibantu dengan menguatnya pembelian bersih saham dan obligasi dalam negeri oleh investor asing, dan dengan penerbitan obligasi negara dan BUMN dalam dolar AS, kondisi likuiditas dolar AS di luar negeri kemudian mengetat karena aliran keluar modal portofolio yang besar. Cadangan devisa mencatat penurunan pada bulan Mei menjadi 105,2 miliar dolar AS walau telah menerima dorongan dari penerbitan obligasi luar negeri yang cukup besar. Tekanan depresiasi valuta meningkat menjelang akhir bulan Mei, yang mencerminkan percepatan aliran keluar portofolio, dengan kurs Rupiah di dalam negeri turun hingga mencapai Rp 9,960 per dolar AS pada akhir Juni untuk pertama kalinya sejak bulan September 2009, sementara suku bunga *non-deliverable forward* (NDF) asing menembus 10,000 pada awal Juni. Bank Indonesia mengambil langkah yang mengejutkan pasar pada tanggal 12 Juni dengan meningkatkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) sebesar 25 basis poin, menjadi 4,25 persen. Langkah ini diikuti dengan peningkatan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada tanggal 13 Juni – peningkatan pertama sejak tahun 2011.

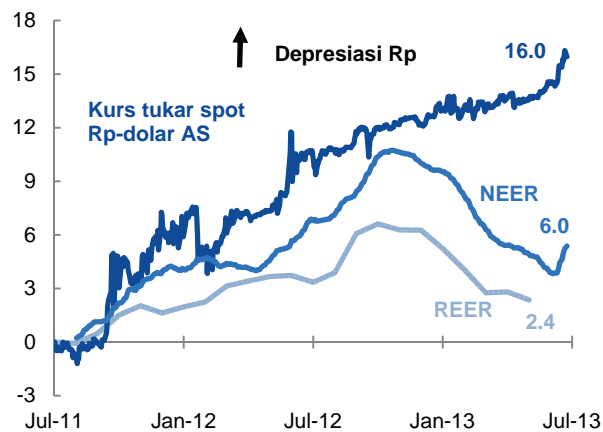
...tetapi Rupiah sebetulnya mengalami apresiasi di 2013 bila dihitung berdasarkan pembobotan perdagangan

Sementara Rupiah telah mengalami depresiasi secara berkelanjutan terhadap dolar AS secara nominal sejak pertengahan tahun 2011, mata uang Rupiah sesungguhnya mengalami apresiasi secara pembobotan perdagangan dan secara riil sejak awal tahun 2013. Apresiasi ini mencerminkan depresiasi valas yang belakangan terjadi terhadap negara – negara mitra perdagangan utama (terutama Jepang, yang mana Rupiah mencatat apresiasi sebesar 10 persen terhadap Yen sejauh ini pada tahun 2013), dan laju inflasi Indonesia yang lebih tinggi juga menekan kurs tukar riilnya menjadi lebih tinggi. Rupiah kini telah meningkat sebesar 3 persen secara pembobotan perdagangan dan sebesar 4 persen secara riil sejak awal tahun 2013. Karenanya, sejak awal tahun 2013 hanya terdapat sedikit penyesuaian riil kurs tukar terhadap posisi luar negeri Indonesia yang lebih lemah, yang menunjukkan bahwa gabungan dari kebijakan moneter yang lebih ketat dan berlanjutnya depresiasi Rupiah secara teratur dapat merupakan langkah yang tepat.

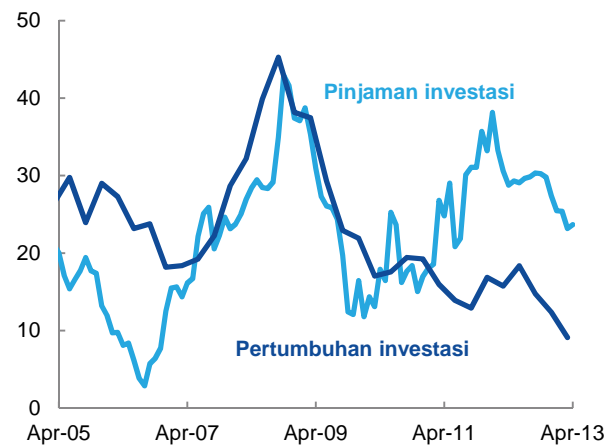
Pertumbuhan kredit bank telah menurun belakangan ini, didorong oleh perlemahan pemberian pinjaman investasi

Pertumbuhan kredit terus melambat pada kuartal kedua, dengan pertumbuhan kredit nominal melambat menjadi 22 persen yoy pada bulan April, memotong pertumbuhan riil (setelah terjadi) menjadi 15 persen yoy pada bulan April, laju terlambatnya sejak bulan Desember 2010. Pinjaman investasi memimpin moderasi tersebut, dengan penurunan sebesar 24 persen yoy hingga bulan April, turun dari nilai tertingginya sebesar 30 persen pada bulan Juli 2012, sejalan dengan perlemahan pada kegiatan investasi riil (Gambar 7). Laju pertumbuhan kredit konsumsi melemah menjadi 19 persen hingga bulan Maret, sementara pertumbuhan dalam kredit modal kerja juga turut menurun belakangan ini. Indikator kehati-hatian tingkat sistem perbankan tetap stabil selama tahun 2013, dengan kredit macet yang bertahan pada kisaran 2 persen, sementara metrik profitabilitas bagi bank-bank Indonesia masih bertahan kuat, termasuk relatif terhadap pembandingnya di wilayah yang sama.

Gambar 6: Rupiah telah terapresiasi secara nominal dan berdasarkan pembobotan perdagangan selama tahun 2013 (perubahan kumulatif sejak 1 Juli 2011, persen)



Gambar 7: Pinjaman investasi menurun sejalan dengan perlambatan laju pertumbuhan investasi riil (perubahan tahun ke tahun, persen)

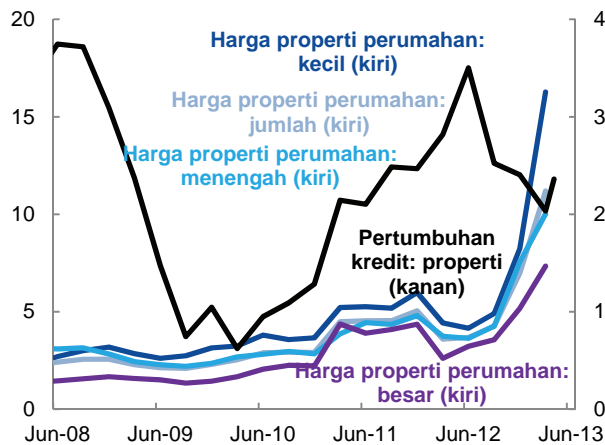


Catatan: NEER adalah rata-rata bergerak 1-bulan dari indeks harian NEER yang dihitung dengan jumlah bobot perdagangan 2012
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
Sumber: BIS (REER); BPS; perhitungan staf Bank Dunia

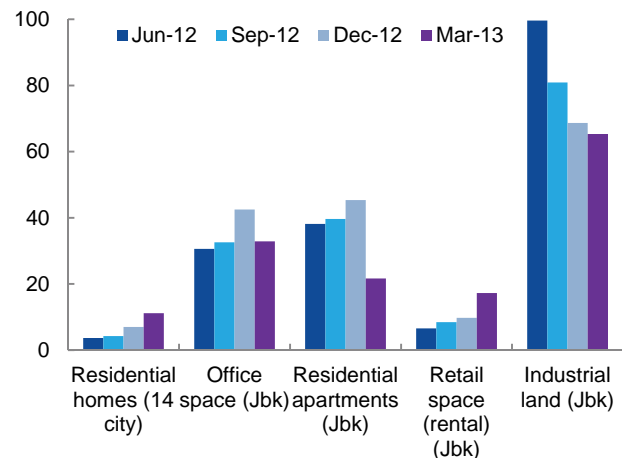
Harga properti tempat tinggal meningkat dengan laju yang tercepat selama dekade terakhir, sementara properti komersial mencatat pertumbuhan yang lebih kuat

Walau dengan perlambatan laju pemberian pinjaman bank bagi properti rumah dan konstruksi pada beberapa bulan terakhir (Gambar 8), pertumbuhan harga properti telah meningkat. Pertumbuhan harga properti secara nasional mencapai 11,2 persen selama tahun berjalan hingga bulan Maret, laju tercepat selama dekade terakhir. Peningkatan harga dipicu oleh kuatnya pertumbuhan harga untuk perumahan dengan ukuran yang lebih kecil (dengan luas tanah kurang dari 36 meter persegi), yang tidak disertakan dalam persyaratan uang muka minimum (*loan-to-value*) yang lebih ketat yang mulai berlaku bagi kredit perumahan pada pertengahan tahun 2012. Survei BI terbaru tentang pasar properti rumah tinggal sekunder Jakarta (tidak termasuk apartemen) juga menunjukkan pertumbuhan harga yang kuat, dengan peningkatan harga sebesar 3,8 persen kuartal-ke-kuartal pada kuartal pertama bagi rumah-rumah berukuran menengah dan sebesar 3,5 persen bagi rumah-rumah yang lebih besar, suatu cerminan kuatnya pertumbuhan harga tanah di Jakarta.³ Sementara itu properti komersial juga menunjukkan pertumbuhan harga yang mantap dan berlanjut, dengan harga tanah industri di wilayah Jabodetabek meningkat sebesar 65 persen selama setahun hingga kuartal pertama 2013, sementara harga sewa ruang kantor meningkat sebesar 15 persen pada periode yang sama (Gambar 9). Pesatnya pertumbuhan harga yang sedemikian cepat pada sektor properti membutuhkan pemantauan yang cermat namun seperti dicatat pada Triwulanan edisi bulan 2013, paparan yang berkaitan dengan properti di dalam sistem keuangan tetaplah kecil dengan kredit yang berkaitan dengan properti berjumlah sekitar 14 persen dari jumlah kredit perbankan, dan sekitar 12 persen dari penerbitan obligasi perusahaan pada perhitungan periode setahun hingga bulan Maret 2013.

³ Survei Bank Indonesia tentang Harga Properti Residensial di Pasar Sekunder pertama kali diterbitkan pada tanggal 24 April 2013 dengan menggunakan data hingga kuartal kedua tahun 2012. Rumah berukuran menengah memiliki ukuran antara 80 dan 150 meter persegi, sementara rumah besar memiliki ukuran di atas 150 meter persegi. Survei itu tidak melibatkan apartemen tempat tinggal.

Gambar 8: Harga rumah tinggal terus meningkat walau pertumbuhan kredit perumahan menurun...*(perubahan yoy, persen)*

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 9: ...dengan pesatnya pertumbuhan harga dan kuatnya permintaan properti komersial di Jabodetabek*(perubahan tahun berjalan, persen)*

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

4. Prospek ekonomi Indonesia mengalami penurunan

Prospek pertumbuhan telah menurun...

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun 2013 ke 6,0 persen tahun-ke-tahun, sedikit lebih lemah dari perkiraan, dengan dampak yang tertunda dari menurunnya harga komoditas yang membebani investasi dan ekonomi menghadapi terjangan dari pengaruh gejolak pasar keuangan dan peningkatan harga BBM bersubsidi.

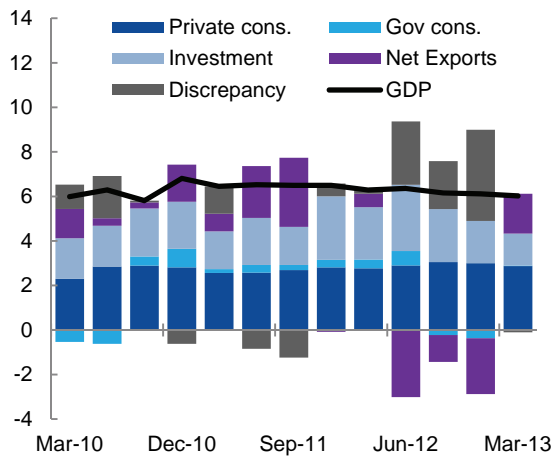
...yang mendorong Bank Dunia untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2013 menjadi 5,9 persen

Bank Dunia telah menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan PDB tahun 2013 menjadi 5,9 persen, dari 6,2 persen yang diproyeksikan pada Triwulanan bulan Maret 2013, sebagian besar disebabkan oleh prospek permintaan dalam negeri yang lebih lemah. Pertumbuhan investasi lebih lambat dari perkiraan, dengan pengaruh kepercayaan yang berasal dari antisipasi reformasi subsidi BBM dan koreksi pada pasar aset yang membebani permintaan dalam negeri. Beban terhadap pertumbuhan dari ekspor bersih diperkirakan akan menurun pada sisa tahun 2013, walau secara relatif terhadap proyeksi yang lalu pemulihan ekspor diperkirakan akan melambat dan pertumbuhan impor diperkirakan juga akan lebih lemah, yang mencerminkan perlemahan prospek investasi. Dampak bersih sektor riil dari usulan reformasi BBM bersubsidi diperkirakan akan berjumlah kecil, dengan dampak negatif terhadap konsumsi dan investasi dari peningkatan harga BBM akan sebagian besar diimbangi dengan dampak positif terhadap pertumbuhan paket kompensasi. Namun dengan prospek inflasi yang lebih tinggi, pengetatan lebih lanjut mungkin dibutuhkan yang makin memperlambat laju pertumbuhan.

Pertumbuhan PDB riil pada kuartal pertama 2013 terus mengalami pelemahan

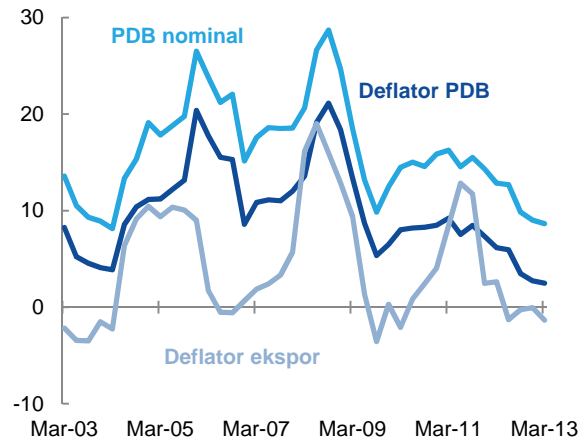
Kegiatan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan pada kuartal pertama tahun 2013, dengan penurunan pertumbuhan permintaan dalam negeri, terutama investasi (Gambar 10). PDB riil meningkat sebesar 6,0 persen tahun-ke-tahun pada kuartal pertama, yang merupakan kuartal kesepuluh dengan pertumbuhan 6 persen atau lebih secara berturut-turut. Hasil kuartal pertama lebih rendah dari pertumbuhan 6,1 persen tahun-ke-tahun yang tercatat pada kuartal akhir tahun 2012, sementara ekonomi tumbuh 1,3 persen secara kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman, turun dari 1,7 persen pada kuartal keempat. Pertumbuhan PDB nominal juga terus menurun, menjadi 8,7 persen tahun-ke-tahun, laju yang paling lambat dalam 9 tahun terakhir (Gambar 11). Perlemahan pertumbuhan nominal umumnya disebabkan oleh penurunan tajam pertumbuhan deflator PDB, dengan penurunan yang signifikan dalam harga ekspor dengan pelemahan harga-harga komoditas global sebagai pendorong utama.

Gambar 10: Pertumbuhan PDB riil terus melemah, dengan kontribusi dari investasi semakin mengecil
(pertumbuhan PDB riil tahun ke tahun, persen)



Catatan: Perbedaan termasuk perbedaan statistika dan persediaan
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 11: PDB nominal masih tetap lemah, sejalan dengan lemahnya pertumbuhan dalam deflator PDB
(pertumbuhan tahun ke tahun, persen)



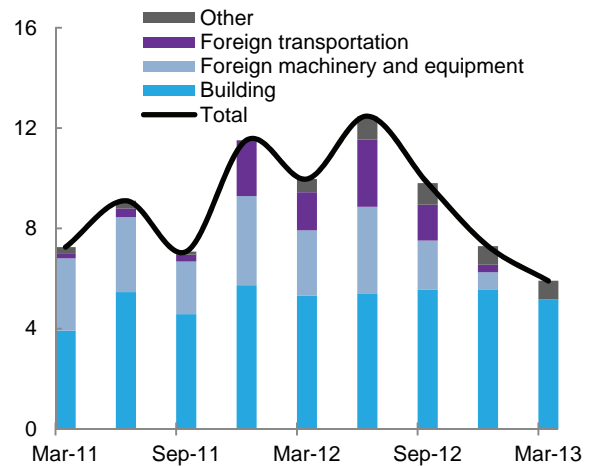
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan investasi terus melambat, umumnya didorong oleh perlemahan investasi dalam transportasi, permesinan dan peralatan asing

Pertumbuhan dalam investasi riil terus melambat pada kuartal pertama 2013, meningkat sebesar 5,9 persen tahun-ke-tahun, yang jauh di bawah 7,3 persen pada kuartal keempat dan puncaknya sebesar 12,5 persen kuartal Juni tahun 2012. Secara penyesuaian musiman berurutan, investasi pada kuartal itu mendarat, mengikuti pertumbuhan sebesar 1,9 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman pada kuartal terakhir tahun lalu. Pendorong moderasi pertumbuhan yang signifikan ini adalah transportasi luar negeri, permesinan dan peralatan, yang kontribusinya secara bersama-sama terhadap pertumbuhan investasi secara agregat telah turun dari lebih dari 6,0 poin persentase pada kuartal Juni tahun 2012 menjadi kontribusi yang kosong sama sekali terhadap keseluruhan pertumbuhan investasi pada kuartal Maret 2013 (Gambar 12). Perlemahan ini konsisten dengan perlemahan yang masih berlangsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan komoditas, yang banyak menggunakan investasi modal asing. Juga terdapat sejumlah penurunan dalam investasi gedung pada kuartal tersebut (85 persen dari jumlah investasi), yang tumbuh sebesar 7,2 persen tahun-ke-tahun, turun dari 7,8 persen pada kuartal akhir tahun 2012.

Gambar 12: Moderasi investasi umumnya didorong oleh penurunan tajam dalam permesinan dan peralatan asing dan transportasi

(kontribusi terhadap pertumbuhan investasi riil, persen, tahun ke tahun)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Konsumsi swasta mencatat perlambatan, dengan kenaikan harga bahan pangan menurunkan daya beli konsumen

Pertumbuhan konsumsi masyarakat juga mencatat moderasi pada kuartal pertama, meningkat sebesar 5,2 persen tahun-ke-tahun, sedikit turun dari 5,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal akhir tahun 2012. Hal ini mencerminkan perlambatan dalam konsumsi bukan bahan pangan, dengan peningkatan harga bahan pangan yang signifikan dalam kuartal itu tampaknya membawa dampak yang negatif. Di sisi lain, konsumsi pemerintah menguat secara berurutan, meningkat sebesar 4,6 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman, dengan perbedaan 0,4 persen lebih tinggi dibanding satu tahun yang lalu, dengan lemahnya realisasi menjelang akhir tahun 2012.

Ekspor bersih mencatat kontribusi yang positif bagi pertumbuhan, dengan peningkatan tipis pada ekspor dan penurunan besar pada impor

Ekspor bersih berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan kuartal pertama, dengan kontribusi sekitar 3,5 poin persentase terhadap pertumbuhan kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman dan 1,8 persen terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun. Ekspor secara volume (walau tidak secara nilai) terus mencatat pemulihan selama kuartal tersebut, dengan peningkatan sebesar 3,0 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman dan 3,4 persen tahun-ke-tahun. Yang lebih menyolok adalah besarnya penurunan impor yang mencapai 5,4 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman, turun sebesar 0,4 persen tahun-ke-tahun, yang sejalan dengan pelemahan pertumbuhan dalam permintaan dalam negeri.

Diskrepansi statistik dan persediaan tidak lagi menjadi bagian pertumbuhan yang besar

Setelah berpengaruh besar kepada pertumbuhan pada sebagian besar tahun 2012, diskrepansi statistik dan inventori menurunkan 0,1 poin persentase dari pertumbuhan tahun-ke-tahun pada kuartal Maret 2013. Sebagai akibatnya, perbedaan yang cukup besar antara pengukuran pertumbuhan PDB dan penjualan riil akhir (yaitu jumlah pengukuran konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi tetap dan ekspor bersih), yang dibahas pada edisi-edisi terakhir Triwulanan sebagai bersifat indikatif akan risiko sisi permintaan terhadap pertumbuhan produksi, telah menyempit sesuai dengan pelemahan yang terjadi.

Pada sisi produksi, sebagian besar pelemahan pertumbuhan didorong oleh sektor industri, terutama pertambangan dan penggalan

Pada sisi produksi, sebagian besar pelemahan pada kuartal pertama didorong oleh sektor-sektor industri, sementara produksi perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan meningkat dan kinerja sektor jasa-jasa bercampur. Secara agregat, produksi sektor industri meningkat sebesar 4,9 persen tahun-ke-tahun, turun dari 5,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal akhir tahun 2012, dengan pertambangan dan penggalan masih terus mencatat prestasi yang kurang, turun sebesar 0,4 persen dibanding satu tahun yang lalu. Sektor-sektor industri lain terus mencatat kinerja yang kokoh, walau terdapat sejumlah penurunan kegiatan manufaktur, dengan pertumbuhan produksi sedikit menurun ke 5,8 persen tahun-ke-tahun, dan dalam sektor konstruksi, dengan penurunan pertumbuhan produksi menjadi 7,2 persen tahun-ke-tahun. Produksi sektor jasa secara agregat meningkat sebesar 7,6 persen tahun-ke-tahun, masih sama seperti kuartal akhir tahun 2012. Terdapat sejumlah penurunan dari perdagangan, hotel dan rumah makan, yang meningkat hanya sebesar 6,5 persen tahun-ke-tahun, jauh di bawah 7,8 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4. Sektor ini, yang merupakan sektor jasa terbesar, merupakan bagian yang besarnya hampir mencapai 15 persen dari PDB nominal dan telah memoderasi kegiatan pertumbuhan ekonomi sejak akhir tahun 2011. Namun kelemahan ini diimbangi oleh kuatnya hasil dari sub-sub sektor jasa lainnya, seperti transportasi dan komunikasi (meningkat sebesar 10,0 persen tahun-ke-tahun) dan kepemilikan keuangan dan jasa-jasa bisnis (meningkat sebesar 8,4 persen tahun-ke-tahun).

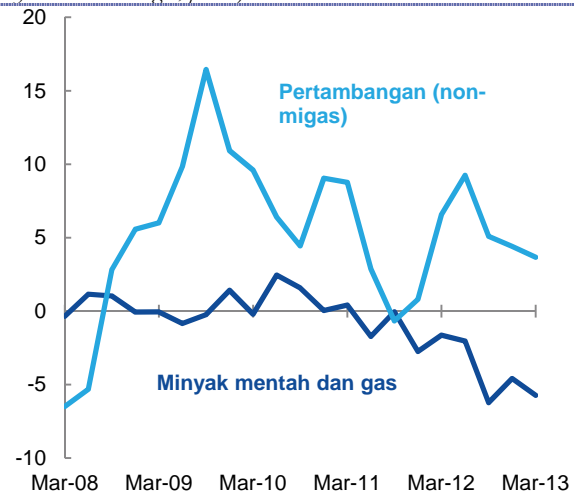
Produksi pada sub-sektor migas semakin menurun, sementara pertumbuhan kegiatan pertambangan lainnya tetap lemah

Pelemahan pada sektor pertambangan dan penggalian umumnya didorong oleh pertambangan, terutama minyak dan gas (migas). Sektor migas telah berkontraksi selama dua tahun terakhir, dengan penurunan produksi sebesar 5,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal Maret 2013, mengikuti kontraksi sebesar 4,6 persen pada kuartal akhir tahun 2012 (Gambar 13). Pertumbuhan pada produksi pertambangan non-migas juga mengalami perlambatan pada beberapa kuartal terakhir, menjadi 3,7 persen tahun-ke-tahun pada kuartal Maret, turun dari 4,4 persen pada kuartal akhir tahun 2012. Secara nominal, pertumbuhan produksi kontrak langsung non-migas mencapai 4,2 persen tahun-ke-tahun pada kuartal Maret. Namun secara berurutan, terdapat sejumlah tanda-tanda pencapaian dasar pada produksi pertambangan non-migas, walau pada tingkat yang jauh di atas pencapaian puncak pasca krisis keuangan dunia; produksi pertambangan non-migas pada kuartal satu meningkat sebesar 3,3 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman secara riil, dan sebesar 7,9 persen secara nominal.

Sejumlah indikator frekuensi tinggi telah melambat belakangan ini...

Indikator-indikator berfrekuensi tinggi untuk bulan April dan Mei menunjukkan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan. Penurunan impor barang modal yang berkelanjutan (Gambar 14) bersama-sama dengan moderasi pinjaman investasi seperti disinggung di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi akan tetap lemah untuk jangka pendek. Impor barang-barang modal semakin menurun selama lima kuartal berturut-turut pada April, dan telah menyusut sebesar 22,5 persen tahun-ke-tahun. Penurunan penjualan semen, indikator utama dalam kegiatan pembangunan, turun menjadi 13,1 persen tahun-ke-tahun pada bulan Mei, lebih rendah dibanding 16,8 persen pada bulan Maret dan turun secara signifikan secara penyesuaian musiman berurutan (Gambar 15), yang menunjukkan berlanjutnya moderasi dalam investasi pembangunan seperti terlihat pada kuartal pertama. Namun kuatnya permintaan yang berkelanjutan dalam pasar properti rumah tinggal, yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam harga-harga properti seperti dibahas pada Bagian 3, akan memberi sejumlah dukungan bagi investasi pembangunan ke depan. Sementara indeks PMI HSBC, yang mencapai 51,6 pada bulan Mei, terus menunjukkan kondisi usaha yang meluas pada sektor manufaktur, produksi industri menunjukkan tanda-tanda pelemahan momentum secara penyesuaian musiman berurutan (Gambar 15). Indikator-indikator konsumsi menunjukkan sejumlah pelemahan jangka pendek, dengan penjualan ritel meningkat sebesar 9,7 persen tahun-ke-tahun, jauh di bawah tingkat pertumbuhan yang mendekati 20 persen tahun-ke-tahun menjelang penutupan 2012. Indeks kepercayaan konsumen terus menurun, dengan indeks kepercayaan konsumen BI yang lebih rendah pada bulan April dan Mei, tampaknya karena adanya dampak negatif yang berasal dari antisipasi akan pengumuman reformasi subsidi Pemerintah. Namun sesuai dengan pengalaman yang lalu, belanja yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) presiden tahun 2014 akan memberikan dorongan konsumsi yang besar menjelang akhir 2013 hingga awal 2014.

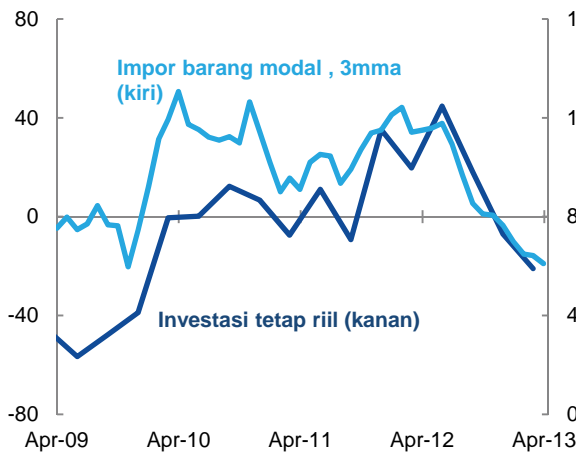
Gambar 13: Produksi sektor pertambangan masih lemah
(perubahan tahun ke tahun pada pertambangan riil (non-migas), produksi minyak mentah dan gas, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

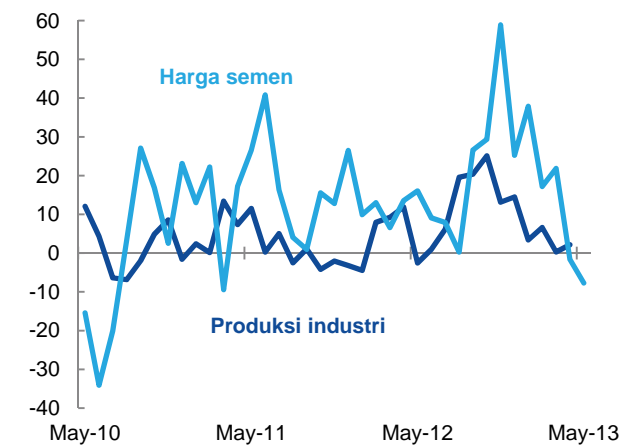
Gambar 14: Berlanjutnya pelemahan impor barang modal menunjukkan pelemahan lanjutan dalam pertumbuhan investasi tetap...

(investasi tetap riil dan rata-rata bergerak impor barang modal 3-bulanan dalam dolar AS, persen tahun ke tahun)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 15: ...sementara indikator ekonomi berfrekuensi tinggi menunjukkan berlanjutnya moderasi pertumbuhan (perubahan 3-bulan dibanding 3 bulan yang lalu, tingkat penyesuaian musiman yang disetahunkan, persen)



Catatan: Data telah disesuaikan untuk periode Ramadan
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Dampak bersih terhadap pertumbuhan dari reformasi subsidi diperkirakan tidak akan besar

Kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menjadi kendala tambahan bagi investasi jangka pendek, karena akan secara langsung menambah beban terhadap biaya transportasi, dan secara tidak langsung terhadap biaya barang-barang setengah jadi, sehingga meningkatkan biaya operasional dan investasi. Di sisi lain, penurunan pemborosan dana bagi subsidi BBM akan mendorong kepercayaan investasi terhadap posisi fiskal dan proses reformasi Indonesia. Peningkatan harga BBM juga diperkirakan akan membawa dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat dengan penurunan daya beli. Namun paket kompensasi yang diusulkan (sekitar Rp 29 triliun), yang termasuk bantuan langsung yang signifikan kepada rakyat miskin, seperti dibahas pada Bagian B.1, akan mengimbangi sebagian dampak negatif terhadap konsumsi. Bagi rumah tangga yang lebih berada mungkin terjadi penurunan konsumsi secara sementara namun hal itu dapat termitigasi dengan peningkatan upah nominal seperti yang terjadi pada tahun 2008 ketika nominal upah pekerja manufaktur meningkat sebagai tanggapan atas kenaikan harga BBM dan peningkatan inflasi harga bahan pangan. Paket kompensasi Pemerintah juga menyertakan sejumlah belanja untuk infrastruktur dasar (sebesar Rp 7,25 triliun), yang akan membawa pengaruh meluas ke bagian-bagian lain ekonomi Indonesia.

Perkiraan pertumbuhan PDB adalah 5,9 persen untuk tahun 2013 dan 6,2 persen untuk tahun 2014

Proyeksi Bank Dunia bagi pertumbuhan PDB untuk tahun 2013 adalah 5,9 persen, lebih rendah dari proyeksi 6,2 persen pada Triwulanan edisi bulan Desember 2012 (Tabel 6). Konsumsi masyarakat diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, yang didukung oleh belanja pra-pemilu menjelang akhir tahun ini, walau mungkin terdapat sejumlah pelemahan jangka pendek. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan semakin melambat, seperti ditunjukkan oleh berlanjutnya moderasi dalam kredit investasi dan semakin menurunnya belanja untuk barang-barang modal impor. Pertumbuhan yang kokoh dalam investasi pembangunan, yang didukung pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi rumah tinggal, akan memberikan sejumlah pengimbang, karena konstruksi merupakan 85 persen dari jumlah belanja investasi nominal. Pertumbuhan impor dan ekspor akan bersama-sama berada di bawah tekanan selama tahun 2013, dengan sedikit pelemahan dibanding pertumbuhan mitra perdagangan utama yang diproyeksikan sebelumnya, yang mendorong penurunan pertumbuhan ekspor, sementara pertumbuhan impor juga diturunkan, sesuai dengan prospek investasi yang lebih lemah. Untuk tahun 2014, pertumbuhan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,2 persen, dengan meluasnya dampak pemulihan global, yang akan mendorong ekspor dan investasi.

Tabel 6: Menurut skenario dasar (*baseline*) proyeksi pertumbuhan PDB adalah 5,9 persen untuk 2013, dan meningkat menjadi 6,2 persen untuk 2014*(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)*

	Tahunan			Tahun berjalan ke kuartal Desember			Revisi tahunan	
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2013	2014
1. Indikator ekonomi utama								
Jumlah pengeluaran konsumsi	4,8	4,9	5,6	3,9	5,7	5,0	-0,1	-0,2
Pengeluaran konsumsi swasta	5,3	5,0	5,7	5,4	5,2	5,0	-0,5	-0,2
Konsumsi pemerintah	1,2	4,5	4,8	-3,3	8,2	4,9	2,7	-0,8
Pembentukan modal tetap bruto	9,8	4,4	6,2	7,3	4,1	6,7	-3,6	-3,4
Ekspor barang dan jasa	2,0	5,8	6,1	0,5	6,6	6,8	-0,1	-5,2
Impor barang dan jasa	6,6	1,0	5,2	6,8	-1,0	5,8	-7,6	-4,2
Produk domestik bruto	6,2	5,9	6,2	6,1	5,9	6,5	-0,3	-0,2
Pertanian	4,0	4,1	3,1	2,0	5,8	3,2	1,3	-0,1
Industri	5,2	4,5	5,0	5,4	4,1	5,3	-0,6	-0,4
Jasa-jasa	7,7	7,5	8,0	7,6	7,4	8,1	-0,4	-0,1
2. Indikator luar negeri								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	0,2	-4,8	5,2	n/a	n/a	n/a	-6,8	0,9
Saldo neraca berjalan (miliar AS\$)	-24,1	-25,2	-22,2	n/a	n/a	n/a	-1,5	0,2
Neraca perdagangan (miliar AS\$)	-2,2	-5,0	-0,6	n/a	n/a	n/a	-5,3	-5,2
Saldo neraca keuangan (miliar AS\$)	24,9	20,5	27,4	n/a	n/a	n/a	-5,2	0,7
3. Pengukuran ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	4,3	7,2	6,7	4,4	9,0	5,3	1,8	1,5
Indeks keranjang kemiskinan	6,5	7,4	8,0	5,4	9,2	7,3	1,3	1,2
Deflator PDB	4,6	4,3	6,3	2,7	6,5	5,3	-0,6	0,4
PDB nominal	11,0	10,5	12,9	9,0	12,5	12,2	-0,9	0,2
4. Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9419	9750	9700	9630	9770	9700	150,0	200,0
Harga minyak Indonesia (AS\$/barel)	113	106	105	108	105	105	-4,0	0,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,4	3,4	4,0	3,3	3,8	3,4	-0,3	0,0

Catatan: Angka 2012 dapat direvisi. Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional. Revisi relatif terhadap proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013.

Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi Bank Dunia.

5. Inflasi akan naik untuk sementara mengikuti kenaikan harga BBM bersubsidi

Outlook inflasi didominasi oleh peningkatan harga BBM bersubsidi...

Peningkatan harga BBM bersubsidi akan menambah sekitar 1,8 poin persentase kepada rata-rata inflasi tahunan...

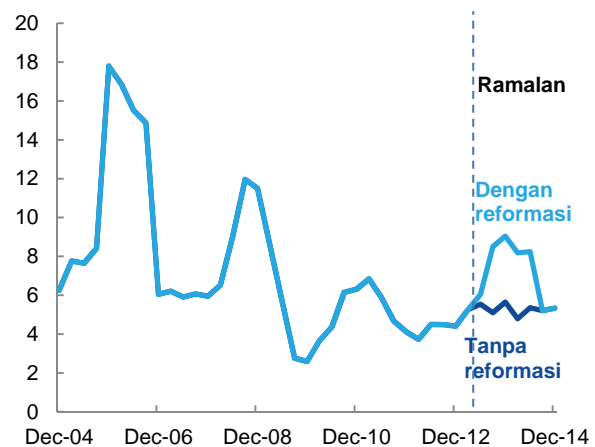
...dan juga mendorong naik inflasi keranjang kemiskinan...

Langkah Pemerintah untuk meningkatkan harga solar sebesar Rp 1.000 per liter dan premium sebesar Rp 2.000 per liter pada tanggal 22 Juni 2013 diperkirakan akan mendorong peningkatan yang tajam pada inflasi IHK dan keranjang kemiskinan, dengan peningkatan yang lebih landai pada inflasi inti. Peningkatan tajam itu diperkirakan hanya akan bersifat sementara dan akan berangsur-angsur hilang dengan berjalannya waktu. Pengelolaan yang berhati-hati oleh Bank Indonesia akan membantu memastikan bahwa tidak ada peningkatan perkiraan inflasi maupun hal yang mendasarinya secara terus-menerus. Berbeda dengan kenaikan harga BBM sebelumnya, peningkatan ini terjadi pada saat inflasi sedang terkendali dengan baik, dimana inflasi IHK yang mengalami moderasi sejalan dengan penurunan harga bahan pangan serta inflasi inti berada pada tingkat relatif rendah dan stabil.

Harga BBM bersubsidi yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan inflasi sekitar 1,8 poin persentase pada tahun 2013 dan sekitar 1,5 poin persentase pada 2014. Dengan demikian, inflasi diperkirakan akan mencapai 7,2 persen pada 2013 dan 6,7 persen pada 2014, dan mencapai puncaknya sekitar 9 persen tahun-ke-tahun pada akhir 2013 (Gambar 16). Dampak yang cukup besar ini mencerminkan dampak langsung yang kuat dari peningkatan harga bensin, dan juga dampak tidak langsung yang kuat karena bensin merupakan bahan yang penting bagi banyak barang-barang konsumsi. Sementara itu, karena bobot bahan bakar solar terhadap rumah tangga tidaklah besar, tapi dampak tidak langsungnya cukup besar karena solar digunakan oleh bus-bus dan truk-truk untuk transportasi umum dan perdagangan. Tahapan dari reformasi ini berarti bahwa dampak terhadap inflasi tahunan akan berangsur-angsur menghilang pada kuartal September 2014, pada saat inflasi IHK diperkirakan mencapai 5,2 persen tahun-ke-tahun (Gambar 16).

Kenaikan harga BBM juga diperkirakan akan mendorong inflasi keranjang kemiskinan secara signifikan menjadi masing-masing sekitar 1,2 poin persentase pada tahun 2013 dan 1,3 poin persentase pada 2014 menjadi 7,4 persen dan 8,0 persen. Sementara rata-rata konsumen akan menghadapi peningkatan harga bensin ketika membeli di pompa bensin, juga akan mengalami kenaikan harga secara umum pada barang-barang lainnya, sehingga keluarga miskin, yang konsumsinya hampir tidak memiliki keterkaitan langsung kepada BBM, secara umum akan menerima dampak dari kenaikan biaya transportasi pada harga bahan pangan (yang merupakan 60 persen dari keranjang konsumsi itu) dan dari transportasi umum.

Gambar 16: Proyeksi inflasi IHK, dengan dan tanpa reformasi BBM bersubsidi
(persen, tahun-ke-tahun)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

...namun inflasi inti diperkirakan akan tetap terkendali

Tekanan harga diperkirakan akan terkendali, dengan dampak terhadap inflasi inti yang lebih ringan. Hal ini karena inflasi inti tidak menghitung barang-barang yang harganya dikendalikan oleh pemerintah dan fluktuatif, serta inti hanya menerima pengaruh tidak langsung dari peningkatan biaya transportasi dan bahan produksi lainnya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menetapkan harga yang baru. Inflasi inti diperkirakan berada pada kisaran 0,5 poin persentase lebih tinggi pada 2013 dan 2014, dengan asumsi bahwa tidak ada peningkatan proyeksi inflasi yang berkelanjutan (asumsi yang beralasan dengan sifat peningkatan harga yang bersifat satu kali saja, namun tetap membutuhkan kewaspadaan dari pihak Bank Indonesia untuk bertindak bila terdapat perkiraan akan inflasi yang lebih tinggi).

Inflasi IHK mengalami perlambatan pada bulan April dan Mei...

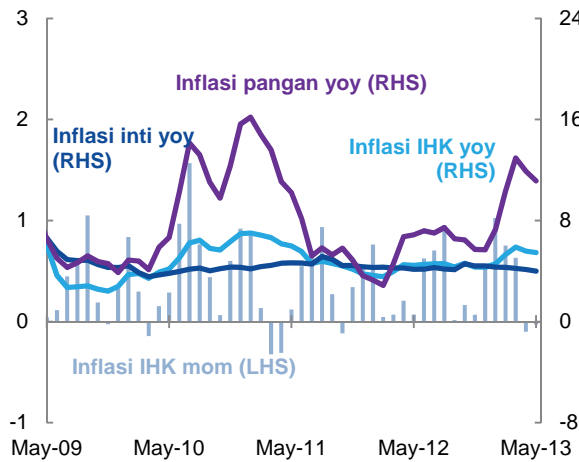
Seperti disinggung di atas, peningkatan harga BBM terjadi ketika inflasi IHK sedang menurun, yang didorong oleh penurunan inflasi bahan pangan, dan inflasi inti yang terkendali. Inflasi IHK turun menjadi 5,5 persen tahun-ke-tahun pada bulan Mei, sedikit menurun dari 5,6 persen pada bulan April dan nilai tertingginya yang terbaru sebesar 5,9 persen pada bulan Maret. Inflasi keranjang kemiskinan juga mengalami moderasi, menjadi 6,6 persen pada bulan Mei dari 7,0 persen tahun-ke-tahun pada bulan Maret. Selain itu, inflasi inti tetap bertahan rendah dan stabil, pada 4,0 persen tahun-ke-tahun untuk bulan Mei, yang menunjukkan bahwa tekanan harga tetap lunak (Gambar 17), dibantu dengan tren harga emas dunia yang mengalami penurunan. Sementara itu, inflasi keseluruhan ekonomi, yang diukur oleh deflator PDB, terus bergerak di bawah nilai inflasi IHK pada kuartal pertama tahun ini, turun menjadi 2,5 persen tahun-ke-tahun.

...yang disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan

Inflasi harga bahan pangan telah menurun pada beberapa kuartal terakhir, menjadi 11,1 persen tahun-ke-tahun pada bulan Mei, karena mulainya musim panen dan pelonggaran sejumlah pembatasan impor pada bulan Maret untuk bahan-bahan pokok, seperti bawang merah dan putih. Inflasi bahan pangan telah meningkat dengan tajam pada 3 bulan pertama tahun 2013, yang mencapai puncaknya pada 12,9 persen tahun-ke-tahun pada bulan Maret, dan mendorong peningkatan dalam inflasi IHK dan keranjang kemiskinan. Sementara peningkatan sebagian disebabkan oleh peningkatan harga bahan pangan yang terjadi sebelum musim panen raya, sedangkan peningkatan harga bahan pangan pokok terdorong oleh banjir besar pada bulan Januari dan perubahan kebijakan perdagangan seperti dibahas pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013. Pelonggaran sebagian kebijakan itu menyebabkan turunnya harga sejumlah bahan pokok, dengan harga bawang putih yang kini berada di bawah harga pada bulan Desember tahun lalu (Gambar 18). Harga bawang merah juga menurun, namun harga cabai belakangan ini mulai meningkat. Harga beras dalam negeri, salah satu bahan pokok lainnya, mencatat penurunan pada beberapa bulan terakhir, walau selisih antara harga dalam dan luar negeri tetap tinggi dan meningkat, karena panen besar juga terjadi pada negara-negara produsen utama dunia yang menurunkan harga beras internasional.

Gambar 17: Inflasi mencatat penurunan pada beberapa bulan terakhir...

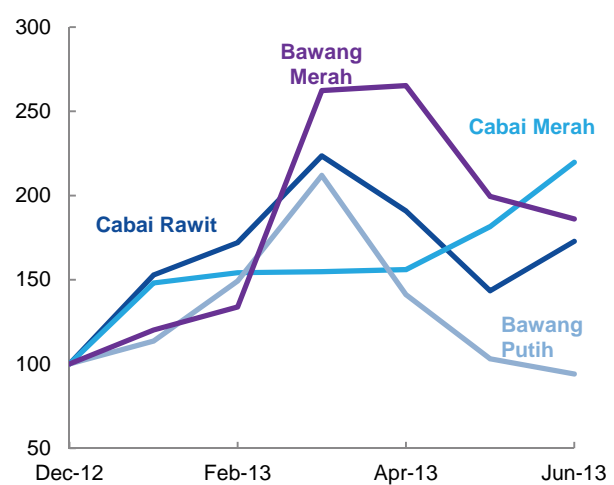
(inflasi, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 18: ...dengan turunnya harga sejumlah bahan pangan pokok

(indeks harga, Desember 2012=100)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Pergerakan harga seluruh ekonomi telah melambat, sejalan dengan pelemahan harga ekspor

Pertumbuhan harga pada ekonomi secara keseluruhan tetap lambat, dengan pertumbuhan deflator PDB mengalami penurunan yang signifikan dari nilai tertingginya sebesar 8,5 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga 2011, ke tingkat saat ini pada 2,5 persen. Sebagian dari penurunan ini mencerminkan perlambatan inflasi konsumen, termasuk pelemahan yang signifikan dalam harga-harga ekspor Indonesia dan sektor pertambangan dan penggalian. Harga-harga ekspor lebih rendah sebesar 1,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal Maret, sementara harga agregat produksi sektor pertambangan dan penggalian lebih rendah sebesar 1,4 persen. Penurunan harga ini bersamaan dengan penurunan yang signifikan dalam harga-harga komoditas utama Indonesia sejak akhir tahun 2011. Terdapat sejumlah tanda-tanda bahwa inflasi seluruh perekonomian dapat berbalik, dengan pertumbuhan berurutan deflator PDB mulai meningkat pada beberapa kuartal terakhir. Selain itu, dengan harga-harga konsumen yang merupakan porsi besar pada deflator PDB, inflasi deflator PDB juga dapat terpengaruh oleh penyesuaian harga BBM. Sejalan dengan itu, inflasi deflator PDB diproyeksikan akan meningkat menjadi 4,3 persen pada tahun 2013 dan 6,3 persen pada tahun 2014.

Outlook inflasi bergantung pada pergerakan kurs tukar dan ekspektasi inflasi...

Depresiasi pada kurs tukar yang berlanjut dan peningkatan inflasi yang disebabkan reformasi subsidi BBM serta peningkatan upah minimum, merupakan penyebab utama bagi prospek peningkatan inflasi. Sejauh ini, pengaruh dari peningkatan kurs tukar dolar AS/Rupiah terhadap harga-harga konsumen masih bersifat terbatas. Sebagian alasannya adalah ketika melakukan perhitungan bobot perdagangan, depresiasi valas ternyata hanyalah kecil (lihat Kotak 2 pada Triwulanan edisi bulan Desember 2012), dan sesungguhnya kurs tukar efektif telah mengalami apresiasi pada beberapa bulan terakhir, seperti dibahas pada Bagian 3. Namun bila Rupiah mengalami pelemahan lebih lanjut, maka akan terdapat sejumlah risiko kenaikan yang mendorong inflasi.

...yang meningkat dengan signifikan pada bulan Mei...

Ekspektasi konsumen akan inflasi jangka pendek telah meningkat pada beberapa bulan terakhir, sejalan dengan antisipasi reformasi subsidi BBM dan peningkatan harganya untuk jangka pendek. Indeks perkiraan harga 3-bulanan Bank Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan pada bulan Mei, dengan naik sebesar 14,5 basis poin yang mencerminkan peningkatan yang besar pada seluruh komponen harga, terutama Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Sebenarnya adalah biasa terjadi peningkatan yang besar dalam perkiraan harga jangka pendek dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, walaupun demikian peningkatan ini lebih besar dari biasanya, yang diakibatkan oleh peningkatan harga BBM bersubsidi. Selain itu, indeks perkiraan harga 6-bulanan meningkat sebesar 10,3 basis poin pada bulan Mei, setelah penurunan selama dua bulan sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan dalam perkiraan konsumen, pengecer juga memperkirakan tekanan inflasi di depan, dengan indeks perkiraan harga pengecer 3-bulanan dari Bank Indonesia meningkat sebesar 20 basis poin pada bulan April.

...dan membutuhkan pemantauan

Dengan adanya kenaikan harga BBM dan kenaikan yang signifikan dalam upah minimum, sangatlah penting untuk memantau ekspektasi inflasi dan perilaku penetapan harga selama tahun 2013. Diperkirakan tidak ada peningkatan perkiraan inflasi yang berkelanjutan dari reformasi subsidi BBM ini, karena kenaikan harga yang terjadi bersifat hanya satu kali saja. Selain itu, walau tidak ada indikasi yang pasti bahwa kenaikan upah minimum regional yang besar pada tahun 2013 yang akan secara signifikan mendorong harapan inflasi dan upah yang lebih besar, tekanan upah mungkin menjadi semakin terasa dan mempengaruhi harga-harga dengan berjalannya tahun 2013. Risiko kenaikan terhadap *outlook* inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya ini dimitigasi dengan adanya penurunan permintaan dalam negeri, yang akan membatasi pengaruh tahap kedua dari kenaikan harga BBM atau tekanan upah.

6. Defisit neraca berjalan berlanjut walau pertumbuhan impor telah melambat

Defisit neraca berjalan menyempit pada kuartal pertama 2013, namun neraca pembayaran secara keseluruhan kembali mencatat defisit

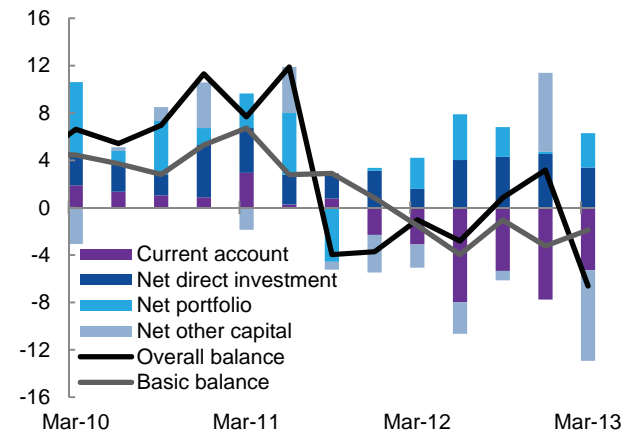
Defisit neraca berjalan Indonesia menyempit pada kuartal pertama menjadi 5,3 miliar dolar AS, atau 2,4 persen dari PDB, dari 3,6 persen dari PDB pada kuartal akhir 2012. Hal ini mencerminkan surplus perdagangan barang yang besar, dengan jumlah 1,6 miliar dolar AS. Namun hal ini bukan disebabkan oleh peningkatan ekspor, yang terus turun secara nominal dolar AS, tetapi karena lemahnya impor secara umum. Neraca keuangan dan modal mencatat defisit sebesar 1,4 miliar dolar AS, defisit yang pertama sejak kuartal ketiga tahun 2011, karena kuatnya aliran keluar

modal bersih 'investasi lainnya'. Neraca dasar, atau jumlah saldo neraca berjalan dan FDI bersih, turun dari 3,2 miliar dolar AS pada kuartal akhir 2012 namun tetap berada dalam keadaan defisit, pada -1,9 miliar dolar AS, (Gambar 19), yang menunjukkan bahwa Indonesia terus bergantung pada portofolio yang secara potensial lebih rentan gejolak dan aliran masuk modal investasi lainnya untuk membiayai defisit neraca berjalan.

Neraca perdagangan barang mencatat pemulihan pada kuartal pertama dengan pelemahan impor yang mengimbangi berlanjutnya pelambatan ekspor

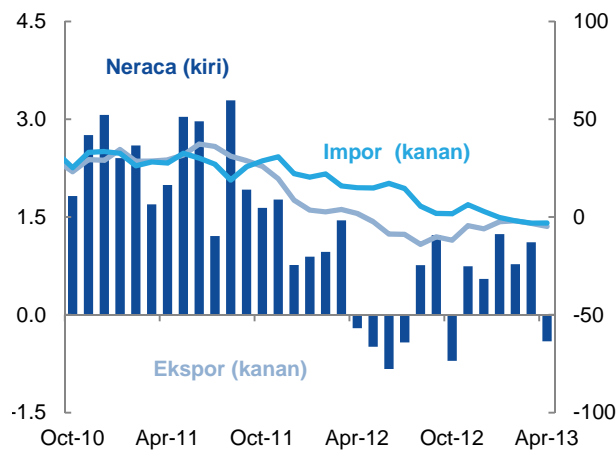
Jumlah impor mencatat kontraksi sebesar 1,6 persen tahun-ke-tahun pada kuartal pertama, sementara ekspor mencatat penurunan 6 persen tahun-ke-tahun. Namun data perdagangan barang pada bulan April menunjukkan bahwa neraca perdagangan barang non-migas kembali tergelincir ke keadaan defisit pada bulan April karena berlanjutnya pelemahan ekspor, sementara impor menguat (Gambar 20). Defisit perdagangan migas yang cukup besar telah menjadi ciri khas neraca luar negeri Indonesia sejak pertengahan tahun 2012 (Gambar 21), yang meningkat menjadi 3 miliar dolar AS pada kuartal pertama 2013 (dari 2,4 miliar dolar AS pada kuartal akhir 2012). Hal ini mencerminkan penurunan penerimaan migas, bersamaan dengan permintaan dalam negeri yang umumnya kuat untuk impor energi. Ekspor Indonesia terus dibebani dengan tidak adanya pemulihan harga global dari komoditas ekspor utamanya. Harga patokan batu bara, ekspor terbesar Indonesia berdasarkan penerimaan, telah melemah karena pelambatan pertumbuhan di Cina, yang merupakan pembeli terbesar batu bara Indonesia, dan juga kemungkinan penetapan larangan impor batu bara berkualitas rendah oleh Cina (Kotak 1).

Gambar 19: Neraca pembayaran kembali ke defisit pada kuartal pertama
(miliar dolar AS)



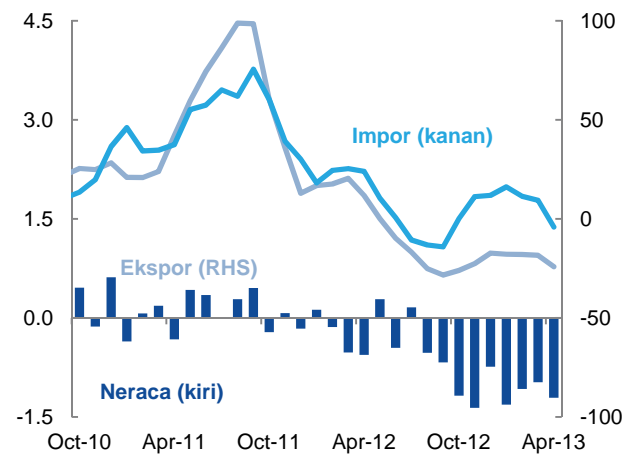
Catatan: Neraca dasar adalah jumlah neraca berjalan dan komponen investasi langsung dari neraca modal dan keuangan
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 20: Surplus perdagangan non-migas naik pada kuartal 1/2013, sebelum kembali ke defisit kecil pada April... (neraca perdagangan non-migas, miliar dolar AS, dan rata-rata bergerak 3-bulanan perubahan tahun-ke-tahun dalam ekspor dan impor non-migas, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 21: ...sementara defisit perdagangan migas yang besar telah tercatat sejak pertengahan tahun 2012 (neraca perdagangan migas, miliar USD, dan rata-rata bergerak 3-bulanan perubahan tahun-ke-tahun dalam ekspor dan impor migas, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Sementara penurunan nominal impor bersifat luas, impor barang-barang telah menurun dengan sangat tajam

Penurunan impor pada kuartal pertama disebabkan oleh penurunan impor barang konsumsi, barang setengah jadi dan modal secara keseluruhan (Gambar 22). Beban terbesar datang dari penurunan impor barang modal, yang merupakan sekitar 16 persen dari jumlah impor dan turun sebesar 19,2 persen (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan, April) sejalan dengan penurunan yang belakangan terjadi pada investasi dalam negeri. Impor barang konsumsi juga menurun pada kuartal itu menjadi 10,3 persen lebih rendah (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan, April). Impor barang-barang setengah jadi, yang merupakan sekitar 77 persen dari jumlah impor, juga melemah.

Penerimaan ekspor tetap berada di bawah tekanan...

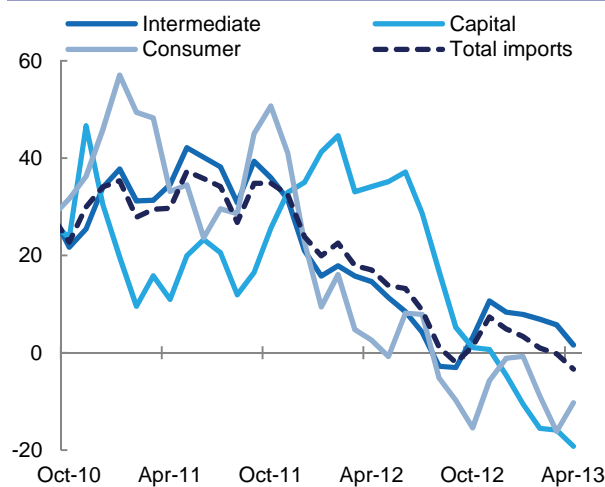
Penerimaan ekspor Indonesia terus melemah (Gambar 23), dibebani dengan tidak adanya pemulihan harga-harga dunia untuk sebagian besar ekspor komoditas utamanya. Nilai nominal dolar AS untuk ekspor migas turun sebesar 24,1 persen (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan, April), sementara ekspor pertambangan dan mineral turun 1 persen (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan, April). Di antara ekspor komoditas utama Indonesia, hanya gas alam (sekitar 10 persen dari jumlah ekspor) yang mencatat pemulihan yang kuat dalam harga-harga global, dengan harga acuan LNG Asia meningkat sekitar 11 persen selama tahun 2013 hingga bulan Mei. Pada bulan-bulan berikut, ekspor batu bara Indonesia mungkin menghadapi tantangan tambahan dengan penurunan permintaan dari Cina (Kotak 1).

...membuat kinerjanya berkurang karena pelemahan komoditas, sementara penerimaan ekspor barang manufaktur lebih bertahan namun mungkin menghadapi tantangan

Jumlah ekspor Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara pembandingnya yang setara di wilayah yang sama (Gambar 24), yang mencerminkan bobot komoditas yang lebih besar dalam susunan ekspor Indonesia (61 persen). Ekspor dari Malaysia, yang juga relatif bergantung kepada komoditas (komoditas merupakan 37 persen dari ekspor, yang hampir 23 persen adalah BBM) juga lebih rendah di wilayah yang sama, dengan mencatat kontraksi sebesar 5,9 persen tahun-ke-tahun dalam ekspor (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan, April). Dibanding dengan ekspor komoditas, ekspor manufaktur Indonesia bertahan dengan relatif baik pada beberapa bulan terakhir, dan pada bulan April cenderung datar dibanding lajunya pada tahun yang lalu (meningkat 0,2 persen, perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan). Namun data terakhir menunjukkan pelambatan jangka pendek dalam pertumbuhan ekspor lintas wilayah, yang mencerminkan resesi yang semakin mendalam lintas Eropa, dan juga pelambatan pertumbuhan di Cina; pertumbuhan ekspor manufaktur Thailand melambat ke 3,1 persen tahun-ke-tahun pada bulan April, dari 8,1 persen pada bulan Maret (perubahan tahun-ke-tahun dalam rata-rata bergerak 3-bulanan), sementara ekspor Cina melambat dengan tajam pada bulan Mei setelah adanya penyelidikan akan tuduhan tagihan ekspor yang terlalu besar untuk mendorong aliran masuk modal yang gelap, yang diperkirakan akan memperbesar data ekspor resmi pada bulan-bulan awal tahun 2013 (Gambar 25).

Gambar 22: Barang modal memimpin pelambatan impor yang luas...

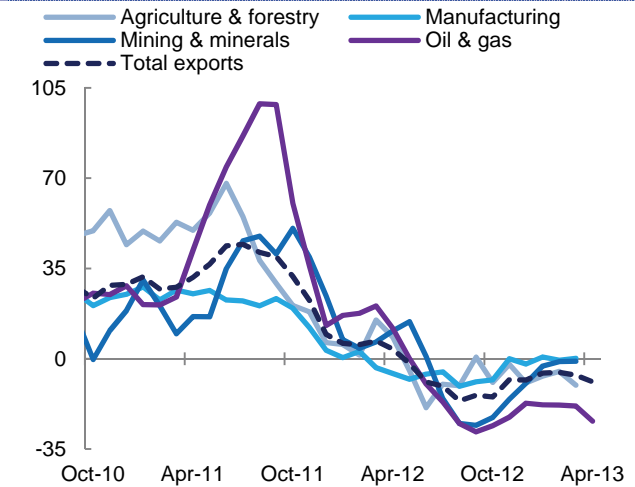
(rata-rata bergerak 3 bulanan, pertumbuhan nilai impor tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

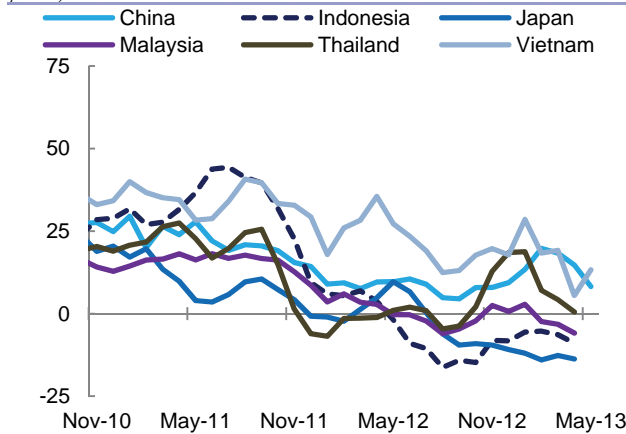
Gambar 23: ...sementara penerimaan ekspor Indonesia masih tertekan

(rata-rata bergerak 3 bulanan, pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun, persen)



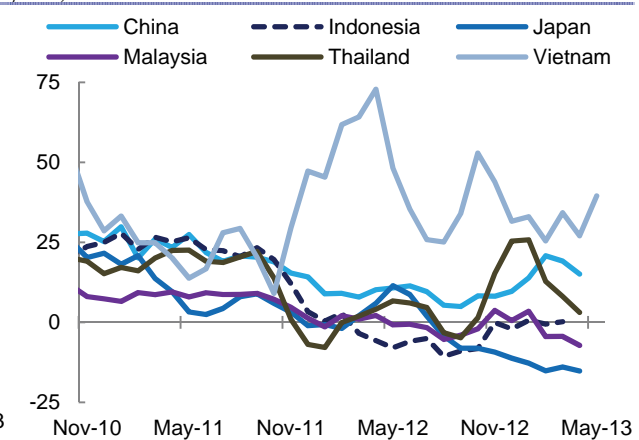
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 24: Ekspor Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangganya yang sebanding
(rata-rata bergerak 3 bulanan, pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 25: Ekspor manufaktur mendatar, di tengah tanda-tanda pelemahan pertumbuhan ekspor manufaktur di Asia
(rata-rata bergerak 3 bulanan, pertumbuhan nilai impor tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

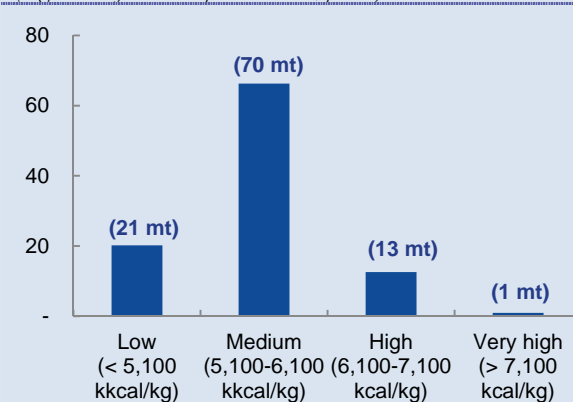
Kotak 1: Usulan pelarangan impor batu bara berkualitas rendah oleh Cina membawa risiko terhadap ekspor batu bara Indonesia

Badan Energi Nasional Cina telah mengusulkan pelarangan impor batu bara berkualitas rendah, yang bila ditetapkan, dapat membawa dampak yang mengganggu ekspor batu bara Indonesia. Menurut laporan pasar, larangan itu diperkirakan akan berlaku untuk batu bara dengan nilai kalori kurang dari 4.500 kkal per kilogram, dengan analisis pasar mengatakan bahwa sekitar 10 persen batu bara Indonesia akan terpengaruh.⁴

Batu bara merupakan 14 persen dari jumlah ekspor Indonesia, dengan batu bara berkualitas rendah (dengan nilai kalori kurang dari 5.100 kkal per kg) merupakan seperlima dari seluruh ekspor batu bara Indonesia, menurut data pemerintah tahun 2011 (Gambar 26). Cina mengimpor 90 juta ton batu bara termal dari Indonesia pada tahun 2012, yang setengahnya adalah batu bara dengan kualitas yang lebih rendah. Sementara itu produksi batu bara Indonesia diperkirakan akan mencapai 391 juta ton pada 2013, naik dari 384 juta ton pada 2012, menurut data Pemerintah.⁵

Bila pelarangan itu berlaku, para produsen batu bara Indonesia akan mencoba untuk mengalihkan produksi mereka ke pasar-pasar utama lainnya, terutama India. Pelarangan apapun akan impor batu bara rendah kalori akan menambah tekanan turun pada harga acuan batu bara, yang telah melemah karena keprihatinan akan perlambatan dalam laju kegiatan ekonomi dan permintaan energi di Cina, dan juga percepatan ekspor batu bara AS yang telah diganti oleh gas alam. Harga acuan batu bara Indonesia telah turun 6 persen sejak bulan Maret menjadi 85 dolar AS per ton.

Gambar 26: Batu bara berkualitas rendah merupakan 20 persen dari ekspor batu bara Indonesia dan dapat terpengaruh oleh pelarangan di Cina
(bagian dari jumlah ekspor batu bara, persen)



Catatan: Label grafik batang merujuk pada volume ekspor dalam juta ton (MT)

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; perhitungan staf Bank Dunia

⁴ Platts, 'Detil pelarangan impor Cina akan batu bara termal rendah', 22 Mei 2013.

⁵ <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-plans-coal-power-projects-as-Cina-import-curbs-loom/>

Pada kuartal pertama, neraca modal dan keuangan mencatat defisitnya yang pertama sejak kuartal ketiga 2011...

Beralih ke neraca modal dan keuangan, defisit neraca keuangan dan modal sebesar 1,4 miliar dolar AS pada kuartal pertama didorong oleh derasnya aliran keluar modal bersih 'investasi lain' sebesar 7,7 miliar dolar AS. Hal ini mencerminkan peningkatan penempatan dana di luar negeri yang mengikuti peningkatan cadangan devisa antar bank-bank dalam negeri sebagai akibat dari langkah BI untuk secara langsung memenuhi kebutuhan valuta asing BUMN energi pada kuartal pertama. BI menurunkan intervensinya sewaktu tekanan terhadap Rupiah menurun dari bulan Februari hingga akhir Mei, yang mengakibatkan penarikan dalam simpanan valas swasta pada beberapa bulan terakhir, walau intervensi diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa minggu ke depan karena semakin meningkatnya tekanan depresiasi Rupiah.

...dengan kuatnya aliran masuk modal portofolio dan pelambatan aliran masuk FDI

Derasnya aliran masuk modal portofolio sebesar 2,9 miliar dolar AS tercatat pada kuartal pertama, terutama mengalir ke dalam ekuitas. Aliran masuk portofolio bulanan tetap tinggi selama bulan April, yang didorong oleh kuatnya permintaan asing untuk obligasi pemerintah Indonesia, dengan aliran masuk modal bersih yang berjumlah 1,8 miliar dolar AS. Aliran masuk penanaman modal langsung melambat menjadi 3,4 miliar dolar AS (dari 4,5 miliar dolar AS pada kuartal akhir tahun 2012), sejalan dengan lebih lemahnya investasi dalam negeri.

Aliran keluar modal portofolio investasi asing yang besar tercatat pada beberapa minggu terakhir

Namun seperti disinggung di atas, koreksi yang belakangan terjadi di pasar keuangan Indonesia telah mencatat percepatan aliran keluar modal portofolio investasi asing sejak pertengahan bulan Mei. Secara bersama-sama aliran keluar modal investasi dalam ekuitas dan obligasi pemerintah telah berjumlah 3,6 miliar dolar AS sejak awal bulan Mei, dengan aliran modal asing yang masuk ke ekuitas Indonesia membalik seluruh jumlah aliran masuk bersih pada paruh pertama kuartal kedua menjadi datar pada kuartal itu, sementara jumlah aliran masuk bersih ke obligasi pemerintah selama kuartal tersebut tetap positif pada 0,4 miliar dolar AS, mengikuti aliran masuk modal yang sangat kuat pada bulan April.

Reformasi subsidi BBM diperkirakan akan memangkas peningkatan impor BBM

Bank Dunia memperkirakan bahwa peningkatan dalam harga BBM bersubsidi akan menurunkan pertumbuhan dalam jumlah impor BBM, mempersempit defisit neraca berjalan sebesar 0,1 hingga 0,2 poin persentase dari PDB, dibanding bila tidak ada reformasi BBM. Walau lebih sulit untuk dikuantisir, penurunan subsidi BBM juga akan diterima secara positif oleh investor asing langsung dan portofolio di Indonesia, sehingga mendukung aliran masuk modal untuk jangka yang lebih panjang. Namun peningkatan inflasi sementara yang disebabkan oleh reformasi tersebut dapat menambah tekanan depresiasi terhadap Rupiah untuk jangka pendek.

Defisit neraca berjalan Indonesia diperkirakan akan berada pada tingkat yang sama dengan tahun 2012

Melihat ke depan, Bank Dunia memproyeksikan defisit neraca berjalan akan mencapai jumlah 25,2 miliar dolar AS pada tahun 2013, atau 2,7 persen dari PDB. Hal ini menunjukkan perkiraan defisit neraca berjalan 2013 yang secara umum sejalan dengan tahun 2012 secara bagian dari PDB, sebesar 2,7 persen dari PDB. Proyeksi ini mencerminkan gabungan dari semakin meningkatnya ekspor dan penurunan pertumbuhan impor, termasuk yang disebabkan oleh reformasi subsidi BBM. Neraca berjalan diproyeksikan akan menyempit menjadi 2,1 persen dari PDB pada tahun 2014 dengan semakin pulihnya ekspor. Keseluruhan neraca pembayaran diperkirakan akan mencatat defisit sebesar 4,8 miliar dolar AS pada tahun 2013, melihat dari hasil realisasi kuartal pertama, antisipasi defisit neraca berjalan setahun penuh, dan penurunan aliran masuk modal ke pasar-pasar berkembang (*emerging market*) yang belakangan terjadi, termasuk ke Indonesia. Seperti disinggung pada Triwulanan edisi bulan Maret 2013, pelemahan dalam dinamika neraca pembayaran Indonesia dan tekanan depresiasi Rupiah yang berlanjut telah terjadi dengan latar belakang peningkatan pembiayaan luar negeri bruto pada beberapa tahun terakhir, yang terutama di dorong oleh peningkatan hutang luar negeri swasta bruto (lihat Kotak 2). Kemampuan Indonesia untuk menjaga kuatnya aliran masuk FDI, menarik investasi modal portofolio yang berpotensi volatil, dan mengelola penyesuaian yang dibutuhkan untuk menjamin neraca dari posisi luar negerinya akan tetap menjadi fokus.

Kotak 2: Tingkat hutang eksternal tetap rendah namun risiko likuiditas telah meningkat

Tingkat hutang luar negeri Indonesia telah meningkat sejak tahun 2006, hampir mencapai dua kali lipat dari 133 miliar menjadi 257 miliar dolar AS pada bulan April 2013. Sejalan dengan peningkatan gejolak pasar yang tercatat selama periode itu dan sejak krisis keuangan dunia tahun 2008-9, termasuk pada kuartal terakhir bagi pasar-pasar berkembang, peningkatan hutang luar negeri secara absolut ini membutuhkan penelitian yang lebih cermat untuk mengukur kerentanan Indonesia terhadap kejutan yang berasal dari luar negeri. Pada awalnya, perlu dicatat bahwa keberlanjutan posisi hutang luar negeri Indonesia adalah tanpa keraguan, menurun, sesuai dengan laporan terakhir IMF (tahun 2012) Pasal IV, sebagai contoh, yang menemukan bahwa "...rasio hutang luar negeri Indonesia diperkirakan akan terus menurun, dan tetap berada pada tingkat yang dapat dikelola, menurut semua skenario kejutan yang standar."

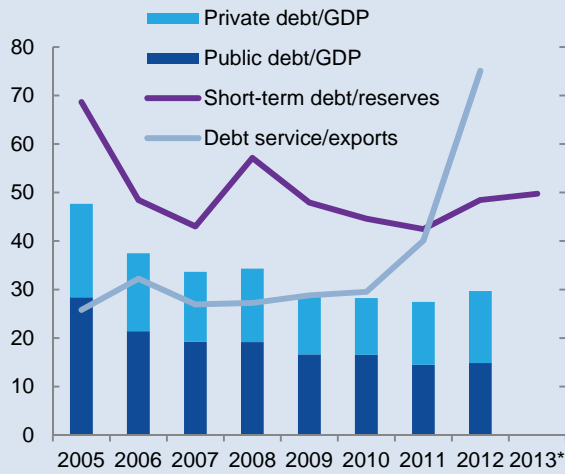
Sementara jumlah hutang luar negeri (yang dimiliki oleh pihak asing) telah meningkat secara absolut, jumlahnya sebagai bagian dari PDB mencatat tren yang menurun, dari 47,7 persen dari PDB pada tahun 2005 menjadi 29,7 persen dari PDB pada akhir tahun 2012 (Gambar 27). Penurunan tingkat hutang luar negeri ini didorong oleh penurunan tajam dalam hutang luar negeri pemerintah, yang turun dari 28,4 persen menjadi 14,8 persen dari PDB. Sebaliknya, rasio hutang luar negeri sektor swasta telah menurun menjadi 12 persen pada tahun 2010 namun meningkat kembali menjadi 15 persen pada akhir 2012. Hutang swasta kini sebesar 50,2 persen dari jumlah hutang luar negeri per akhir April, meningkat dari 40,3 persen pada tahun 2005.

Berlanjutnya peningkatan hutang swasta dari luar negeri pada beberapa tahun terakhir telah dipimpin oleh perusahaan-perusahaan dari beberapa sektor, terutama yang bergerak dalam bidang pengeboran, listrik, gas dan air, dan keuangan, *leasing* dan jasa bisnis. Pinjaman dari sektor keuangan, yang didorong oleh *joint venture* dan bank-bank asing, merupakan sebagian besar dari peningkatan hutang tersebut. Hutang luar negeri sektor keuangan meningkat hampir tiga kali lipat, dari 12,9 miliar dolar AS pada tahun 2006 menjadi 35,2 miliar dolar AS pada akhir bulan April 2013, atau 27,3 persen dari jumlah hutang luar negeri (Gambar 28), melampaui hutang sektor manufaktur (yang turun menjadi 20,3 persen dari 32,4 persen dari bagian keseluruhan). Perusahaan-perusahaan dalam pertambangan dan pengeboran merupakan sumber kegiatan paling aktif berikutnya dalam pinjaman luar negeri, dengan peningkatan jumlah hutang empat kali lipat selama periode tahun 2006-2012 dan merupakan 16,8 persen dari jumlah hutang swasta dari luar negeri per akhir bulan April 2013 (Gambar 28). Akhirnya, hutang luar negeri perusahaan-perusahaan pada sektor utilitas telah meningkat dari 6,5 miliar menjadi 16,3 miliar dolar AS.

Metriks standar menunjukkan peningkatan risiko likuiditas yang berkaitan dengan posisi hutang eksternal Indonesia. Hutang luar negeri jangka pendek (per jatuh tempo yang tersisa) telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2006 dan kini menjadi 21,7 persen dari jumlah hutang, naik dari 15,6 persen pada tahun 2006, yang umumnya disebabkan oleh peningkatan hutang luar negeri dari sektor swasta, yang kini sebesar 72,6 persen dari jumlah hutang luar negeri jangka pendek, naik dari 59,4 persen pada tahun 2006. Rasio hutang swasta luar negeri terhadap ekspor telah terus meningkat dari 9,9 persen menjadi 17,8 persen selama periode tersebut, walau rasio ini juga terpengaruh oleh penurunan ekspor sejak tahun 2011. Hingga bulan April 2013, jumlah hutang luar negeri jangka pendek setara dengan setengah dari jumlah cadangan devisa Indonesia (Gambar 27). Persyaratan pembiayaan jasa hutang luar negeri Indonesia juga telah meningkat, naik sebagai bagian dari ekspor dari seperempat pada tahun 2007 menjadi lebih dari tiga per empat pada tahun 2012 (Gambar 27) Juga terdapat peningkatan kebergantungan terhadap hutang dalam dolar AS, yang kini merupakan 88 persen dari jumlah hutang swasta dari luar negeri, dibanding hutang dalam yen Jepang. Karenanya, sementara sebagian perusahaan menerima lindung nilai alami yang melekat pada dolar AS, seperti pada sektor pertambangan dan pengeboran, tingginya konsentrasi hutang luar negeri dalam dolar AS dapat meningkatkan kerentanan yang lebih besar bila kurs tukar dolar AS mencatat apresiasi yang tajam.

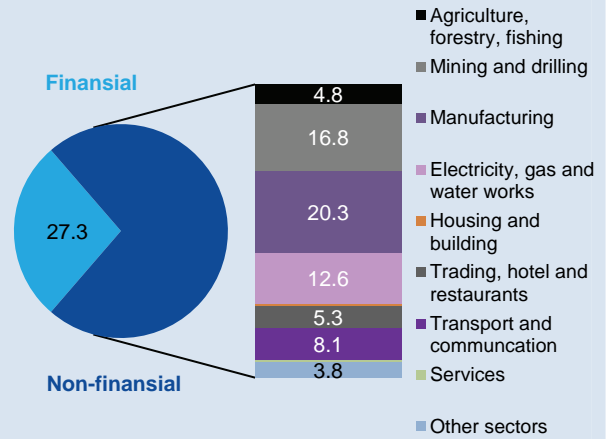
Sejumlah faktor-faktor memitigasi risiko-risiko yang dapat dihadapi Indonesia dari peningkatan penggunaan hutang luar negeri oleh perbankan dan perusahaan. Pertama, pada sektor non-keuangan, sebagian besar pinjaman berasal dari perusahaan induk atau pemberi pinjaman terafiliasi dan hutang antar perusahaan demikian dapat memiliki kerentanan yang lebih rendah terhadap risiko tidak diperpanjangnya hutang, dan merupakan satu komponen dari kuatnya peningkatan aliran FDI ke Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Sesungguhnya data statistik resmi nampaknya mungkin merendahkan jumlah bagian hutang antar perusahaan dari jumlah keseluruhan hutang luar negeri, karena hubungan antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri tidaklah selalu transparan. Selain itu, sejak tahun 2011, menurut Bank Indonesia, ketaatan akan persyaratan pelaporan hutang luar negeri juga telah meningkat, memperjelas hutang swasta dari luar negeri di data statistik resmi dan mempersulit untuk menafsirkan peningkatan tren dalam persediaan utang dan biaya jasa. Dengan berjalannya waktu, peningkatan yang berlangsung dalam cakupan statistika akan mendorong peningkatan pemantauan dinamika hutang swasta Indonesia dari luar negeri, termasuk pada tingkat yang lebih mikro; 100 perusahaan teratas dalam peringkat hutang luar negeri merupakan 65 persen dari tingkat paparan hutang secara keseluruhan.

Gambar 27: Metriks solvabilitas hutang telah meningkat, namun demikian juga sejumlah indikator risiko likuiditas (persen)



Catatan: *data 2013 per April 2013 dan hanya untuk hutang/cadangan jangka pendek
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 28: Hutang swasta dari luar negeri mencatat distribusi yang merata pada seluruh sektor ekonomi (hutang swasta luar negeri hingga April 2013, persen dari keseluruhan)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

7. Risiko terhadap outlook tetap tinggi dari dalam dan luar negeri

Prospek pertumbuhan menghadapi risiko...	Perkiraan dasar (<i>base case</i>) Bank Dunia bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pelambatan yang hanya kecil pada tahun 2013, dari 6,2 persen pada 2012 menjadi 5,9 persen pada 2013, sebelum kembali meningkat pada tahun 2014. Risiko utama dari prospek ini adalah terjadinya penurunan, dengan berlanjutnya pelemahan yang kecil dalam momentum pertumbuhan dalam negeri dan Indonesia mengalami penurunan yang lebih besar.
...dengan reformasi BBM bersubsidi membawa tantangan bagi pengelolaan ekonomi makro jangka pendek...	Peningkatan harga BBM bersubsidi, sementara dibutuhkan secara fiskal dan merupakan perkembangan yang positif dalam memenuhi sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia, membawa tantangan kepada pengelolaan ekonomi makro jangka pendek. Peningkatan harga BBM pada awalnya akan mendorong peningkatan harga satu kali saja. Tekanan harga yang mendasari diperkirakan akan tetap terjaga, namun mungkin dibutuhkan pengetatan moneter yang lebih erat bila peningkatan inflasi sementara menunjukkan tanda-tanda perkiraan inflasi yang lebih tinggi, dan jika Rupiah tetap berada di bawah tekanan, sehingga memperlambat laju pertumbuhan. Daya tahan konsumsi masyarakat, sumber tunggal terbesar di dalam ekonomi, akan diuji pada sisa tahun 2013 dengan peningkatan inflasi sementara tersebut.
...sementara pertumbuhan investasi terus melambat	Melemahnya pertumbuhan investasi, yang dimulai pada pertengahan tahun 2012, tampaknya mencerminkan dampak tunda dari pelemahan harga komoditas sejak pertengahan tahun 2011. Kondisi sektor komoditas mempengaruhi investasi secara langsung, seperti terlihat dari penurunan tajam dalam investasi asing dalam bidang transportasi, permesinan dan peralatan, yang merupakan masukan utama dalam kegiatan yang berkaitan dengan komoditas. Kekokohan permintaan komoditas secara tidak langsung juga mendorong permintaan investasi dengan mempengaruhi pendapatan ekspor, konsumsi rumah tangga (melalui penerimaan rumah tangga, terutama pada daerah-daerah yang mana produksi komoditas merupakan hal yang penting), dan juga mempengaruhi ketersediaan pendanaan investasi (melalui keuntungan perusahaan). Dengan rumitnya persyaratan perdagangan dan pengaruh penerimaan tersebut, kecenderungan membengkaknya kebanyakan proyek-proyek investasi, dan ketidakpastian yang mengelilingi harga-harga komoditas internasional, lintasan yang akan dilalui oleh investasi sulit untuk diperkirakan dan merupakan sumber ketidakpastian dalam proyeksi pertumbuhan. Selain itu, jika penurunan harga komoditas internasional terus berlanjut, investasi dapat membawa beban yang lebih besar dari perkiraan terhadap pertumbuhan.
Terdapat ketidakpastian baru yang berkaitan dengan permintaan luar negeri...	Seperti dibahas pada laporan Bank Dunia tentang Prospek Ekonomi Dunia pada bulan Juni, risiko yang mengikuti penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi dunia, seperti yang timbul dari pembaruan tekanan pasar keuangan pada zona Euro, telah melemah sejak Triwulanan edisi bulan Maret 2013. Namun momentum pelambatan pada sejumlah ekonomi berpenghasilan menengah dan penurunan tajam yang tercatat pada pasar-pasar berkembang (<i>emerging market</i>) pada beberapa bulan terakhir menambah kepada ketidakpastian tentang jalur lintasan ekonomi dunia. Penurunan lanjutan dalam harga komoditas dunia membawa risiko penurunan yang khusus dan signifikan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

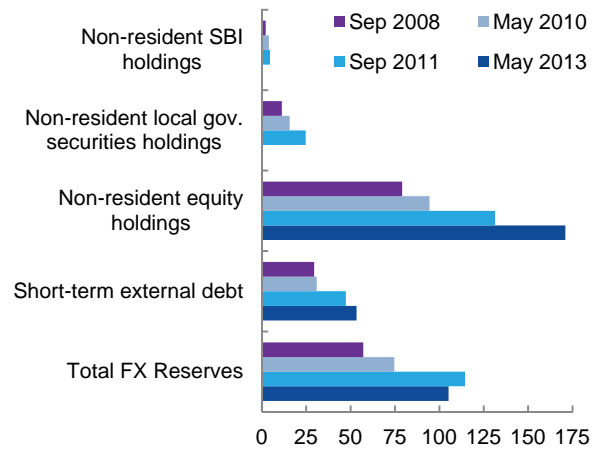
...dengan pasar keuangan Indonesia yang menghadapi tantangan dari pelemahan dunia akan permintaan bagi aset pasar berkembang...

Tantangan kondisi pendanaan luar negeri telah meningkat. Pasar ekuitas dan obligasi Indonesia tetap relatif rentan terhadap berlanjutnya penjualan aset-aset pasar berkembang dibanding negara tetangga pembandingnya, dengan besarnya keberadaan investasi asing dibanding ukuran pasar ekuitas dan obligasi dalam negeri, walau cadangan devisa Indonesia masih cukup besar (Gambar 29). Sementara pengaruh kesejahteraan langsung dari penurunan harga ekuitas dan aset-aset lainnya terhadap keputusan konsumsi dan investasi rumah tangga dan perusahaan tampaknya hanya akan kecil dengan rendahnya paparan langsungnya terhadap aset-aset tersebut secara agregat, terutama dengan dampak pengimbang dari kuatnya pertumbuhan harga properti (suatu sektor yang memiliki paparan yang lebih tidak langsung terhadap kondisi luar negeri), tingkat keyakinan masyarakat dan usaha dapat terpengaruh, dengan dampak yang mengalir ke konsumsi dan investasi. Keyakinan investor lokal, dan alokasi aset-aset lintas batasnya, juga tetap menjadi kunci bagi prospek ini.

...dan menyoroti kebutuhan untuk membuat penyesuaian kebijakan ekonomi makro yang berkelanjutan

Peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi dan prospek dasar (*base case*) bagi kuartal-kuartal berikut menunjukkan bahwa penetapan kebijakan Indonesia tampaknya harus agak disesuaikan terhadap kondisi ekonomi yang lebih rendah, dan potensi kondisi pembiayaan luar negeri yang lebih sulit. Keputusan Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat suku bunga BI dan suku bunga *overnight* pada awal bulan Juni, dan peningkatan harga BBM bersubsidi, merupakan contoh-contoh kebijakan penyesuaian terhadap perubahan keadaan, yang dapat membantu mengamankan stabilitas makro, untuk mendukung pertumbuhan ke depan. Penyesuaian lanjutan terhadap kurs tukar Rupiah secara bertahap, sesuai dengan perkembangan pada kondisi eksternal Indonesia, juga diperlukan. Menjaga pendekatan yang fleksibel, tanpa kejutan dan dikomunikasikan dengan baik pada penyusunan kebijakan, dan juga melanjutkan kemajuan dalam penerapan kebijakan dan peningkatan lingkungan peraturan, akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjalani masa yang penuh dengan tantangan ekonomi dari dalam maupun luar negeri.

Gambar 29: Cadangan devisa Indonesia cukup besar demikian juga paparan risiko luar negerinya
(neraca, miliar dolar AS)



Catatan: Data hutang luar negeri hingga April 2013, semua angka lain hingga akhir bulan Mei
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Walau masih terlalu dini untuk mengkuantisir biayanya, asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut di Sumatra adalah tambahan tantangan jangka pendek

Kebakaran hutan dan gambut yang kini terjadi di Sumatra, yang menyebabkan asap tebal di Sumatra dan Kalimantan (dan juga negara-negara tetangga), menambah risiko penurunan prospek ekonomi. Tampaknya akan timbul biaya ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang signifikan terhadap Indonesia yang berasal dari gangguan usaha, kehilangan produktivitas, pengiriman tenaga untuk menangani kebakaran (termasuk satuan khusus yang ditugaskan), dampak limpahan (*spillover*) ekonomi tambahan dari negara tetangga dan mitra perdagangan yang terpengaruh, gangguan kesehatan dan degradasi aset hutan dan tanah. Jumlah biaya dan risiko terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan belum diketahui, namun diperkirakan berada pada kisaran miliaran dolar. Peristiwa timbulnya asap pada tahun 1997/98 diperkirakan telah menimbulkan kerugian sebesar 9 miliar dolar AS bagi Asia Tenggara (Applegate, 2006) dan 6,3 miliar dolar AS hanya untuk Indonesia (menurut Bank Pembangunan Asia). Saat ini, dengan adanya industri pertanian dan pariwisata yang lebih maju dan lebih padatnya populasi penduduk di daerah-daerah itu, kerugian ekonomi dapat berjumlah lebih besar.

Dari sisi lingkungan hidup, kebakaran itu berpotensi menghapus sebagian besar kemajuan yang baru-baru ini dicapai dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Selain itu, kebakaran dan asap tersebut menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangga yang penting, mengganggu penyusunan kebijakan dan menimbulkan publisitas internasional yang negatif. Kenyataan bahwa hal ini merupakan kejadian musiman yang menimbulkan biaya yang besar menyoroti tantangan pemerintahan yang signifikan dalam sektor sumber daya alam. Walau penggunaan api telah dilarang (pada tahun 2001, Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah [PP No 4/2001] yang melarang semua penggunaan api ke hutan dan tanah), api masih dengan sengaja digunakan untuk membersihkan hutan, terutama pada daerah-daerah konsensi perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri. Penegakkan UU yang ada dan praktik penggunaan tanah yang lebih baik membutuhkan usaha bersama dari masyarakat dan sektor swasta, termasuk perusahaan perkebunan, yang kebanyakan berasal dari Malaysia dan Singapura.

B. Beberapa Perkembangan Terkini Perekonomian Indonesia



1. Mencermati paket kompensasi subsidi BBM

Untuk menghindari dampak negatif dari peningkatan harga BBM terhadap rakyat miskin, Pemerintah akan berinvestasi pada paket kompensasi dengan jangkauan yang luas...

Pengurangan subsidi BBM diperkirakan akan meningkatkan inflasi, terutama yang didorong oleh peningkatan pada harga-harga BBM, bahan pangan dan biaya transportasi di seluruh Indonesia, seperti dibahas pada sub-bagian 0 pada Bagian A. Karena biaya transportasi dan bahan pangan merupakan bagian yang besar dari pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, peningkatan apapun pada biaya-biaya tersebut hampir pasti akan membawa dampak yang negatif. Proyeksi Bank Dunia memperkirakan bahwa, tanpa kompensasi, peningkatan harga BBM (menjadi Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar) akan memperlambat penurunan tingkat kemiskinan; tanpa kompensasi, tingkat kemiskinan resmi akan turun dari 12 persen pada bulan Maret 2012 menjadi 10,5 persen pada bulan Maret 2014, menunjukkan laju pengentasan kemiskinan yang lebih lambat dibanding pencapaian pada beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, dengan kebijakan kompensasi jangka pendek berupa bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dan rentan selama empat bulan, proyeksi menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan akan lebih signifikan, menjadi 9,4 persen pada bulan Maret 2014. Paket kompensasi yang disertakan di dalam APBN-P diharapkan akan memainkan peran yang penting dalam membantu Indonesia untuk melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan walau dengan harga BBM bersubsidi yang lebih tinggi, dan juga menjadi langkah perluasan yang signifikan dari perlindungan sosial untuk jangka waktu yang lebih panjang. Bagian ini akan meninjau masing-masing komponen dari keseluruhan paket kompensasi Pemerintah, dan menilai sejauh mana program-program tersebut diharapkan akan memberikan bantuan yang memadai, tepat waktu dan efektif untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan yang paling tidak mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kenaikan harga BBM.⁶

⁶ Bagian ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap program-program bantuan sosial Indonesia. Seluruh laporan penelitian tersedia pada tautan www.worldbank.org/id/poverty. (Lihat Bank Dunia, 2012. *Protecting Poor and Vulnerable Households*)

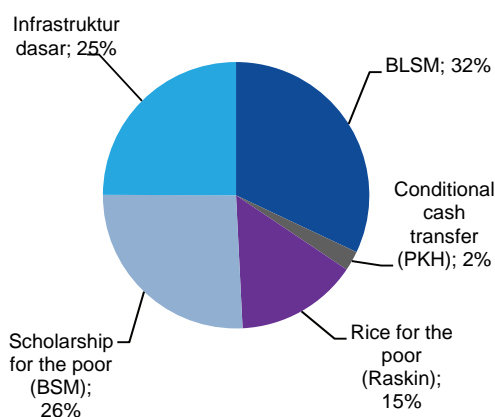
...untuk membantu rumah tangga pada jangka pendek dan memperluas sistem perlindungan sosial pada jangka panjang

Untuk menghindari dampak negatif dari peningkatan harga BBM terhadap rumah tangga miskin dan rentan, dibutuhkan dua jenis respon. Pertama, dibutuhkan upaya perlindungan sementara dengan jangka waktu yang pendek untuk melindungi rumah tangga dari dampak inflasi yang langsung muncul dari peningkatan harga BBM. Kedua, respon jangka panjang dapat membantu dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang sedang berlangsung – terutama dengan menargetkan rumah tangga yang paling miskin – dan menangani kesenjangan yang meningkat.

Sebagai cerminan dari kedua jenis respon tersebut, Pemerintah Indonesia menyiapkan paket kompensasi di dalam APBN-P 2013 yang belum lama ini disetujui oleh DPR. Paket yang berjumlah Rp 29,05 triliun atau sekitar 74 persen dari jumlah penghematan subsidi BBM tersebut memiliki dua komponen utama, yaitu: a) Program Kompensasi Khusus, dan b) Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S).

Gambar 30: Penghematan dapat mendukung sejumlah program

(bagian penghematan yang dialokasikan ke program, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 7: Kompensasi menjangkau 15,5 juta rumah tangga
(alokasi anggaran per program, Rupiah)

Komponen	Nilai (triliun Rp)
BLSM (@ Rp 150,000, untuk 4 bulan, bagi 15,5 juta rumah tangga)	9,3
PKH	0,7
Raskin	4,3
BSM	7,5
Infrastruktur dasar	7,25
Jumlah paket kompensasi	29,05

Sumber: Kementerian Keuangan

a. Program-program jangka pendek untuk melindungi rumah tangga yang miskin dan rentan

Program-program jangka pendek untuk meredam dampak langsung terhadap rumah tangga miskin telah memicu kontroversi...

Program Kompensasi Khusus mencakup beberapa upaya sementara Pemerintah untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari guncangan inflasi yang berasal dari peningkatan harga BBM, yaitu:

- Pertama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sejumlah Rp 150.000/rumah tangga/bulan selama empat bulan akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dalam dua kali pembayaran.
- Kedua, selain 15 kg jatah beras untuk setiap rumah tangga miskin perbulan yang dilakukan melalui program Beras Miskin (Raskin), Pemerintah memberikan tambahan 45 kg beras bersubsidi kepada rumah tangga yang menerima BLSM. Pembagiannya dalam karung berukuran 15 kg sekali setiap bulan selama tiga bulan.
- Ketiga, sejumlah penghematan akan dialokasikan kepada tiga program infrastruktur jangka pendek, yaitu: Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Percepatan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) dan Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).

Sebagian besar kontroversi yang melingkupi rancangan upaya kompensasi tersebut terpusat pada usulan penggunaan BLSM sebagai alat untuk melindungi rumah tangga miskin dan

rentan dari dampak kenaikan harga BBM. Para penentang menganggap bahwa bantuan langsung tunai tersebut dapat dengan mudah dipolitisasi dan digunakan sebagai alat bagi partai-partai politik untuk mengumpulkan dukungan bagi pemilihan umum tahun 2014. Selain itu, terdapat banyak kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan bantuan langsung tunai untuk melindungi rakyat miskin. Para penentang menganggap program tersebut tidaklah efektif; cenderung akan menimbulkan pemborosan, tidak sampai kepada mereka yang memang membutuhkan perlindungan, mendorong kemalasan pada orang miskin atau menciptakan kebergantungan yang lebih besar terhadap negara.

...namun penelitian menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai merupakan cara yang efektif untuk memberikan perlindungan yang cepat

Penelitian mengenai pemberian bantuan langsung tunai di Indonesia dapat memberikan penjelasan terhadap debat terkait efektivitas program BLSM.⁷ Setelah peningkatan harga BBM pada tahun 2005, Pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang memberikan dana kompensasi tunai dengan jumlah keseluruhan Rp 1.200.000 ke 19 juta rumah tangga penerima, terbagi dalam empat kali pembayaran. Program itu dijalankan kembali pada tahun 2008 ketika harga BBM kembali dinaikkan, dan 18,4 juta rumah tangga menerima kompensasi sejumlah Rp 900.000 yang terbagi dalam tiga kali pembayaran. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terkait implementasi dan efektivitas bantuan langsung tunai di Indonesia tersebut, ditemukan bahwa:

- *BLT efektif untuk mencegah rumah tangga miskin dari pengaruh negatif.* Dana bantuan yang setara dengan sekitar 15 persen jumlah pengeluaran bulanan tersebut, cukup memadai untuk mencegah rumah tangga yang ditargetkan dari keterperosokan yang lebih dalam. Selain itu, terdapat pengaruh sampingan yaitu: program BLT turut menstimulasi peningkatan belanja antar rumah tangga yang tidak menerima bantuan. Karenanya, Bank Dunia memperkirakan bahwa tanpa BLT tahun 2008-09, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 15,8 persen pada bulan Maret 2009 dari 15,4 persen pada bulan Maret 2008, dan bukan menurun menjadi 14,2 persen, seperti yang terjadi dengan adanya program BLT.
- *Tidak terdapat bukti bahwa rumah tangga penerima menghabiskan dana BLT secara keliru.* BLT digunakan untuk membeli barang-barang pokok (terutama beras), biaya satu kali seperti uang sekolah, pakaian yang dipakai untuk menyambut liburan Lebaran, atau biaya transportasi. Belanja untuk rokok dan minuman keras tidak meningkat pada rumah tangga penerima BLT dibanding dengan rumah tangga miskin yang tidak menerima bantuan tersebut.
- *Juga tidak terdapat bukti bahwa BLT mendorong kemalasan atau kebergantungan.* Para kepala rumah tangga yang menerima BLT tidak memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk keluar dari pekerjaannya. Hal ini terutama disebabkan karena ukuran bantuan yang tidak cukup besar, atau cukup lama, untuk mendorong tindakan berhenti dari pekerjaan. Faktanya, rumah tangga penerima BLT memiliki kecenderungan yang lebih besar (sebesar 10 persen untuk menemukan pekerjaan baru dan pindah ke tempat kerja baru. Hal ini mungkin terjadi karena dana BLT digunakan untuk membayar ongkos transportasi untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, namun dengan jarak yang lebih jauh, atau untuk membayar jasa tempat penitipan anak.
- *Dana BLT diterima oleh hampir seluruh penerima sesuai daftar penerima bantuan, tetapi petugas setempat semakin banyak melakukan "pungutan liar" dari para penerima.* Bantuan dikirimkan langsung dari Kementerian Keuangan kepada rumah tangga penerima bantuan melalui kantor pos untuk mencegah kesalahan pengiriman. Namun terdapat laporan bahwa setelah bantuan langsung tunai diterima, sejumlah petugas kantor pos dan petugas daerah setempat meminta "ongkos". Tingkat kejadian adalah 10 persen pada tahun 2005, dan 46-54 persen pada tahun 2008-09. Hal ini umumnya dilakukan untuk mendistribusikan ulang bantuan kepada rumah tangga yang tidak termasuk di dalam daftar (karena kesalahan penargetan atau alasan lainnya), memberikan subsidi untuk transportasi kolektif, dan biaya pembuatan kartu identitas (KTP).
- *Tidak terdapat bukti apakah BLT mengikis kebersamaan sosial atau tidak.* Sejumlah kritik

⁷ World Bank. 2012. *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

program BLT di Indonesia mengatakan bahwa bantuan tersebut mengikis semangat kebersamaan sosial seperti yang umum terlihat pada kegiatan gotong royong. Sejauh ini tidak ada penelitian yang membuktikan dengan jelas dampak positif maupun negatif dari BLT.

Temuan-temuan itu menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai bersifat efektif dalam memberikan bantuan sementara untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan harga jangka pendek. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan lebih langsung dan sederhana dari program-program bantuan lain yang ada di Indonesia, walaupun langkah pelaksanaan tetap menjadi isu yang penting agar bantuan dapat sepenuhnya efektif.

Namun luputnya sejumlah rakyat miskin dari daftar penerima bantuan menunjukkan kebutuhan akan metode penargetan yang lebih baik

Namun demikian, BLT masih melewatkan banyak rumah tangga miskin dan rentan yang tidak disertakan ke dalam daftar penerima bantuan. Dengan cakupan sebanyak 18,5 juta rumah tangga, BLT ditargetkan bagi 30 persen rumah tangga paling miskin. Dari jumlah tersebut, seperti tercantum dalam laporan terbaru Bank Dunia, sekitar setengah tidak disertakan ke dalam daftar penerima bantuan, dan setengah dari seluruh bantuan diterima oleh rumah tangga yang tidak termasuk dalam 30 persen rumah tangga termiskin. Namun bila metode penargetan tersebut dibandingkan dengan metode penargetan bagi program-program bantuan sosial utama lainnya di Indonesia, BLT mencatat prestasi terbaik. Agar efektif sebagai alat bantuan sosial, metode penargetan program harus menjamin bahwa bantuan diterima oleh rumah tangga yang miskin dan rentan.

Namun, bantuan dalam bentuk barang terbukti kurang terpercaya

Bantuan dalam bentuk barang, seperti beras bersubsidi melalui Raskin, adalah mekanisme lain yang secara cepat dapat memberikan perlindungan kepada rumah tangga yang rentan. Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa program tersebut menghadapi banyak tantangan pelaksanaan.⁸ Pada tahun 2010, rumah tangga penerima melaporkan bahwa mereka membeli rata-rata 3,8 kg beras perbulan, jauh lebih kecil dari alokasi 13-16 kg beras bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan (berdasarkan pengumuman Pemerintah). Sementara, sejumlah beras didistribusikan ulang lintas masyarakat, hingga sebanyak 30 persen alokasi Raskin (menurut perkiraan antara bulan November 2003 dan Januari 2004) lenyap antara titik-titik distribusi dan rumah tangga pembeli Raskin; pada sejumlah daerah tingkat kehilangan ini mencapai hingga 75 persen. Selain itu, harga Raskin bagi rumah tangga biasanya lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Antara bulan November 2006 dan Januari 2007, rumah tangga penerima melaporkan bahwa mereka membayar Rp 1.689 per kilogram untuk Raskin, sementara harga resmi adalah Rp 1.000 per kilogram. Upaya-upaya ini masih terus dilakukan untuk meningkatkan metode penargetan, sosialisasi, dan pengiriman bantuan Raskin.

Penyempurnaan metode penargetan akan meningkatkan kemungkinan bantuan untuk diterima oleh rumah tangga yang tepat ...

Sejak tahun 2010, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan bantuan Badan Pusat Statistik (BPS), telah mengembangkan Basis Data Terpadu (BDT) bagi calon penerima bantuan. Basis data tersebut memiliki keunggulan yang penting untuk menjadi pencatatan tunggal untuk penargetan seluruh program, dibanding penggunaan daftar-daftar yang terpecah yang digunakan oleh program-program yang berbeda seperti yang dilakukan sebelumnya.⁹ Sebagai hasilnya, rumah tangga miskin akan lebih mungkin untuk menerima semua program yang berhak mereka terima, dibanding hanya menerima sebagian saja. Selain itu, rancangan basis data (*database*) yang cermat, dan mengacu kepada praktik-praktik terbaik internasional, akan memungkinkan banyak rumah tangga miskin yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam daftar, untuk diikutsertakan sebagai penerima program bantuan.

...dengan mulai bergeraknya Indonesia menuju penggunaan kerangka bantuan sosial yang lebih

BDT menyertakan 25 juta rumah tangga, atau sedikit di atas 40 persen penduduk Indonesia. Kini BDT telah beroperasi dan telah digunakan untuk memilih 400.000 penerima baru dalam uji coba penyaluran program bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, 76,4 juta nama diambil dari BDT sebagai penerima kartu Jamkesmas yang baru, dan 15,5 juta rumah tangga sebagai penerima Raskin. Kementerian Pendidikan juga sepakat

⁸ World Bank 2012. Pelaksanaan Subsidi Raskin

⁹ World Bank 2012. Penargetan Rumah Tangga Miskin dan Rentan di Indonesia.

terpadu...

untuk menggunakan BDT bagi pemilihan penerima Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM), yang mencakup sejumlah program bantuan dana kepada para siswa miskin. Tim TNP2K yang mengelola basis data tersebut bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah pada tingkat kabupaten dan propinsi yang meminta data untuk program-program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan daerah yang didanai oleh APBD. Sejumlah program tersebut, seperti Jamkesda (jaminan kesehatan yang melengkapi Jamkesmas), menggunakan BDT untuk melakukan koordinasi dalam memilih penerima bantuan dan menghindari tumpang-tindih antar penerima.

Dengan peluncuran Program Kompensasi Khusus (P4S), Pemerintah memanfaatkan kesempatan untuk menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada 15,5 juta rumah tangga paling miskin di dalam basis data tersebut. Kartu ini menjadi dasar penerimaan BLSM dan tambahan bantuan Raskin dari program kompensasi, dan pemegang kartu juga berhak atas perluasan program BSM di bawah P4S. Penggunaan kartu tunggal bagi berbagai program menandai langkah awal yang penting menuju kerangka bantuan sosial terpadu di Indonesia. Ini adalah pertama kali Indonesia melakukan koordinasi program bantuan sosial dan penerimanya dengan menggunakan basis data tunggal, yang akan membuka jalan kepada penyampaian bantuan yang terpadu di kemudian hari, dan juga untuk menerima keluhan maupun pengaduan.

...dan memastikan bahwa daftar penerima bantuannya selalu diperbaharui

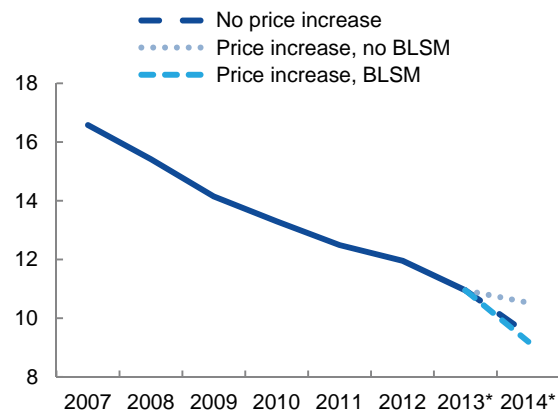
Selain itu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk menyertakan rumah tangga miskin yang kini belum terdaftar di dalam BDT. Penelitian lapangan terbaru oleh Pemerintah, Bank Dunia dan *Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab* (J-PAL, dari Departemen Ekonomi, *Massachusetts Institute of Technology*) telah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang difasilitasi secara cermat dapat meningkatkan kualitas penargetan, terutama dalam mengidentifikasi penduduk termiskin. Temuan-temuan itu didapat dari percobaan yang terkendali, dengan menggunakan fasilitator yang terlatih. Namun, keberhasilan penerapan metode-metode penargetan komunitas akan bergantung pada perancangan dan pelaksanaan metode-metode yang dapat diperluas jangkauannya dan dilakukan kembali pada berbagai komunitas di seluruh Indonesia. Jika berhasil, proses penargetan komunitas tidak hanya akan membantu menemukan rumah tangga tambahan untuk menerima bantuan, namun juga akan berkontribusi kepada rencana pembaruan dan perluasan basis data pada tahun 2014, karena rumah tangga-rumah tangga tersebut akan disertakan ke dalam proses sertifikasi ulang, yang merupakan keharusan agar BDT selalu mencakup data dan informasi terkini.

Dengan pemberian BLSM, pengentasan kemiskinan diperkirakan akan terus berlanjut

Pemberian BLSM kepada rumah tangga miskin dan rentan akan membantu Indonesia untuk mempertahankan pencapaian yang telah diraih dalam pengentasan kemiskinan. Dengan bantuan langsung tunai selama empat bulan, Bank Dunia memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan akan turun menjadi 9,4 persen pada bulan Maret 2014, dibanding penurunan yang lebih kecil menjadi 10,5 persen bila terjadi kenaikan harga namun tanpa kompensasi BLSM (Gambar 31). Penurunan tingkat kemiskinan yang diharapkan akan mengikuti peningkatan harga BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi, akan serupa dengan pengalaman yang dipetik dari peningkatan harga BBM tahun 2008.

Gambar 31: Tingkat kemiskinan akan terus turun dengan BLSM

Tingkat Kemiskinan Indonesia (persen), skenario aktual dan perkiraan



Catatan: 2013 adalah perkiraan Bank Dunia, 2014 adalah perkiraan Bank Dunia sesuai masing-masing skenario
Sumber: BPS, perkiraan Bank Dunia

b. Program-program jangka panjang untuk mendorong rumah tangga miskin dan rentan

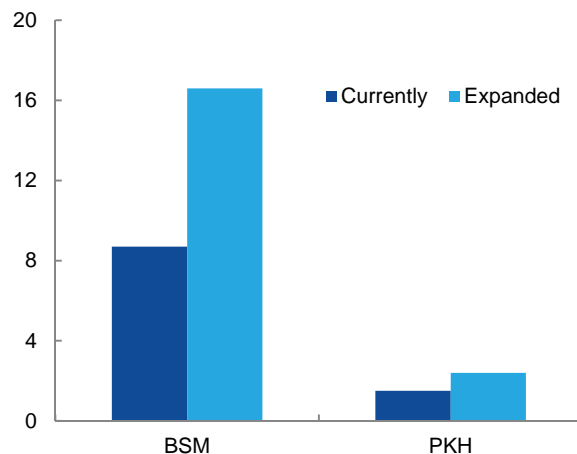
Reformasi subsidi BBM memberikan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memperluas sistem perlindungan sosialnya yang saat ini sedang dikembangkan...

Pemerintah juga mengalokasikan ulang penghematan dari penurunan subsidi kepada dua program perlindungan sosial permanen berbasis rumah tangganya, yaitu:

- Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM). Cakupan BSM telah meningkat hampir dua kali lipat dari 8,7 juta menjadi 16,6 juta penerima. Tingkat bantuan juga akan ditingkatkan secara signifikan: bantuan sekolah dasar (SD) akan meningkat dari Rp 360.000 menjadi Rp 450.000 per siswa pertahun, sementara bantuan sekolah menengah pertama akan meningkat dari Rp 550.000 menjadi Rp 750.000 per siswa pertahun.
- Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program bantuan tunai bersyarat. Cakupan program ini akan diperluas dari 1,5 juta rumah tangga menjadi 2,4 juta rumah tangga pada tahun 2013 dan 3,2 juta rumah tangga pada tahun 2014. Pada saat yang bersamaan, rata-rata bantuan akan meningkat dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta per rumah tangga pertahun.

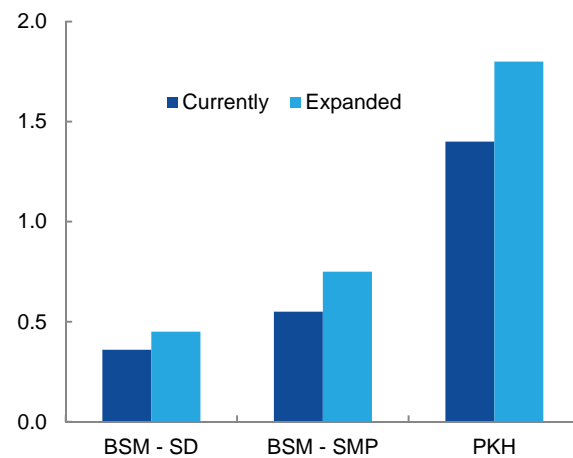
Dengan melakukan alokasi ulang dari penghematan subsidi BBM ke program-program sosial jangka panjangnya, Indonesia secara efektif menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan dan mereformasi sistem bantuan sosial yang memang sangat dibutuhkan. Pada tahun 2010, Indonesia menghabiskan hampir Rp 30 triliun untuk program-program bantuan sosialnya, yang setara dengan 0,5 persen dari PDB. Angka itu termasuk rendah dibanding negara-negara Asia Timur yang secara rata-rata menghabiskan 1 persen dari PDB, atau negara-negara Amerika Latin yang secara rata-rata menghabiskan 1,3 persen dari PDB. Walau masih terdapat kebutuhan untuk memperdalam investasi dalam perlindungan sosial di saat Indonesia bertransisi ke sistem yang lebih mutakhir yang sesuai bagi negara dengan penghasilan menengah, alokasi ulang penghematan subsidi BBM tahun ini merupakan langkah yang signifikan ke arah yang tepat.

Gambar 32: Program-program akan memperluas cakupan rumah tangga miskin dan rentan secara signifikan...
(tingkat cakupan per program, juta)



Catatan: * Juta siswa (BSM) atau rumah tangga (PKH)
Sumber: TNP2K

Gambar 33: ...dan tingkat bantuan juga meningkat
(tingkat bantuan per program, juta Rupiah per tahun)



Sumber: TNP2K

P4S menyertakan reformasi yang signifikan yang akan meningkatkan efektivitas program bantuan pendidikan di Indonesia...

Dengan memperluas bantuan dana bagi siswa miskin dan memperbesar bantuannya, subsidi yang dihemat dapat membantu memitigasi masalah peningkatan kesenjangan di Indonesia dengan meningkatkan mobilitas generasi berikutnya. Peningkatan bantuan dan kemajuan dalam penargetan program BSM mengatasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi program tersebut seperti dijelaskan di dalam tinjauan Bank Dunia mengenai program bantuan sosial ini.¹⁰

Peningkatan kecukupan bantuan BSM. Di masa lalu, bantuan tidaklah mencukupi bagi keluarga miskin untuk mempertahankan agar anak-anaknya tetap mengenyam pendidikan. Umumnya, jumlah bantuan setara dengan sekitar 30 persen biaya pendidikan yang harus dibayar oleh keluarga penerima bantuan. Jumlah besaran BSM juga tidak mengikuti indeks inflasi; karenanya para penerima melihat jumlah bantuan semakin tidak mencukupi seiring dengan berjalannya waktu. Dengan meningkatkan bantuan melalui program P4S, maka terdapat kemungkinan yang lebih besar bagi rumah tangga untuk dapat mempertahankan anak-anaknya di sekolah demi menyelesaikan tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama sesuai dengan program wajib belajar.

Penyempurnaan penargetan bantuan BSM. Program P4S melanjutkan perombakan yang dilakukan Pemerintah terhadap metode yang digunakan untuk menargetkan BSM. Seperti telah dijelaskan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Sekretariat TNP2K dalam penggunaan BDT untuk menarget penerima BSM. Sebelumnya, distribusi bantuan dilakukan oleh komite sekolah berdasarkan kuota setempat namun tidak dikaitkan dengan tingkat kemiskinan daerah. Penargetan tersebut mencatat kinerja yang buruk; seorang siswa dari kelompok 60 persen rumah tangga yang paling mampu memiliki kesempatan yang setara untuk menerima bantuan seperti siswa dari kelompok 40 persen rumah tangga yang paling tidak mampu.

Selain penggunaan BDT untuk menemukan siswa penerima bantuan, perubahan besar mengenai mekanisme pencairan bantuan juga telah dibuat. Para siswa dari keluarga yang berhak kini dapat membawa Kartu Perlindungan Sosial beserta dokumen pelengkap lainnya ke sekolah untuk menerima bantuan tersebut. Dengan memberikan wewenang langsung kepada para penerima, diperkirakan perluasan BSM melalui program P4S akan lebih menjamin peruntukan bantuan yang lebih besar agar diterima oleh para siswa yang memiliki risiko terbesar untuk putus sekolah.

...dan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi rumah tangga sangat miskin yang ditargetkan oleh PKH

PKH adalah program perlindungan sosial yang telah terbukti efektif dalam menghadapi kondisi kemiskinan yang sangat dan berkepanjangan. Evaluasi dampak program PKH yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2011 menemukan bahwa para penerima memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan layanan kesehatan setempat dan mengikuti perilaku hidup sehat seperti: layanan kesehatan pra-persalinan, persalinan pada sarana kesehatan, layanan pasca-persalinan, imunisasi, serta pemeriksaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi dan balita.¹¹ Namun, dampak program terhadap peningkatan pendaftaran siswa dan lamanya bersekolah tidaklah signifikan secara statistik (kecuali pada jumlah jam yang dihabiskan di sekolah, dengan peningkatan hanya lima persen di atas nilai dasar atau *baseline*). Seperti halnya BSM, terkait dengan permasalahan implementasi PKH yang dipaparkan dalam tinjauan Bank Dunia atas program-program bantuan sosial Indonesia, reformasi yang akan dilakukan melalui program P4S juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program PKH.

Peningkatan kecukupan bantuan PKH. Tampaknya, dampak sepenuhnya dari program tidak dapat direalisasikan karena besar bantuan PKH tidak sesuai dengan biaya yang harus ditanggung oleh keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh, besar bantuan memang mencukupi untuk menutup biaya pendidikan sekolah menengah pertama selama satu tahun, namun jumlahnya hanya mencukupi kurang dari

¹⁰ World Bank, 2012. Bantuan Siswa Miskin.

¹¹ World Bank 2012. Program Keluarga Harapan.

setengah (43 persen) jika biaya transportasi turut disertakan. Serupa dengan hal tersebut, ongkos layanan persalinan oleh bidan berkisar antara Rp 200.000 – Rp 800.000 (berdasarkan penelitian SMERU tahun 2008), yang pada ujung tertinggi adalah setara dengan bantuan PKH yang lalu bagi ibu hamil. Besar bantuan juga belum disesuaikan dengan inflasi, yang telah mengikis nilai sesungguhnya dari bantuan tersebut seiring dengan berjalannya waktu; hal ini mengakibatkan penurunan nilai riil bantuan sebesar 22 persen antara tahun 2007 dan 2010 (d disesuaikan dengan menggunakan inflasi pada *bundle* konsumsi rakyat miskin).

Di bawah program P4S, jumlah minimum bantuan akan meningkat dari Rp 600.000 menjadi Rp 800.000 per keluarga pertahun, dan jumlah maksimumnya akan meningkat dari Rp 2.200.000 menjadi Rp 2.800.000 (perhitungannya berdasarkan jumlah anak dan umur anak, dan penyertaan ibu hamil atau menyusui di dalam suatu keluarga). Selain itu, dengan menerima Kartu Perlindungan Sosial, keluarga penerima PKH secara otomatis memiliki akses terhadap program BSM, BLSM dan alokasi Raskin. Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia dimana program-program terpisah dilaksanakan sebagai suatu sistem untuk memberikan dukungan menyeluruh terhadap rumah tangga yang sangat miskin. Secara bersamaan, bantuan ini akan memungkinkan mereka untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kemungkinan anak-anak mereka dapat membantu diri mereka sendiri untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dibutuhkan perhatian untuk memastikan bahwa program-program disampaikan dan dipantau secara memadai

Rancangan paket kompensasi merupakan kemajuan besar dalam perkembangan sistem perlindungan sosial Indonesia, sejalan dengan jalur yang dilalui oleh negara-negara berpenghasilan menengah yang lebih maju. Keberhasilan program akan bergantung pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan komponen masing-masing program. Di masa lalu, masalah implementasi menjadi batu sandungan bagi keberhasilan program-program tersebut. Sebagai contoh, pada program BSM, 83 persen siswa yang menerima bantuan pada tahun 2009 menyatakan bahwa mereka hanya menerima 39-50 persen dari besar bantuan yang ditetapkan. Walau membutuhkan waktu untuk membangun sistem pelaksanaan yang efektif, terdapat beberapa tindakan yang dapat segera diambil oleh pemerintah untuk memantau dan meningkatkan pelaksanaan program-program P4S.

- *Pertama, fokus pada peningkatan kesadaran penerima bantuan akan jenis-jenis bantuan yang berhak mereka terima sesuai paket kompensasi.* Pada masa lalu, pelaksanaan program-program bantuan sosial dirintangi oleh terbatasnya pengetahuan penerima bantuan tentang program bantuan dan bagaimana mendapatkannya. Sebagai contoh, sebagian besar pemegang kartu Jamkesmas yang diwawancarai tidak mengetahui jenis-jenis layanan rawat jalan yang berhak mereka terima. Suatu percobaan yang dilakukan oleh J-PAL bersama dengan Sekretariat TNP2K dalam inovasi pengiriman Raskin, menemukan bahwa penerima bantuan menerima lebih banyak beras bersubsidi ketika mendapatkan informasi mengenai berapa banyak beras yang berhak mereka terima melalui kegiatan peningkatan kesadaran. Oleh sebab itu, bahan-bahan komunikasi dan strategi yang disiapkan oleh Sekretariat TNP2K untuk P4S memainkan peran penting dalam keseluruhan implementasi program, namun penggunaan bahan-bahan tersebut demi meningkatkan kesadaran para penerima bantuan dan masyarakat secara umum masih menjadi tanggung jawab utama dari lembaga pelaksana program.
- *Kedua, melaksanakan pemantauan program tepat pada waktunya untuk memperbaiki masalah-masalah yang dijumpai selama implementasi dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan P4S.* Pemantauan program umumnya dilakukan oleh lembaga pelaksana setempat dan didelegasikan dengan dukungan teknis dan keuangan yang terbatas, tanpa adanya sistem pemberian tanggapan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpai. Program P4S menghadirkan kesempatan untuk menguji inovasi dalam memantau pelaksanaan program. Kemungkinan-kemungkinannya mencakup: pemantauan implementasi oleh pihak ketiga (misalnya, jaringan universitas dan LSM, keduanya memiliki jaringan yang luas dan terpercaya), pemantauan melalui pelaksanaan survei nasional yang dilakukan oleh BPS, dan uji coba penggunaan teknologi bergerak (*mobile*), serta pusat-pusat penerimaan keluhan. Sementara lembaga-lembaga koordinator di tingkat pusat, seperti Sekretariat TNP2K dan Bappenas, akan memainkan peran yang besar dalam merancang

dan melaksanakan sistem pemantauan. Kerja sama antara lembaga pelaksana di tingkat pusat dan pemerintah daerah juga merupakan hal yang sangat penting.

- *Akhirnya, melakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas program.* Belajar dari pengalaman ini, Pemerintah dapat memperbaiki rancangan dan kinerja program-program perlindungan sosialnya dengan mempelajari hal-hal yang berhasil dan yang gagal dilaksanakan. Jika memungkinkan, temuan-temuan hasil evaluasi dapat dikaitkan dengan alokasi anggaran di masa yang akan datang dari lembaga-lembaga pelaksana untuk mendorong penyempurnaan pelaksanaan program.

2. Tantangan Indonesia: pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru

Indonesia sedang melaksanakan sistem jaminan sosial yang baru...

Pemerintah Indonesia sedang dalam proses pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru. Program-program SJSN bersifat wajib dan akan mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk pekerja sektor formal dan informal, dengan lima program jaminan, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan pensiun (manfaat pasti), jaminan hari tua (iuran pasti), jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja – dan akan memberikan manfaat yang sama kepada semua. Iuran-iuran program SJSN ditetapkan pada tingkat yang cukup untuk membiayai pengeluaran, setiap dana jaminan sosial harus dapat membiayai dirinya sendiri (*self-sustaining*). Dasar hukum sistem baru tersebut adalah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Bagian ini memberikan tinjauan singkat akan pelaksanaan SJSN, dengan fokus pada tantangan-tantangan utama dan faktor-faktor yang patut dipertimbangkan demi keberhasilan penerapan sistem jaminan sosial nasional.

...yang dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan negara

Sistem jaminan sosial nasional akan membantu menggerakkan peningkatan penghasilan bersih penduduk untuk memperkuat dan memperluas cakupan jaminan kesehatan, memberikan proteksi ketika terjadi kematian dini dan kecelakaan kerja, sertamemberikan jaminan pendapatan setelah keluar dari angkatan kerja. Program-program SJSN sejalan dengan agenda pro-poor, pro-jobs, pro-growth pemerintah, dan akan berperan penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi makro pemerintah, seperti diuraikan pada rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang. Mereka juga menjadi bagian dari program-program untuk menjamin hak asasi dan martabat individu bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penerapan yang baik, program-program SJSN akan membantu mengurangi kerentanan, memberi perlindungan terhadap kejutan ekonomi, mendorong mobilitas kerja, menurunkan kemiskinan orang lanjut usia, membantu mengurangi ketidakesetaraan, dan memobilisasi kelangkaan tabungan.

Pemenuhan visi SJSN bergantung pada keputusan dan tindakan yang akan datang

Keberhasilan sistem yang baru itu pada akhirnya akan bergantung kepada seberapa baik rancangan, penerapan dan pengelolannya. Upaya Pemerintah untuk menerapkan sistem jaminan sosial nasional yang dirancang dengan baik, berkelanjutan secara fiskal, kokoh dan menyeluruh akan menjadi tantangan dan membutuhkan serangkaian tindakan-tindakan besar dari Pemerintah dan BPJS agar dapat berhasil. Kerjasama antar kelompok kerja pelaksana dari berbagai Kementerian akan diperlukan untuk memastikan persetujuan bersama akan strategi yang luas bagi implementasi dan operasional sistem baru tersebut.

a. Menempatkan perubahan ke dalam konteks: dimana posisi Indonesia sekarang

Cakupan jaminan sosial saat ini terpecah dan tidak lengkap...

Indonesia kini memiliki skema jaminan sosial yang mencakup segmen-segmen pasar tenaga kerja yang terpisah. Masing-masing skema dikelola oleh badan yang berbeda. Para pengelola ini merupakan BUMN pencari laba yang melapor kepada Kementerian BUMN dan diawasi oleh berbagai Kementerian yang berbeda. Hanya sekitar 12 persen pekerja yang ikut serta dalam programpensiun, dimana hampir semuanya berada di sektor formal, dan hanya 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlindungi oleh asuransi kesehatan.

...dengan cakupan bagi pegawai negeri sipil, militer dan polisi

PT Taspen mengelola program pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil (non-Kemhan/POLRI) dan pejabat negara, sementara PT Asabri mengelola program ASABRI dan pensiun bagi anggota militer dan polisi serta PNS Kemhan/POLRI. Pegawai negeri sipil dan pejabat negara beserta ahli warisnya (janda/duda/anak/orang tua) berhak menerima manfaat pensiun seumur hidup (annuity) yang dibiayai melalui APBN dan dibayarkan melalui PT Taspen (bagi PNS Non-Kemhan/POLRI) atau PT Asabri (bagi PNS Kemhan/POLRI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil (Non-Kemhan/POLRI) dan pejabat negara juga berhak menerima tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus (lump sum) ketika memasuki masa pensiun dan uang duka (wafat/tewas) sebelum dan sesudah pensiun. Adapun anggota militer dan polisi juga berhak

menerima manfaat pensiun yang dibiayai melalui APBN dan dibayarkan melalui PT Asabri, serta 9 program ASABRI yang berlaku juga bagi PNS Kemhan/POLRI yang dikelola oleh PT Asabri.

...tetapi cakupan yang terbatas bagi pekerja sektor formal...

PT Jamsostek memberikan jaminan sosial bagi pekerja sektor formal. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya ke PT Jamsostek serta membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pegawainya. Sesuai UU No.3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, terdapat 4 program JAMSOSTEK, yaitu: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

...dan cakupan yang sangat terbatas terhadap sektor informal dan kesehatan

Sebagian besar pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan sosial. Terdapat program uji coba berukuran kecil bagi pekerja informal yang disponsori oleh Jamsostek yang antara lain menyertakan program jaminan hari tua. Laju perluasan cakupan melalui program uji coba itu sangatlah lambat. Jumlah anggota hanya mencapai 400.000 orang pada akhir tahun 2010. Tingkat pergantian keanggotaan juga tinggi, karena para anggota bebas untuk masuk dan keluar dari program itu kapan saja.

Dalam hal cakupan asuransi kesehatan, PT Askes hanya memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai negeri sipil, pejabat negara, pensiunan, dan veteran beserta keluarganya yang mencakup 16.4 juta penduduk. PT Jamsostek memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada sekitar 5.5 juta penduduk, sementara 10 juta lainnya diberikan oleh pemberi kerja yang tidak memilih program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek dan memutuskan untuk ikut pada programnya sendiri. Program bebas biaya Jamkesmas yang disponsori oleh Kementerian Kesehatan memberikan jaminan kepada 86.4 juta penduduk yang miskin dan rentan, sementara program-program Jamkesda (yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan pada umumnya melengkapi program nasional Jamkesmas) mencakup 32 juta, walaupun beberapa diantaranya juga dicakup oleh Jamkesmas. Terakhir, sekitar 5 juta individu membeli asuransi kesehatan swasta. Secara keseluruhan, jumlah yang tercakup adalah 150 juta atau sekitar 60 percent dari jumlah penduduk.

Implementasi SJSN, yang dimulai dengan sistem kesehatan, sedang berjalan...

Implementasi program SJSN dimulai segera setelah penetapan UU BPJS pada bulan November 2011. UU ini dapat mengurangi jumlah administrator (pengelola) jaminan sosial, membawa struktur hukum dan tata kelola yang baru dan menyederhanakan sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan memberikan informasi publik yang lebih terbuka. Sebagai tambahan, penerbitan keputusan Menko Kesra pada bulan Februari 2012 yang kemudian diamandemen pada bulan Maret 2012, telah menetapkan susunan birokrasi dan tanggung jawab penerapan SJSN.

Sistem kesehatan SJSN akan dimulai pada 1 Januari 2014. Pemerintah telah mulai menerbitkan peraturan pelaksanaan jaminan kesehatan. Iuran yang akan dipungut dari masyarakat miskin, sektor informal dan formal masih dalam pembahasan. Manfaat paket kesehatan bersifat menyeluruh dan mencakup hampir semua jenis intervensi medis yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan yang disyaratkan oleh UU SJSN. Paket tersebut juga mempertahankan tingkat cakupan yang luas yang saat ini diberikan oleh program Jamkesmas, yang memiliki paket manfaat tertinggi dibanding program lainnya di Indonesia saat ini. Bahkan tindakan medis mahal seperti operasi jantung, transplantasi organ, hemodialisis, dan pengobatan kanker juga termasuk dalam manfaat. Hal ini akan membawa tekanan yang besar terhadap sistem kesehatan di Indonesia, karena akan membutuhkan waktu yang lama bagi pemerintah untuk meningkatkan sisi penawaran – fasilitas, perlengkapan, alat-alat medis dan tenaga medis profesional – untuk dapat memenuhi harapan permintaan terhadap layanan kesehatan yang lebih canggih.

Program-program ketenagakerjaan SJSN – termasuk jaminan pensiun (manfaat pasti), jaminan hari tua (iuran pasti), jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja - akan dimulai selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2015 dan karenanya masih berada dalam tahap awal pengembangan. Peta jalan (roadmap) penerapannya diperkirakan akan segera diterbitkan. Diskusi yang aktif tentang rancangan dan pembiayaan program-program ketenagakerjaan SJSN, aturan investasi aset dana jaminan sosial dan aset BPJS juga telah dimulai.

...termasuk transformasi kelembagaan

Berdasarkan UU BPJS, akan ada hanya dua administrator: satu untuk program kesehatan dan satu untuk program ketenagakerjaan. Kedua BPJS akan berbentuk lembaga hukum publik tidak berorientasi keuntungan yang akan beroperasi untuk melayani kepentingan peserta.

PT Askes dan PT Jamsostek – BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan - bekerja dengan aktif dalam transformasi mereka, dengan penekanan kepada kegiatan-kegiatan yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2013. Termasuk diantaranya adalah rencana penutupan kedua perusahaan, perhitungan kewajiban program, transfer aset ke BPJS yang baru dan kepada dana jaminan sosial yang tepat, dan laporan keuangan awal bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Juga terdapat pembicaraan tentang susunan tata kelola, prosedur audit internal, pengawasan dan supervisi dari kedua lembaga baru tersebut.

b. Pertimbangan cakupan, biaya dan keberlanjutan fiskal

Cakupan universal mendorong mobilitas tenaga kerja dan stabilisasi pembiayaan program

Sistem jaminan sosial nasional adalah upaya yang berani untuk mentransformasikan sistem jaminan sosial Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah mencapai cakupan keseluruhan/universal – menyertakan seluruh penduduk ke dalam sistem baru itu tanpa membedakan apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal. Walau program-program baru akan dimulai pada tahun 2014 dan 2015, dan rencana pemerintah untuk mencapai cakupan universal adalah pada tahun 2019, pengalaman internasional menunjukkan bahwa tampaknya akan dibutuhkan waktu setidaknya satu dekade atau lebih untuk memperluas cakupan hingga mencakup seluruh penduduk. Sebagai contoh, di Jepang dan Korea membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapai cakupan seluruh penduduk. Namun demikian, bila berhasil dengan baik, maka semua orang akan turut serta dan menerima manfaat dari program-program tersebut dan biayanya akan ditanggung bersama secara merata untuk mencapai solidaritas sosial. Cakupan universal juga memungkinkan pekerja untuk berpindah tempat kerja tanpa kehilangan jaminan mereka, sehingga menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih dinamis.

Sistem yang berhasil membutuhkan manfaat yang menarik pada harga yang wajar dan terjangkau

Program-program SJSN akan memiliki perbedaan dalam rancangan maupun cakupan dibanding program-program yang ada dan akan menyertakan program pensiun manfaat pasti. Terdapat dua cara pandang mendasar untuk merancang program-program SJSN. Metode pertama – dari sudut pandang kebijakan sosial – adalah menentukan tingkat manfaat yang diinginkan dan kemudian menghitung biaya dan tarif iuran yang dibutuhkan. Metode kedua dimulai dengan penentuan tingkat jumlah yang mana pemberi kerja, pekerja dan pemerintah bersedia dan siap berkontribusi dan kemudian prosesnya bergerak mundur untuk menentukan tingkat manfaat yang terjangkau. Dalam praktiknya, cara terbaik adalah menggunakan gabungan dari kedua metode untuk menghasilkan hasil yang optimal. Tujuannya adalah menentukan gabungan manfaat dan kontribusi yang berarti namun terjangkau bahkan ditengah keadaan yang kurang kondusif.

Proses penetapan manfaat dan penentuan iuran bagi program-program SJSN harus memperhitungkan perbedaan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan serta kerelaan membayar dari pekerja sektor formal maupun informal. Program-program harus dirancang dengan mengingat kebutuhan dan keperluan para pekerja, namun pada waktu yang bersamaan tingkat iuran yang akan dipungut juga harus ditetapkan dengan tepat pada taraf yang dapat diterima bagi para pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Iuran tersebut harus terjangkau oleh para pekerja dan tingkat iuran tersebut harus tidak menciptakan beban yang tidak beralasan bagi pemberi kerja. Pada akhirnya, pekerja dan pemberi kerja harus memberikan kontribusi karena mereka ingin melakukannya, bukan karena paksaan. Tingkat manfaat yang beralasan dan iuran yang moderat juga akan memungkinkan pemerintah untuk membayar kaum miskin tanpa mengganggu posisi fiskal negara.

Program kesehatan SJSN merupakan ilustrasi yang baik dari tantangan-tantangan tersebut. UU SJSN mensyaratkan paket kesehatan yang lengkap dan hal ini telah di masukkan dalam aturan-aturan pelaksanaan. Tingkat iuran untuk kelompok miskin, sektor informal tetapi tidak miskin, dan sektor formal masih didiskusikan, demikian juga metode yang akan

digunakan untuk membayar layanan tenaga profesional dan fasilitas medis. Walaupun system baru akan mulai pada 1 Januari 2014, akan membutuhkan waktu agar sistem dapat memenuhi layanan seperti yang diharapkan. Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah termasuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap program dan persyaratan dan manfaat, mengelola harapan peserta, membangun jaringan penyedia dan fasilitas publik dan swasta. Semua kegiatan ini, dan juga kondisi penduduk yang menua (aging) akan meningkatkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan modern. Akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh ini sementara menjaga biaya pada tingkat yang terjangkau bagi peserta.

Program-program harus berkelanjutan secara fiskal dalam jangka pendek dan panjang...

Dalam hal ini, penting untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memastikan keberlanjutan fiskal dari dana jaminan sosial SJSN dan bahwa risiko-risiko finansial dari program-program jaminan sosial dikelola dengan baik. Dibutuhkan analisis keuangan, perhitungan aktuaris yang rumit dan model-model komputer yang mutakhir untuk mengkuantisir dampak finansial dari rancangan yang diusulkan dan memastikan bahwa iuran memang mencukupi untuk membayar jaminan yang dijanjikan.

...dengan pertimbangan keberlanjutan pada setiap dana...

Alasan lain untuk keberhati-hatian dalam menetapkan iuran adalah bahwa UU SJSN tidak memperkenankan aset bersih dari satu dana jaminan sosial SJSN untuk digunakan sebagai subsidi bagi defisit dana lainnya. Setiap dana harus memiliki iurannya sendiri dan bersifat mandiri. Walaupun BPJS dan dana pensiun bukan untuk keuntungan, dana asuransi sosial mensyaratkan sejumlah aset bersih, ditetapkan pada tingkat yang cukup untuk menutupi penarikan cadangan dan menutupi fluktuasi penarikan (claim). Tanpa ada aset bersih, dana-dana jaminan sosial harus dibiayai oleh pemerintah untuk tambahan dana setiap saat ketika penarikan (claim) lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Jumlah aset bersih yang dibutuhkan berbeda untuk setiap dana, dimana resiko berlebuhnya fluktuasi penarikan (claim) lebih tinggi untuk beberapa dana dibanding lainnya. Sebagai contoh, resiko tinggi claim lebih tinggi untuk dana kesehatan dari pada dana manfaat kematian.

Walaupun tidak diharuskan oleh UU, sedapat mungkin, untuk dana manapun, iuran bagi sektor formal, sektor informal yang tidak miskin dan sektor informal yang miskin, harus dihitung dengan baik sehingga terdapat subsidi minimal antara ketiga kelompok tersebut. Bila tidak, kelompok yang membayar terlalu banyak akan merasa tidak nyaman karena terpaksa memberikan subsidi bagi kelompok yang membayar terlalu sedikit.

Program pensiun SJSN membawa tantangan yang khusus

Program pensiun SJSN membawa sejumlah tantangan tambahan karena biayanya akan meningkat sejalan dengan waktu dengan jatuh temponya sistem pensiun sesuai dengan peningkatan umur penduduk. Program ini harus diawasi, dikelola dan disesuaikan dengan cermat, untuk menjaganya agar tetap berkelanjutan secara fiskal sesuai berjalannya waktu. Program-program pensiun memiliki jangka waktu yang panjang. Para pekerja dapat mulai membayar iuran pada umur 20 tahun, mungkin tidak akan pensiun selama 40 tahun berikut, dan kemudian menerima manfaat selama 30 tahun selanjutnya. Karenanya, jangka waktu untuk perencanaan, pembiayaan dan investasi sangatlah panjang. Rencana-rencana pensiun membutuhkan beberapa dekade untuk mencapai kematangan yang penuh dan terkena dampak secara signifikan oleh tren jangka panjang seperti semakin menuanya penduduk. Karena alasan ini, model-model pensiun seringkali membuat proyeksi untuk 75 hingga 100 tahun. Khusus bagi pensiun, dampak jangka pendek dari peluncuran atau perubahan kepada program umumnya sangat berbeda dengan dampak jangka panjang.

c. Pertimbangan administrasi, tata kelola dan kapasitas

Dibutuhkan sistem administrasi yang kuat, terutama bagi nomor identifikasi (ID) yang unik ...

Untuk mengelola program-program jaminan sosial dengan tepat, sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua orang menerima nomor identifikasi yang unik dan tidak terdapat nomor identifikasi yang sama. UU SJSN dan BPJS meminta setiap BPJS untuk bertanggung jawab terhadap penetapan nomor ID yang unik kepada para anggotanya. Namun tidaklah masuk akal untuk menggunakan nomor ID yang berbeda-beda dalam program-program

kehatan dan ketenagakerjaan, sehingga kedua BPJS itu harus saling bekerja sama untuk menerbitkan nomor identifikasi yang dapat digunakan bersama oleh kelima program-program SJSN.

Nomor ID yang unik akan setidaknya memiliki dua kegunaan yang berbeda. Nomor itu memungkinkan para individu untuk memastikan identifikasi mereka ketika meminta layanan atau menerima pembayaran. Nomor itu juga akan digunakan untuk melacak gaji individu, layanan kredit dan catatan kontribusi dalam dana asuransi sosial. Nomor identifikasi yang unik bagi para anggota SJSN dapat merupakan nomor yang sama untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau bisa menggunakan nomor lain yang terkait dengan NIK. Penilaian harus dilakukan untuk menilai kecukupan NIK dan potensi peningkatan yang dapat membantu mendorong penggunaan administrasi program SJSN.

...dan bagi pemungutan iuran dari pekerja sektor formal dan sektor informal...

Pekerja administrasi penting lainnya adalah memungut dan mengkreditkan iuran dari seluruh pekerja dengan tepat. Sementara mekanisme pemungutan bagi pekerja sektor formal telah ada di Indonesia dalam bentuk program jaminan sosial wajib Jamsostek, masih terdapat banyak penghindaran. Tingkat partisipasi dalam Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek berada di bawah 30 persen, sebagian besar disebabkan karena Jamsostek tidak memiliki kewenangan untuk penegakkan.

Tidak seperti pekerja sektor formal, tidak ada mekanisme pemungutan iuran yang tersedia bagi pekerja sektor informal. Dengan demikian sangatlah penting untuk segera menyusun suatu model pemungutan iuran yang efektif bagi sektor informal. Bila tidak, maka partisipasi yang berasal dari sektor sektor informal dapat dipastikan hanya akan mencapai tingkat yang rendah. Hal itu akan membawa dua konsekuensi negatif. Pekerja sektor informal tidak akan berhak untuk memperoleh manfaat dari program SJSN, dan stabilitas finansial sistem SJSN akan menemui hambatan. Bila penghindaran bersifat meluas, hal itu akan membawa dampak negatif terhadap solvabilitas keuangan dari program-program jaminan, karena hanya mereka dengan risiko yang lebih buruk yang akan bergabung sementara mereka dengan risiko yang lebih baik akan memilih untuk menghindar. Hal ini dikenal sebagai anti-seleksi atau seleksi-negatif, dan akan sangat mudah mempengaruhi stabilitas keuangan dari skema jaminan sosial tersebut.

...yang perlu dilakukan pilot dan di uji

Pemerintah harus mempelajari berbagai jenis mekanisme pemungutan yang mungkin dapat diterapkan, meneliti pengalaman negara-negara lain dan melakukan uji coba pada pilihan-pilihan yang mungkin bagi pemungutan iuran dari para pekerja sektor formal maupun informal. Pemilihan strategi pemungutan iuran bersama-sama dengan rancangan program yang tepat dan penegakkan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin stabilitas program dan dukungan politik yang berkelanjutan. Salah satu bagian yang penting dari solusi manapun adalah penggunaan sistem TI terpadu semaksimal mungkin untuk mengotomatisasi administrasi, mengurangi kesalahan dan mengendalikan biaya.

Tata kelola dan supervisi yang memadai dibutuhkan untuk menjamin integritas sistem

Tata kelola dan pengawasan sistem SJSN dan operasi BPJS yang baik sangatlah penting karena besarnya jumlah dana yang akan mengalir ke lima dana jaminan sosial SJSN dan peran penting yang dipegang oleh kedua BPJS di dalam sistem jaminan sosial. BPJS harus bertanggung jawab untuk mengelola program-program SJSN dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Dibutuhkan tolok ukur kinerja dan sistem pemeriksaan dan penyeimbangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sehingga menjaga kepercayaan masyarakat atas sistem itu. Kedua BPJS harus melaksanakan program-program demi kepentingan terbaik para pesertanya, dan keluhan para peserta harus didengar dan segera ditangani. UU BPJS mengharuskan lembaga itu untuk membentuk satuan pengendalian internal untuk menangani keluhan dan memberi tanggapan dalam suatu jangka waktu tertentu.

Sesuai UU, pengawasan internal BPJS akan dilakukan oleh Dewan Komisarisnya dan oleh bagian audit internal. Selain itu pengawasan eksternal akan dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sangatlah penting untuk mendefinisikan dan memahami tugas-tugas dan tanggung

jawab dari seluruh badan dan lembaga itu, dan pengaturannya harus disepakati dan didokumentasikan secara tertulis.

Kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko dibutuhkan untuk melindungi integritas finansial sistem itu

Dibutuhkan manajemen risiko dan pengembangan kapasitas secara keseluruhan untuk memastikan bahwa program-program SJSN dikelola dengan baik. Kementerian Keuangan membutuhkan sistem TI dan sumber daya manusia untuk memantau status keuangan program-program SJSN dengan baik dan membuat penyesuaian terhadap fasilitas rancangan dan tarif iuran untuk memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Para pegawai pada lembaga-lembaga pengawas harus memiliki pengetahuan yang memadai dan menjamin bahwa terdapat susunan yang efektif bagi pengendalian dan supervisi eksternal operasi-operasi BPJS, dan departemen audit internal yang efektif di dalam BPJS. Jika hal itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka anggaran Negara dapat mengalami kerugian yang besar, karena program-program akan kekurangan dana dan kekurangan itu harus ditanggung oleh anggaran negara. Karenanya, penyusunan model komputer yang efektif dan kemampuan manajemen risiko serta supervisi eksternal yang efektif harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

d. Komunikasi menjadi kunci sebagai bagian dari rangkaian proses penerapan yang panjang

Sosialisasi yang tepat dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dan pentingnya sistem SJSN

Komunikasi yang efektif di dalam pemerintahan dan kepada masyarakat, media dan DPR merupakan hal yang penting demi kesuksesan program. Jika seluruh penduduk Indonesia memahami program-program dan manfaatnya, maka penduduk akan lebih menghargai program tersebut. Jika mereka mengetahui bagaimana menggunakan layanan yang menjadi hak mereka, memahami hak-hak dan tanggung jawabnya, dan mengetahui lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program tersebut, mereka akan lebih mempercayai sistem dan akan lebih terdorong untuk turut serta tanpa paksaan, terutama bagi pekerja pada sektor informal. Sementara partisipasi mereka di dalam program merupakan suatu keharusan, penegakkan pembayaran akan merupakan hal yang lebih sulit. UU BPJS bergantung kepada pekerja informal untuk mendatangi kantor BPJS terdekat untuk membayar iurannya, sehingga sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang manfaat-manfaat program tersebut.

e. Kesimpulan: perjalanan panjang menuju cakupan jaminan sosial yang menyeluruh

Implementasi merupakan masalah yang rumit dan membutuhkan waktu dan konsensus diantara pemangku kepentingan untuk penerapan sepenuhnya

Memastikan keberhasilan sistem akan membutuhkan perhatian kepada masalah implementasi utama yang termasuk mendapatkan konsensus politis antara pemangku kepentingan; pengembangan peta jalan dan pemantauan implementasi program; mengembangkan strategi nasional dan memastikan dukungan program-program SJSN atas strategi tersebut; menentukan strategi pembiayaan; dan mengembangkan model-model finansial dan aktuaris dan kemampuan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan fiskal program-program SJSN. Seperti dibahas pada Bagian ini, perhatian khusus harus diberikan kepada fasilitas rancangan program dan perhitungan kontribusi penggajian yang dibutuhkan. Sistem dan prosedur yang dirancang dan diterapkan secara berhati-hati akan dibutuhkan dalam penerbitan nomor identifikasi yang unik, pemungutan iuran, pencatatan rekening setiap individu dan pembayaran jaminan dengan baik dan tepat waktu. Semua hal itu harus didukung dengan peraturan perundangan yang tepat, dan dengan pengembangan kesadaran dan penyuluhan dari program tersebut (yaitu sosialisasi program).

Implementasi tampaknya akan menantang dan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari perkiraan untuk sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun program-program baru itu, sekalipun diterapkan secara kurang optimal, masih merupakan peningkatan yang signifikan dibanding sistem yang ada sekarang dan akan terdapat kesempatan untuk semakin meningkatkan program-program tersebut dan sistem secara keseluruhan dengan berjalannya waktu.

C. Indonesia Tahun 2014 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan



1. Indonesia: Menghadapi Beban Ganda Malnutrisi

Masalah gizi membawa risiko besar terhadap pembangunan Indonesia...

Pendapatan rumah tangga telah meningkat secara signifikan akhir-akhir tahun ini, namun sebagian dengan kesuksesan ini, Indonesia menghadapi sejumlah masalah gizi dengan tingkat kerumitan yang semakin meningkat, yang merupakan topik yang akan dibahas di bagian ini. Dengan satu dari tiga anak-anak usia di bawah lima tahun mengalami hambatan pertumbuhan (lebih pendek daripada yang diharapkan untuk umur mereka), yang tidak hanya mengancam kapasitas angkatan kerja Indonesia, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kecenderungan mereka untuk tumbuh menjadi gemuk dan menderita penyakit kardiovaskular pada usia yang lebih dewasa. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang berkaitan dengan peningkatan urbanisasi memperburuk keadaan, seperti masalah kelebihan nutrisi yang telah mempengaruhi sebagian besar orang dewasa. Tanpa tindakan yang segera dilakukan, untuk mengatasi masalah buruknya gizi bagi ibu hamil dan anak, dan juga menghadapi masalah kelebihan nutrisi pada anak-anak yang lebih dewasa dan orang dewasa, maka prevalensi Penyakit Tidak Menular akan meningkat secara dramatis yang akan sangat merintangi kemajuan ekonomi Indonesia untuk dekade yang akan datang.¹²

¹² Bagian ini merangkum temuan dan rekomendasi kebijakan dari kajian teknis terkini akan masalah BGM di Indonesia (dibiayai oleh *Millenium Challenge Corporation* dengan masukan dari UNICEF), dilakukan oleh Roger Shrimpton (Ahli gizi Internasional) dan Claudia Rokhs (Bank Dunia), dengan kontribusi dari kelompok kerja *Indonesia Scaling Up Nutrition (SUN)*, dan Leslie Elder, Puti Marzoecki, Darren Dorkin, Rebekah Pinto, Eko Pambudi dan Megha Kapoor (Bank Dunia). Makalah Teknis tambahan dalam topik ini tersedia di www.worldbank.org

a. Sifat dan akibat serius dari Beban Ganda Malnutrisi

... termasuk kekurangan dan kelebihan nutrisi

Beban Ganda Malnutrisi (BGM)¹³ merujuk kepada keberadaan kekurangan dan kelebihan gizi dari makronutrisi dan mikronutrisi¹⁴ lintas perjalanan hidup dari populasi, komunitas, keluarga dan bahkan individu yang sama. Yang patut diperhatikan adalah dimensi jalan hidup BGM, atau keterkaitan antara kekurangan gizi ibu hamil dan janin dan peningkatan kerentanan kelebihan nutrisi dan pola makan yang berkaitan dengan penyakit tidak menular pada kemudian hari.

Malnutrisi umumnya dinilai dengan pengukuran berat dan tinggi badan

Kelebihan dan kekurangan gizi biasanya diukur dengan membandingkan tinggi dan berat badan dengan rujukan pola pertumbuhan, dan memberikan pengukuran kecukupan asupan makanan. Kekurangan berat badan merupakan pengukuran kekurangan gizi yang paling umum, namun tidak memperhitungkan tinggi badan, sehingga membatasi penggunaannya sebagai suatu indikator. Hambatan pertumbuhan (kekerdilan) umumnya terjadi karena buruknya pertumbuhan selama masa di dalam kandungan hingga usia dua tahun. Penyusutan adalah pengukuran kecukupan pangan jangka pendek dan dapat dikembalikan, tidak seperti hambatan pertumbuhan. Kekurangan gizi dari mikronutrisi juga merupakan hal yang umum dan juga dapat berkontribusi kepada kegagalan pertumbuhan dan juga disfungsi tubuh lainnya, seperti anemia dalam kekurangan zat besi dan gondok pada kekurangan yodium. Kelebihan gizi umumnya menunjukkan pengukuran bobot tubuh yang terlalu tinggi dan obesitas, yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang lebih banyak dibanding kebutuhan, sehingga terjadi penumpukan lemak tubuh. Obesitas dikenal sebagai penyakit pada orang dewasa dan umumnya diukur dengan Indeks Massa Tubuh (*Body Mass Index*/BMI) yang merupakan berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan.

Indikator	Definisi
Kekurangan berat	Berat kurang dari harapan di usianya
Hambatan pertumbuhan	Tinggi kurang dari harapan di usianya
Penyusutan	Berat kurang dari harapan sesuai tinggi di usianya
Obesitas dan kelebihan berat	Berat lebih dari harapan sesuai tinggi badan di usianya

Kelebihan gizi meningkat lebih cepat dari penurunan kekurangan gizi

BGM adalah masalah global yang mempengaruhi baik negara kaya maupun miskin: 25 persen penduduk dunia menderita kegemukan, sementara 17 persen anak usia pra-sekolah memiliki berat badan yang kurang dan 28,5 persen mengalami hambatan pertumbuhan, 40 persen perempuan usia subur menderita anemia dan sepertiga penduduk dunia masih mengalami kekurangan yodium. Sebagian besar negara-negara berpenghasilan menengah bawah (*lower-middle income countries*/LMICs) diperkirakan menghadapi BGM, dengan tingkat peningkatan kelebihan berat badan yang melaju lebih cepat dibanding penurunan kekurangan berat badan. Sementara tingkat obesitas dunia telah meningkat dua kali lipat pada tiga dekade yang lalu, LMICs mencatat peningkatan tiga kali lipat hanya pada dua dekade.

Hambatan pertumbuhan membahayakan kapasitas, dan juga kesehatan, angkatan kerja yang akan datang

Hambatan pertumbuhan/kekerdilan memiliki konsekuensi yang signifikan dan beragam selama perjalanan hidup. Proses hambatan pertumbuhan yang dimulai dalam kandungan juga menyebabkan kerusakan pada perkembangan otak, dengan pengaruh yang buruk terhadap kecerdasan dan prestasi sekolah bagi anak-anak yang terhambat pertumbuhannya dan juga kinerja kerja orang dewasa yang mengalami hambatan pertumbuhan. Tingkat hambatan pertumbuhan/kekerdilan diakui sebagai salah satu indikator terbaik akan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Selain itu, hambatan pertumbuhan janin menyebabkan “pemrograman metabolisme” dengan pembentukan jaringan lemak tambahan untuk menghadapi lingkungan yang kurang pada kehidupan di luar kandungan. Jika anak-anak yang

¹³ Shrimpton, R. and Roks, C. 2012. The Double Burden of Nutrition: A Review of the Global Evidence. World Bank. Washington. Yang akan datang 2013.

¹⁴ Makronutrisi termasuk karbohidrat, protein dan lemak yang memberikan energi agar tubuh kita bisa berfungsi. Mikronutrisi merupakan zat yang membantu tubuh menghasilkan enzim, hormon dan zat-zat lain yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang benar, dan diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil/sedikit.

mengalami hambatan pertumbuhan menunjukkan laju peningkatan berat badan pada masa kecilnya, maka terdapat peningkatan risiko untuk obesitas dan penyakit tidak menular (*Non-Communicable Diseases/NCD*) lain yang berkaitan dengan pola makan, seperti diabetes Tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (*cardiovascular diseases/CVD*). Karena alasan inilah batasan untuk definisi kelebihan berat badan dan obesitas, yang menjadi dasar risiko terkena CVD, tercatat lebih rendah pada populasi yang mengalami hambatan pertumbuhan di Asia.¹⁵

b. Beban Ganda Malnutrisi adalah masalah yang berat dan mendesak di Indonesia

BGM di Indonesia lebih buruk dibanding negara-negara ASEAN lainnya

Masalah BGM di Indonesia telah sangat diketahui, dengan kekurangan dan kelebihan gizi yang terjadi pada anak-anak usia muda maupun orang dewasa dengan jumlah yang signifikan. Sesungguhnya keadaan BGM di Indonesia merupakan salah satu yang paling buruk di ASEAN (Tabel 8). Dengan sepertiga anak-anak usia balita mengalami hambatan pertumbuhan, Indonesia memiliki tingkat kekerdilan yang lebih tinggi dibanding negara-negara lain yang lebih miskin seperti Vietnam dan Filipina, dan setara dengan negara-negara yang jauh lebih miskin seperti misalnya Myanmar, Kamboja dan Laos. Tingkat penyusutan di Indonesia juga termasuk tinggi, yang hanya di bawah Timor Leste, dan lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lain yang lebih miskin seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Papua Nugini dan Filipina. Namun Indonesia juga memiliki tingkat kelebihan berat badan yang paling tinggi untuk anak-anak usia belianya, lebih buruk dibanding misalnya Malaysia, negara yang memiliki tingkat pendapatan tiga kali lipat dari Indonesia.

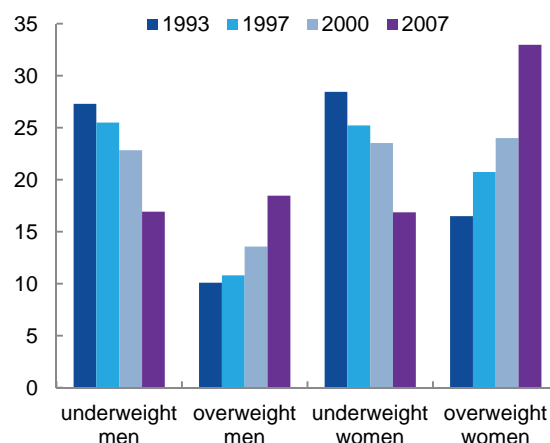
Masalah kelebihan nutrisi pada usia dewasa meningkat hampir dua kali lipat dalam dua dekade terakhir

Walau data tentang gizi selama kehamilan tidaklah selengkap data gizi anak, terdapat bukti bahwa satu dari lima perempuan Indonesia pada usia subur mengalami kegemukan (kelebihan berat badan dan/atau mengalami obesitas berdasarkan BMI >25). Survei Kehidupan Keluarga Indonesia, yang mewakili 85 persen penduduk, menunjukkan bahwa selama jangka waktu 15 tahun, proporsi perempuan dan laki-laki yang langsing menurun cukup besar sementara proporsi mereka yang gemuk meningkat hampir dua kali lipat (Gambar 34).

Biaya finansial BGM di

Indonesia tampaknya akan cukup signifikan. Dalam hal hilangnya produktivitas, perkiraan biaya secara konservatif dari kekurangan gizi pada anak di Asia saja mencapai 2-3 persen dari PDB.¹⁶ Biaya untuk merawat NCD bagi penduduk dewasa yang mengalami kekerdilan akan mahal. Di Afrika Selatan, sebagai contoh, biaya untuk merawat CVD saja telah menghabiskan seperempat belanja kesehatan pada satu dekade yang lalu. NCD kini telah menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, dan sangat tingginya di LMIC, hampir

Gambar 34: Bertumbuhnya proporsi penduduk Indonesia berusia paruh baya yang mengalami kelebihan berat badan (persentase kelebihan dan kekurangan berat badan pada laki-laki dan perempuan berusia di atas 45 tahun)



Sumber: Survei Kehidupan Keluarga Indonesia; lihat Straus dkk (2011), *Indonesian Family Life Survey Results*. Washington: Rand Corporation

¹⁵ WHO 2004. Indeks massa tubuh yang tepat bagi populasi Asia dan implikasinya bagi strategi kebijakan dan intervensi. *Lancet* 363 (9403): 157-63.

¹⁶ Horton S. 1999. Opportunities for investments in nutrition in low-income Asia. *Asian Development Review* 17 (1-2:(246-273)). Lihat juga: Food and Agriculture Organization 2013. *The State of Food and Agriculture*. Rome.

80 persen dari seluruh kematian yang disebabkan oleh NCD. Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) menyatakan bahwa di seluruh dunia NCD akan menghabiskan dana lebih dari 30 triliun dolar AS pada 20 tahun berikut, yang merupakan 48 persen dari PDB dunia pada tahun 2010, dan akan merintang pertumbuhan ekonomi khususnya di LMIC tanpa adanya upaya-upaya mitigasi.¹⁷ BGM di Indonesia tampaknya akan menjadi rintangan besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan turut mengikis pertumbuhan ekonomi, sehingga mengganggu prioritas pertama dari RPJMN 2010-2014.

Tabel 8: Keadaan BGM di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di ASEAN

Negara	Penyusutan Anak (persen)*	Anak Kegemukan (persen)*	Kekerdilan Anak (persen)*	Anemia Kehamilan (persen)**	BMI Wanita <18.5 (persen)**	BMI Wanita >25 (persen)*	GNI per kapita (PPP US\$)*
Kamboja	10,8	1,9	40,9	57,1	20,3	9,6	2.040
Indonesia	13,3	12,2	36,8	-	-	21,4	4.300
Laos	7,0	2,0	44,0	-	14,5	17,0	2.300
Malaysia	-	6,0	17,0	38,3	-	-	14.360
Myanmar	7,9	3,0	35,0	-	-	-	-
Papua Nugini	4,4	3,4	43,9	-	-	-	2.390
Filipina	6,9	3,3	32,0	43,9	14,2	33,0	3.930
Thailand	5,0	8,0	16,0	22,0	6,9	47,3	8.240
Timor Leste	19,9	5,8	57,7	-	37,7	3,1	3.570
Vietnam	4,4	4,6	23,3	32,2	28,3	6,8	2.910

Sumber: *UNICEF *State of the Worlds Children Report 2012* dan **WHO *Nutrition Landscape Information System*

Kelompok miskin lebih besar terkena dampak kegemukan dan kelebihan berat

Walau terdapat bukti yang menunjukkan peningkatan obesitas, kesalahan persepsi atas masalah tersebut cenderung menutupi urgensinya. Sebagai contoh, terdapat anggapan umum pada banyak kalangan bahwa obesitas merupakan penyakit orang kaya saja. Hal itu tidak berlaku di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan bahwa walau kegemukan/obesitas memang meningkat dengan naiknya pendapatan, yang mencapai puncaknya pada 32 persen pada kuintil kekayaan atas, kuintil kekayaan yang lebih rendah juga turut terpengaruh (kira-kira 20 persen). Volume kegemukan yang terbesar terkonsentrasi pada golongan penduduk dengan kekayaan yang lebih rendah, dan terkondisi dengan lingkungan perkotaan yang mendorong gaya hidup obesitas. Penduduk dewasa yang paling miskin dan yang juga paling terhambat pertumbuhannya merupakan pihak yang paling lemah.

Penduduk Indonesia mungkin tidak sehat walaupun tidak nampak “gemuk”

Pandangan lain yang keliru terkait dengan sifat fisik obesitas, yang umumnya identik dengan tambun atau “gemuk”. Kegemukan atau obesitas merupakan masalah yang tidak selalu nyata (*hidden*) di Indonesia, karena mereka yang tidak terlihat gemuk dapat memiliki kandungan lemak yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan pertumbuhan pada 1.000 hari pertama, yang kemudian diikuti dengan percepatan pertumbuhan pada usia kanak-kanak yang didukung oleh gaya hidup perkotaan. Selain itu, bagi penduduk Indonesia, risiko kesehatan yang berkaitan dengan kelebihan lemak tubuh – baik terlihat maupun tidak – dimulai dengan lebih rendahnya BMI dibanding bahkan bagian lain di Asia, dan tentu saja lebih rendah dari standar internasional.¹⁸ Kenyataan bahwa kelebihan lemak ini tidak selalu terlihat turut membantu peremehan urgensi masalah ini pada penduduk daerah perkotaan yang semakin banyak malas bergerak.

¹⁷ Bloom, D.E., Cafiero, E.T., Jane-Llopis, E., Abraham-Gessel, S., Bloom, L.R., Fathima, S., Feigl, A.B., Gaziano, T., Mowafi, M., Pandya, A., Prettnner, K., Rosenberg, L., Seligman, B., Stein, A.Z., & Weinstein, C. 2011. World Economic Forum. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva.

¹⁸ Soegondo S. 2005. Antherogenic dyslipidaemia and metabolic syndrome. *Acta Med Indonesia* 37(3):177-183; and WHO 2004.

c. Memahami penyebab BGM di Indonesia

Penyebab BGM terbagi ke dalam empat kelompok tematik

Sementara penyebab BGM lintas perjalanan hidup orang bersifat rumit, suatu cara yang berguna untuk menganalisis BGM di Indonesia adalah menggunakan pemetaan sistem obesitas yang dirancang oleh Foresight Project dari Inggris, yang mengelompokkan lebih dari 100 variabel dalam empat bidang tematik: lingkungan kesehatan dan biologis; lingkungan ekonomi dan pangan; lingkungan fisik dan badan; lingkungan sosial budaya.

Lingkungan kesehatan dan biologis: NCD telah menjadi penyebab utama kematian

Indonesia sedang berada dalam transisi demografi. Tingkat kematian karena penyakit menular telah menurun, sepertinya disebabkan oleh kebijakan kesehatan yang diambil pada tahun 80 dan 90an yang meningkatkan belanja sehingga meningkatkan distribusi pusat kesehatan diseluruh negara. Usia harapan hidup telah meningkat dan kini NCD menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian di Indonesia, dengan CVD sebagai penyebab utama kematian (30 persen dari seluruh kematian NCD, yang diikuti oleh kanker, penyakit obstruktif paru-paru yang kronis dan diabetes).

Sistem kesehatan memiliki kapasitas yang rendah untuk mendukung program gizi

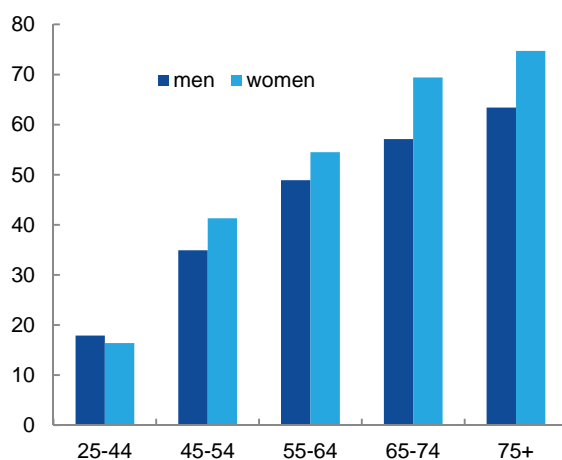
Prasarana kesehatan masih tidak mencukupi dalam banyak hal. Cakupan sanitasi masih mencatat laju perluasan yang lambat, dan parasit saluran pencernaan masih merupakan hal yang sangat umum. Sistem kesehatan juga tidak mampu untuk melakukan intervensi gizi secara memadai, sebagian karena kurangnya pelatihan pekerja kesehatan tentang hal gizi dan rendahnya persepsi hambatan pertumbuhan dan obesitas/kegemukan sebagai suatu masalah, atau dalam kaitannya dengan NCD. Hanya sedikit pusat kesehatan yang mengukur status gizi secara rutin, dan sebagian besar tidak memiliki alat pengukuran yang dibutuhkan. Komitmen Indonesia yang kuat untuk mencapai cakupan kesehatan umum (UHC) bagi penduduknya, namun bersama dengan peluncuran inisiatif peningkatan gizi, memberikan kesempatan yang sangat bagus untuk memperbaiki gizi.

Tekanan darah yang tinggi dan diabetes sangat umum dijumpai pada orang dewasa

Data survei menunjukkan peningkatan faktor-faktor risiko yang menjadi dasar pendorong CVD. Survei Riskesdas tahun 2007 menemukan bahwa satu dari sepuluh laki-laki dan dua dari sepuluh perempuan berusia di atas 45 tahun memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Diabetes juga mempengaruhi 6 persen dari penduduk dewasa, dan 19 persen menderita pra-diabetes. Survei Kehidupan Keluarga menemukan prevalensi hipertensi yang tinggi, yang lebih buruk pada perempuan dan meningkat sesuai usia, sedemikian besar pengaruhnya hingga sekitar setengah dari orang dewasa berusia 45 tahun turut terpengaruh (Gambar 35). Dua per tiga dari responden tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit itu, dan 90 persen tidak mendapat perawatan kesehatan.

Gambar 35: Hipertensi adalah masalah yang signifikan pada penduduk dewasa Indonesia...

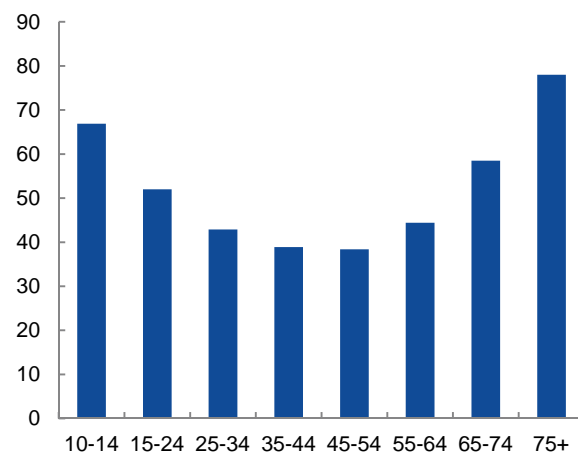
(hipertensi per kelompok umur, persen)



Sumber: Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2007

Gambar 36: ...dan sebagian besar penduduk Indonesia tidak berolahraga cukup

(kurangnya kegiatan fisik per kelompok umur, persen)



Sumber: Survei Riskesdas 2007

Lingkungan ekonomi dan pangan menunjukkan penurunan kemiskinan dan peningkatan pola diet negara Barat	Peningkatan kekayaan nasional di Indonesia diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketersediaan pangan sebagai energi per kapita, umumnya berupa dua kali peningkatan konsumsi lemak. Pada empat dekade terakhir, ketersediaan beras umumnya bertahan tetap stabil, sementara energi yang berasal dari daging dan ikan meningkat dua kali lipat, dari susu meningkat tiga kali lipat, dan dari gandum naik tujuh kali lipat. Secara bersamaan, peningkatan perdagangan pangan dunia telah mendorong peningkatan impor bahan pangan yang telah terproses di LMIC, yang umumnya beredar melalui jaringan pasar swalayan dan perusahaan-perusahaan rumah makan siap saji multinasional. Daerah perkotaan pada khususnya mencatat pengaruh yang besar dari gerai-gerai komersial baru tersebut.
Buruknya praktek pemberian makanan kepada bayi berkontribusi kepada kelebihan dan kekurangan gizi	Terdapat sejumlah bukti yang meningkat bahwa pola konsumsi makanan pada usia dini akan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pada usia selanjutnya. Sayangnya praktik pemberian makanan kepada bayi dan balita di Indonesia jauh dari mencukupi dan berkontribusi kepada kekurangan gizi pada usia belia dan peningkatan risiko kelebihan gizi pada usia yang lebih dewasa. Pola yang berbahaya itu termasuk penurunan tingkat pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan pemberian makanan pelengkap yang terlalu dini. Hanya 15 persen bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan seperti laporan tahun 2010 – setengah dari 32 persen yang dilaporkan pada 2007 dan lebih rendah dari 40 persen yang dilaporkan pada 2002. Penggunaan pengganti ASI masih umum digalakkan di pusat kesehatan, kepada tenaga profesional di bidang medis, dan juga kepada para ibu.
Konsumsi pangan keluarga mencatat lebih banyak peningkatan dalam kuantitas dibanding kualitas	Pola konsumsi pangan pada usia selanjutnya lebih sulit untuk dievaluasi, tetapi terdapat data yang menunjukkan peningkatan dalam asupan pangan, terutama dari daging, ikan, telur dan makanan olahan. Konsumsi sayur dan buah bertahan tetap rendah. Indonesia adalah negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia, dengan konsumsi yang mendekati 13,7 miliar bungkus pada tahun 2008, sehingga konsumsi tepung terigu meningkat menjadi 52g per orang pada 2008, membuat Indonesia sebagai salah satu dari lima negara pengekspor gandum terbesar di dunia.
Peningkatan konsumsi makanan olahan tampaknya berkontribusi kepada kelebihan gizi	Peningkatan konsumsi makanan olahan tampaknya berkontribusi pada masalah obesitas di Indonesia seperti juga di seluruh dunia. Makanan olahan merupakan makanan yang padat energi dan penuh dengan pangan olahan, gula dan lemak, dan juga dikenal sebagai pilihan dengan biaya termurah bagi konsumen. Mereka juga membangkitkan tingginya tingkat glukosa yang berkepanjangan pada darah setelah konsumsi, sehingga berkontribusi kepada akumulasi tambahan lemak tubuh secara bertahap. Makanan olahan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia adalah mie instan yang dibuat dari tepung terigu dan digoreng dengan minyak kelapa sawit.
Lingkungan fisik semakin mendukung penyebab obesitas	Pengamatan akan lingkungan fisik Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan daerah perkotaan relatif tidak bersahabat bagi kegiatan fisik pejalan kaki. Dengan terbatasnya ketersediaan makanan yang sehat di kebanyakan lingkungan perkotaan, sehingga mereka yang berpergian ke dan kembali dari sekolah dan tempat kerja tidak memiliki banyak pilihan selain makanan siap saji di luar rumah. Saat ini, dan terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang masalah BGM, sekolah-sekolah belum menjadi tempat untuk mencegah obesitas anak. Perencanaan daerah perkotaan dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pilihan bagi kegiatan fisik pejalan kaki karena sebagian besar penduduk tidak cukup banyak berolahraga untuk mencegah CVD (Gambar 36). Data survei Riskesdas tahun 2007 menunjukkan anak-anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang paling tidak aktif bergerak.
Lingkungan sosial budaya semakin mendukung obesitas	Indonesia terus menjaga budaya tradisionalnya namun juga membenamkan dirinya ke dalam berbagai jenis media modern. Adat-istiadat tradisional mempengaruhi kekurangan gizi pada waktu anak dalam kandungan dan usia dini, dan norma-norma sosial mendorong sebagian besar perempuan untuk menikah pada waktu usia muda: 25 persen dari seluruh perempuan dalam usia subur menikah sebelum usia 18 tahun, dan 10 persen sebelum usia 16 tahun. Umur ibu pada kelahiran pertama menjadi korelasi utama hasil kesehatan anak, dimana risiko perlambatan pertumbuhan, diare, dan anemia bisa dihilangkan secara signifikan ketika

perempuna menunda kelahiran yang pertama hingga umur 27-29 tahun, terlepas dari status sosial ekonomi.¹⁹ Selain itu, anak-anak menonton televisi sekitar 4 jam setiap hari, dan iklan-iklan makanan olahan mendominasi media, dengan sebagian iklan ditujukan kepada anak-anak. Mayoritas orangtua melaporkan bahwa pembelian mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan anak-anak dibanding iklan, yang menunjukkan kebutuhan untuk membatasi pengaruh eksternal tersebut, seperti direkomendasikan oleh Dewan Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*).

d. Mengatasi BGM di Indonesia

Dibutuhkan kerangka kebijakan yang menyeluruh

Tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memperkuat tanggapan terhadap masalah-masalah gizi telah ditetapkan dan diakui menurut pergerakan Peningkatan Gizi (*Scaling Up Nutrition/SUN*), dengan ikut bergabungnya Indonesia pada bulan September 2012 bersama dengan 39 negara lainnya. Indonesia juga memiliki peranan yang kuat dalam gerakan kelompok pemimpin. Menekankan kepada kekurangan gizi kehamilan dan anak, Pemerintah sedang mengembangkan kerangka kebijakan SUN dan pedoman perencanaannya. Indonesia seharusnya menyusun kerangka SUN dengan mempertimbangkan cara untuk meningkatkan tanggapannya terhadap masalah BGM dalam perjalanan hidup masyarakat. Kerangka kebijakan BGM yang menyeluruh dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian pada empat pilar kebijakan: ketahanan pangan, keamanan pangan, gaya hidup sehat dan gizi. Sebagian besar fokus bidang tersebut telah tercakup di dalam landasan SUN yang diselenggarakan oleh Menko Kesra. Sejumlah kebijakan dan strategi tersebut telah dipertimbangkan di dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 yang disusun oleh Bappenas. Selain itu, dengan penyusunan Rencana untuk 2016-2020, unsur-unsur lain di dalam kerangka itu juga sedang dipertimbangkan.

Intervensi yang ada perlu ditingkatkan, sambil mengatasi kesenjangan

Sebagian besar intervensi yang dibutuhkan telah diterapkan di Indonesia dan komitmen kuat yang mendasari Rencana Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan umum dan Gerakan SUN mendasari kerja dasar untuk perbaikan gizi ke depannya. Walaupun sudah ada kemajuan dalam sejumlah bidang, tapi masih terdapat kesenjangan pada bidang lain. Sebagai contoh, implementasi intervensi langsung pada usia dini, terutama ASI, masih perlu ditingkatkan. Serupa dengan itu, walau terdapat kemajuan pada fortifikasi bahan pangan dengan adanya nutrisi mikro, anemia kehamilan masih membutuhkan perhatian. Akhirnya, program-program kesejahteraan sosial telah membantu menjamin ketahanan pangan bagi kaum termiskin dari yang miskin, namun masih dibutuhkan penekanan yang lebih besar terhadap kualitas dan kuantitas bahan pangan. Sekolah-sekolah merupakan tempat yang sangat penting untuk mendorong gaya hidup sehat yang akan membantu memitigasi pengaruh BGM, namun belum sepenuhnya digunakan bagi kepentingan ini. Para pekerja profesional dalam bidang kesehatan membutuhkan pelatihan yang lebih baik dalam hal gizi, sehingga hambatan pertumbuhan akan dipandang sebagai masalah dan kegemukan/obesitas diakui sebagai masalah untuk dicegah dan tidak hanya diobati.

¹⁹ Finlay JE, Ozaltin E, Canning D. 2011. The association of maternal age with infant mortality, child anthropometric failure, diarrhoea and anaemia for the first births: evidence from 55 low-and middle-income countries. *BMJ Open* 2: e000226.

2. Reformasi birokrasi di Indonesia: kemajuan dan tantangan

Indonesia telah mencanangkan proses reformasi birokrasi yang ambisius yang dimulai pada tahun 2006

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan jumlah kurang lebih 4,7 juta orang. Namun demikian, pelayan publik yang diberikan masih belum sebanding dengan jumlah PNS yang ada. Untuk menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan secara resmi perubahan yang lebih mendasar, yang dikenal dengan nama Reformasi Birokrasi (RB), yang dimulai oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2006. Tujuan reformasi tersebut adalah untuk menyederhanakan proses bisnis, memperbaiki kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia dan menurunkan korupsi pada Kementerian Keuangan. Sejak saat itu, agenda RB telah di perluas di kementerian dan institusi pemerintahan lainnya. Pada 2012, sekitar 56 kementerian dan lembaga (K/L) terlibat dalam RB, yang akan diperluas ke 22 K/L lainnya di 2013 dan 2014.

Ciri utama dari reformasi ini adalah penambahan tunjangan berdasarkan analisis dan tingkatan pekerjaan

Salah satu ciri utama dari konsep RB, seperti dirancang oleh Kemenkeu, adalah pemberian tambahan tunjangan RB yang dikaitkan kepada jenis pekerjaan. Evaluasi jabatan dilaksanakan dan deskripsi pekerjaan baru disusun, sesuai dengan kerumitan, cakupan dan pertanggungjawaban pekerjaan tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditetapkan tunjangan dengan jumlah yang beraneka ragam bagi setiap pekerjaan. Bagian ini akan mereview prakarsa tunjangan RB dan bukti-bukti akan dampak tunjangan RB terhadap kinerja. Bagian ini juga akan membahas prioritas reformasi birokrasi yang sedang berjalan, khususnya pentingnya restrukturisasi dan perampingan (*right-sizing*).

a. Dampak reformasi birokrasi

Tunjangan RB telah membawa perbaikan dalam praktik SDM...

Sementara tunjangan RB telah meningkatkan biaya atas gaji pada lembaga-lembaga yang turut serta dalam program RB, evaluasi independen, seperti Survei Integritas Sektor Publik tahunan yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan bahwa RB juga membawa dampak positif pada Kemenkeu, termasuk peningkatan proses penerimaan pegawai, dengan memastikan bahwa pegawai yang diterima memang memiliki kualifikasi yang tepat. RB juga mensyaratkan pembentukan *Assessment Center* untuk menilai kompetensi pegawai yang ada dan potensi promosi jabatan. Pelatihan menjadi lebih terfokus secara teknis. Hasil lain termasuk peningkatan evaluasi kinerja dari para satuan unit dan individu, misalnya menggunakan metodologi *Balanced Scorecard*. Praktik SDM modern tersebut berarti bahwa RB mendukung profesionalisasi pegawai negeri yang dibutuhkan pada lembaga-lembaga utama.

...seperti ditunjukkan oleh survei penghasilan dan kinerja terbaru

Hasil yang positif tersebut terlihat dengan jelas pada survei penghasilan dan kinerja yang dilakukan oleh MenPAN-RB dan Bank Dunia. Survei itu dilakukan pada tahun 2012 dan melibatkan 4.000 PNS²⁰, yang berasal dari empat belas Kementerian dan Lembaga Negara yang terbagi ke dalam empat kelompok: (1) mereka yang telah menerima tunjangan RB; (2) mereka yang telah memperoleh persetujuan untuk menerima tunjangan RB; (3) mereka yang baru mengajukan permohonan untuk program RB; dan (4) mereka yang belum mengajukan permohonan bagi program RB. Tujuan survei itu adalah untuk menilai kemajuan pencapaian Reformasi Birokrasi hingga saat itu.

...menunjukkan K/L yang mengikuti RB memiliki sistem perekrutan dan promosi yang lebih baik

Survei tersebut menunjukkan bahwa pegawai K/L yang telah menjalankan reformasi birokrasi lebih cenderung untuk menyatakan bahwa kolega mereka memberikan kontribusi yang lebih besar dari yang diharapkan (Tabel 9). Keputusan peraturan dan promosi jabatan pada K/L yang telah menjalankan RB tampaknya memiliki kemungkinan yang lebih kecil bagi hal yang tidak terduga dan bagi sikap pilih kasih. Selain itu, pegawai yang disurvei menyatakan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara dengan RB lebih mampu menemukan calon terbaik untuk suatu pekerjaan dan menyaring pegawai berkualitas tinggi secara lebih mudah.

²⁰ Pegawai berpangkat lebih rendah dalam konteks ini adalah PNS yang dikategorikan sebagai pegawai yang memiliki pangkat/golongan IVA, IIID dan IIIA. Mereka yang berpangkat/golongan eselon 4 telah bekerja kurang lebih 8 tahun, sedangkan golongan III telah bekerja sekitar 8 – 13 tahun.

Tabel 9: Terdapat bukti survei akan kinerja SDM yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang turut serta dalam reformasi birokrasi

Status reformasi birokrasi	Yang lain berkontribusi lebih dari yang diharapkan darinya	Promosi dalam K/L memenuhi kualifikasi formal	Rekrutmen menemukan calon terbaik bagi posisi pekerjaan	K/L merekrut pegawai berkualitas dengan mudah
	Persentase proporsi responden yang setuju atau sangat setuju			
Telah menerima tunjangan RB	64	91	88	77
Tunjangan RB disetujui, belum diterima	48	80	81	61
Mengajukan permohonan tunjangan RB	42	61	63	45
Belum mengajukan permohonan tunjangan RB	41	62	66	52

Sumber: Reformasi Penggajian Pegawai Negeri Indonesia: Masalah dan Pilihan Utama bagi Reformasi (Hasnain, dkk., 2013)

b. Keberlanjutan reformasi birokrasi

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan terkait reformasi birokrasi ...

Reformasi Birokrasi saat ini telah mencakup aspek reformasi yang sangat luas bila dibandingkan dengan reformasi yang pertama kali dilaksanakan oleh Kemenkeu, terutama reformasi di kantor – kantor cabang dan pelayanan Kemenkeu di daerah, seperti yang dimiliki oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan. Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan MenPAN-RB menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akuntabilitas kementerian dan lembaga di tingkat pusat (LAKIP), yang semula 83 persen pada 2011 naik menjadi 95 persen pada 2012.²¹ Lebih lanjut, lembaga tingkat pusat yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya dari BPK juga meningkat, dari angka 63 persen pada 2011 menjadi 77 persen pada 2012.

...tetapi usaha berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan gaji pegawai negeri...

Walau reformasi birokrasi telah mencatat kemajuan yang signifikan, masih dibutuhkan upaya lanjutan untuk meningkatkan produktivitas sementara memastikan bahwa belanja untuk gaji pegawai negeri tetap terjamin. Hal ini sangat penting dalam peluncuran RB ke tingkat nasional sejak tahun 2008, dan ke tingkat daerah pada tahun 2013. Selain itu, penajagan keberlanjutan reformasi itu sendiri juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan di Indonesia, membangun di atas implementasi RB yang sedang berjalan pada tingkat kelembagaan, dan juga mencakup modernisasi kebijakan-kebijakan nasional. Secara khusus, selain Reformasi Manajemen Belanja Pegawai dan Reformasi Peringkat Jabatan dan Gaji,²² terdapat tiga bidang prioritas lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.

.. termasuk modernisasi organisasi dan right-sizing...

Pertama, peningkatan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian, rancangan organisasi, ketenagakerjaan dan perampingan dapat bersifat efektif. Kurangnya fleksibilitas karena peraturan nasional dan proses pemeriksaan, berdasarkan pada peraturan MenPAN-RB yang belum direformasi tentang susunan organisasi dan pegawai, kini membatasi cakupan restrukturisasi dan reformasi. Guna reformasi pengendalian pendirian dan modernisasi restrukturisasi organisasi dan kebijakan right-sizing (ukuran yang sesuai/perampingan) adalah membuat anggaran personil menjadi bagian dari anggaran kegiatan atau sub-program, dan membuat manajer anggaran untuk bertanggung jawab atas hal – hal yang terkait dengan personalia dan atas belanja kepegawaian. Hal ini akan memberikan pengendalian yang lebih baik atas ukuran dan biaya pelayanan sipil, dan bagi fleksibilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan nilai yang lebih baik untuk dana yang dikeluarkan. Secara khusus, akan dibutuhkan kebijakan dan mekanisme bagi perampingan untuk menghasilkan dampak.

²¹ Berdasarkan temuan-temuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

²² Diuraikan pada *IEQ* edisi Oktober 2012 Bank Dunia.

...reformasi kerangka peraturan nasional...

Kedua, reformasi kerangka peraturan nasional dan penetapan kelembagaan pusat bagi penyusunan kebijakan, peraturan dan pengelolaan pelayanan sipil. Gunanya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas pada tingkat kelembagaan dan untuk memodernisasi dan memperkuat kapasitas bagi penyusunan kebijakan pelayanan sipil pusat yang berkaitan, dan pada saat yang bersamaan memindahkan tanggung jawab bagi implementasi peraturan dan kebijakan pelayanan sipil kepada lembaga-lembaga pelaksananya. Akhirnya, pemerintah pusat (MenPAN-RB, BKN) harus menyediakan kebijakan, memberikan panduan dan memantau implementasi, namun implementasinya harus menjadi tanggung jawab pihak kementerian dan lembaga itu sendiri.

...dan reformasi pensiun dan THT PNS

Bidang prioritas ketiga adalah reformasi pensiun dan THT (Tabungan Hari Tua)²³. Sasaran pada bidang ini adalah memodernisasi kebijakan pensiun yang ada dengan memindahkannya dari sistem sekarang yang sudah usang ke sistem yang modern, manfaat pasti dengan sistem pembayaran sesuai kebutuhan. Proses reformasi tersebut harus melibatkan keadilan dan berbasis ekuitas dari analisis yang cermat dan dengan pengaturan peralihan yang memadai.

Restrukturisasi dan right-sizing merupakan prioritas bagi Pemerintah dalam jangka pendek...

Prakarsa restrukturisasi dan right-sizing menjadi prioritas bagi pemimpin yang berwenang dalam reformasi birokrasi, MenPAN-RB, hingga berakhirnya masa pemerintahan sekarang. MenPAN-RB telah meminta enambelas kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan tinjauan internal untuk meringkas struktur keorganisasian mereka. Seluruh kementerian dan lembaga yang terpilih akan menyerahkan rencana restrukturisasi/perampingannya pada bulan September 2013 sesuai perintah dari Wakil Presiden. Dalam hal ini MenPAN-RB menunggu bagaimana kementerian/lembaga negara dapat menurunkan jumlah dan susunan eselon I dan II di dalam organisasi mereka.²⁴ Beralih ke agenda reformasi untuk jangka waktu yang lebih panjang, MenPAN-RB memiliki rencana untuk menerbitkan buku putih baru tentang struktur organisasi Pemerintah, bersama-sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara, bagi pemerintahan berikut.

c. Restrukturisasi dan right-sizing di dalam Pemerintah Indonesia**Restrukturisasi lembaga-lembaga pemerintah menghadapi kendala peraturan dan operasi**

Restrukturisasi pada badan-badan Indonesia menghadapi kendala peraturan dan operasional yang khusus. Kerangka peraturan pegawai negeri yang berlaku, berdasarkan UU No 8/1974 (diamandemen oleh UU No 43/1999), merupakan kodifikasi dari konsep pegawai negeri Orde Baru dengan pendekatan yang sentralistik dan sangat terinci, yang terinspirasi oleh praktik militer yang kaku bagi para kementerian dan lembaga negara. Prinsip utamanya adalah "one size fits all atau satu pengaturan cocok untuk semua".

Banyak lembaga terkendala oleh terpecahnya tugas-tugas dan pengambilan keputusan, dan juga redundansi dan kelebihan pegawai

Di dalam sistem ini, susunan organisasi layanan sipil dan penetapan pegawai adalah berdasarkan pertimbangan simetris dan bukan operasional, dengan penekanan kepada perimbangan jumlah unit dan sub-unit dan sejumlah posisi pada setiap tingkatan, dan bukan berdasar akan apa yang dibutuhkan secara operasional. Karenanya, badan-badan negara menanggung masalah fragmentasi atas tugas-tugas dan juga kewenangan pengambilan keputusan, karena hal-hal itu terbagi kepada sejumlah besar sub-unit yang telah ditentukan sebelumnya. Akibat lain dari peraturan yang berjalan adalah kelebihan pegawai pada sebagian besar lembaga, yang menunjukkan redundansi secara kuantitatif (jumlah unit dan sub-unit yang terlalu banyak dan terlalu banyak jabatan) dan kualitatif (petugas dengan kualifikasi yang tidak tepat).

²³ Program pensiun pegawai negeri dan Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan program-program pensiun yang berdiri sendiri, yang memberikan tunjangan hanya kepada pegawai negeri dan berbeda dari program pendapatan pensiun yang mencakup segmen-segmen lain dari angkatan kerja. Program-program pensiun dan THT disponsori oleh pemerintah dan dikelola oleh PT Taspen, suatu BUMN yang dibentuk untuk tugas tunggal tersebut.

²⁴ Lihat "Perampingan Layanan Sipil Indonesia: Kesempatan dan Kendala", yang memberikan analisis komparatif tentang topik tersebut.

Perlunya perampingan di dorong oleh mempertahankan kebutuhan staf untuk peningkatan pelayanan sipil

Selain pentingnya restrukturisasi, terdapat dua pendorong utama lain bagi perampingan. Pertama, tunjangan RB akan membawa dampak fiskal yang signifikan. Belanja pegawai bertumbuh dengan cepat dibandingkan dengan kategori belanja yang lain, didorong oleh peraturan pemerintah terkait penggajian dan juga kurang jelas dan transparannya produktivitas yang dihasilkan serta oleh tunjangan RB²⁵. Masalah ini secara parsial dapat dipecahkan dengan pengurangan pegawai. Kedua, terdapat jumlah pegawai negeri dengan prestasi kerja yang rendah yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memberikan layanan yang ditingkatkan yang sedang dikerjakan oleh RB, yang mana perampingan dapat menjadi strategi akhir yang dapat diterima secara sosial maupun politis.

... yang membutuhkan definisi organisasi, penghentian pegawai dan penerimaan pegawai baru

Perampingan yang berhasil membutuhkan proses transisi yang efisien dan efektif dari susunan “sebagaimana adanya saat ini” menjadi susunan “yang akan menjadi” atau “perampingan ke ukuran yang tepat”. Terdapat tiga proses dasar: mendefinisikan struktur organisasi yang baru, tingkat pekerjaan dan kepangkatan; memberhentikan pegawai yang tidak memiliki tempat pada susunan yang baru; dan mengangkat pegawai dan mereka yang baru diterima ke dalam jabatan-jabatan di dalam struktur yang baru.

d. Menyederhanakan lembaga pemerintah

Penyederhanaan pemerintahan mungkin saja, khususnya melalui pensiun...

Terdapat sejumlah “jendela” hukum dan peraturan perundangan untuk pemberhentian pegawai yang berlebihan. UU pokok kepegawaian (Pasal 23, UU No 43/1999) memperkenankan pemberhentian karena “perampingan organisasi pemerintah” – namun tampaknya terdapat keengganan untuk menggunakan peraturan ini, dan sejumlah ketidakpastian tentang pelaksanaannya, karena peraturan pelaksanaannya masih belum dijumpai. Pilihan yang lebih memungkinkan adalah pensiun – baik dengan batas usia pensiun normal pada usia 56 tahun, atau menggunakan aturan bagi pensiun dini yaitu usia setidaknya 50 tahun dengan masa kerja setidaknya 20 tahun (UU Pensiun No 11/1969).

... tetapi kebergantungan pada pensiun dini akan membebani pensiun pegawai negeri

Terdapat sejumlah kendala bagi keberhasilan pemberhentian kelebihan pegawai yang efektif secara biaya. Kebergantungan kepada pensiun dini akan memberi beban tambahan yang cukup besar kepada dana pensiun pegawai negeri, yang sebetulnya juga siap untuk menerima reformasi mendasar. Sementara biaya pensiun masa depan pada usia pensiun normal pada 56 atau 60 tahun seharusnya telah disertakan ke dalam perhitungan model reformasi pensiun, tambahan yang signifikan dari pensiun dini pada usia 50 tahun (yang memang jarang dijumpai) belum disertakan. Sementara pembiayaan untuk tambahan investasi ini menimbulkan suatu tantangan, penting untuk dicatat bahwa tambahan ini hanyalah peningkatan kewajiban pensiun satu kali saja, dan bukan merupakan rencana peningkatan biaya secara terus menerus.

Dibutuhkan pengembangan panduan pesangon untuk seluruh lembaga

Tanpa panduan dari MenPAN-RB tentang penyusunan program-program pesangon, terdapat risiko bahwa skema yang khusus bagi suatu lembaga akan menyebar, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Demi kepentingan politis dan ekuitas akan beralasan bahwa pegawai negeri dapat mengharapkan setidaknya paket pesangon yang baik seperti tawaran terbaik yang pernah diberikan sebelumnya – sehingga dinamika “leveling up” yang mahal tampaknya akan terjadi tanpa adanya standar yang berlaku bagi Pemerintah secara keseluruhan. Pengaturan pada tingkat Kementerian juga rentan akan bahaya moral, karena perancang aturan akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para calon penerima pesangon dan dapat tergoda untuk memilih pengaturan yang lebih mahal (“jabat tangan emas”), dibanding penggunaan alternatif pensiun berdasarkan umur dengan biaya yang lebih murah.

Masalah ‘diterima bekerja kembali (revolving door)’ dapat di hindari dengan

Walau dengan kerangka peraturan yang rinci dan tidak fleksibel untuk menentukan struktur organisasi dan bagi perencanaan tenaga kerja, kepegawaian negeri Indonesia tidak memiliki pengendalian yang efektif untuk mencegah masalah “diterima bekerja kembali (revolving doors)”. Dengan peningkatan fokus atas kualitas belanja, Pemerintah saat ini memberikan

²⁵ Untuk mengetahui lebih lanjut terkait topic ini, lihat IEQ edisi Oktober 2012

memperkenalkan insentif untuk menurunkan jumlah pegawai

perhatian lebih kepada keefektifan dari operasinya dan kepada apakah pembelanjannya dilakukan secara lebih efisien (*least cost*). Fokus atas *reviu* pembelanjaan akan berbeda – berbeda namun bisa saja *reviu* dimaksud akan melihat apakah kementerian dan lembaga memiliki jumlah dan bauran staf yang tepat untuk mengerjakan tugas yang harus diemban – dengan kemungkinan opsi perampingan. Kecuali kalau memang ada kontrol yang ketat atas jumlah staf – idealnya dengan sistem SDM berdasarkan posisi yang mampu mengintegrasikan masalah struktur, fungsi khusus dan staff – kemungkinan besar “*revolving doors*” akan menghalangi usaha – usaha pengurangan pegawai..

e. Pengangkatan pegawai untuk struktur baru

Secara internasional, tren mengarah menuju sistem pengangkatan dan promosi yang terbuka dan berdasarkan prestasi

Tren internasional bergeser kepada sistem pengangkatan dan promosi pegawai yang terbuka dan berdasarkan prestasi, namun hal ini masih menemui keterbatasan yang signifikan di Indonesia. Badan-badan negara memiliki tingkat delegasi kewenangan yang tinggi untuk mengisi jabatan dengan pegawai mereka sendiri. Namun untuk hal ini berlaku pembatasan pada jabatan-jabatan tertentu untuk kepangkatan tertentu²⁶, sehingga terdapat kemungkinan adanya halangan bagi pegawai terbaik untuk diangkat bagi jabatan tersebut.²⁷ Sesungguhnya PNS bekerja di dalam sistem yang tertutup, dengan penerimaan pegawai dari luar hanya diperkenankan pada pangkat pemula. Sementara penerimaan dari luar kepegawaian negeri ke pangkat yang lebih tinggi tidak diperkenankan (Pasal 12 UU No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 12), pemindahan antar lembaga negara dapat dilakukan, walaupun sistem pelaksanaannya masih belum jelas; tidak ada pasar internal untuk penerimaan dan pemindahan antar kepegawaian negeri. Adanya pasar seperti itu akan memungkinkan pegawai negeri dengan kualifikasi yang tepat dan keterampilan yang sesuai untuk merespon insentif yang ada saat ini berupa tunjangan kinerja yang berbeda-beda, atau berupa penempatan pada lintas Badan atau Lembaga Negara.

f. Kendala dan pilihan reformasi bagi *right-sizing*

Restrukturisasi dan perampingan menghadapi sejumlah kendala dalam bidang hukum, peraturan dan kapasitas

Seperti dijelaskan pada pembahasan di atas, sejumlah kendala dalam bidang hukum, peraturan dan kemampuan merintangi implementasi proses perampingan utama secara efektif pada kepegawaian negeri Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan bagi reformasi lanjutan yang dibangun di atas kemajuan signifikan yang telah dicapai, seperti penggunaan tunjangan jabatan khusus, yang telah digunakan di dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Sejumlah unsur-unsur utama, seperti yang dibahas pada catatan ini, dapat dilihat pada Tabel 10, bersama-sama dengan usulan reformasi tingkat tinggi. Keberlanjutan kemajuan pada bidang ini sebagian akan bergantung pada penetapan RUU Aparatur Sipil Negara yang kini masih dalam tahap penyusunan.

²⁶ Sebagai contoh, jabatan Eselon II hanya dapat diisi oleh pegawai dengan pangkat 4B ke atas

²⁷ Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/200 tentang Pengangkatan PNS Di Dalam Jabatan Struktural seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Kepala BKN No. 13/2002

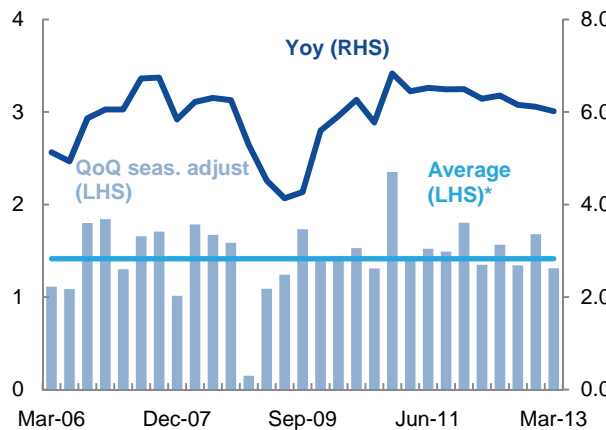
Tabel 10: Kendala terpilih terhadap restrukturisasi dan perampingan dan pilihan reformasi tingkat tinggi

Kendala	Pilihan reformasi
Lembaga/badan tidak memiliki arah yang jelas untuk restrukturisasi dan proses-proses yang berkaitan	Memperluas Pedoman RB dengan menyertakan fokus yang jelas atas dasar pemikiran dan metodologi untuk diikuti; meningkatkan peran BPK dalam meninjau dan memberi usulan kepada Badan tentang struktur organisasi yang efisien secara biaya
Badan-badan tidak berwenang untuk menentukan susunan dan pekerjaannya	Mengganti pengendalian terpusat akan susunan dengan pedoman praktik yang baik, bersama dengan pengendalian fiskal yang sesuai
Persetujuan usulan restrukturisasi K/L dan persyaratan SDM dapat lambat dan tidak pasti	Memperkuat kemampuan SDM MenPAN-RB untuk menyetujui susunan dan persyaratan kerja dengan cepat, dan menggunakan proses persetujuan gabungan yang tunggal, yang hanya membutuhkan persetujuan bagi jaminan efisiensi dan kualitas
Sistem dan insentif yang lemah bagi para Badan untuk mengembangkan dan memelihara susunan yang efisien; risiko "diterima bekerja kembali"	Memperkenalkan insentif fiskal seperti penyimpanan bagian gaji oleh para Badan Negara; menyusun sistem pengendalian dan manajemen kepegawaian berdasar jabatan untuk menghindari "kelebihan penerimaan" dan penerimaan kembali pegawai yang tidak efisien
Tidak adanya pedoman untuk pilihan dan prosedur pesangon	Menyusun pedoman praktik terbaik bagi para Badan untuk pemberian pesangon pada pegawai yang akan menerimanya
Tidak jelasnya aturan tentang pemberhentian wajib pegawai negeri ketika dibutuhkan	Hal yang sensitif secara politis dan menunggu klarifikasi dari RUU Aparatur Sipil Negara
Aturan pensiun dini sesuai skema pensiun mungkin tidak cocok untuk perampingan	Koordinasi yang lebih baik bagi reformasi pensiun, penggajian dan rancangan perampingan
Larangan pengangkatan jabatan menyamping membatasi akses ke pegawai berkemampuan tinggi dari kalangan di luar pegawai negeri	RUU harus mengatasi pembatasan pengangkatan menyamping; mempertimbangkan pasar tenaga kerja internal berbasis web lintas kepegawaian negeri untuk meningkatkan kecocokan pekerjaan

Sumber: Reformasi Penggajian Pegawai Negeri Indonesia: Masalah dan Pilihan Utama bagi Reformasi (Hasnain, dkk., 2013)

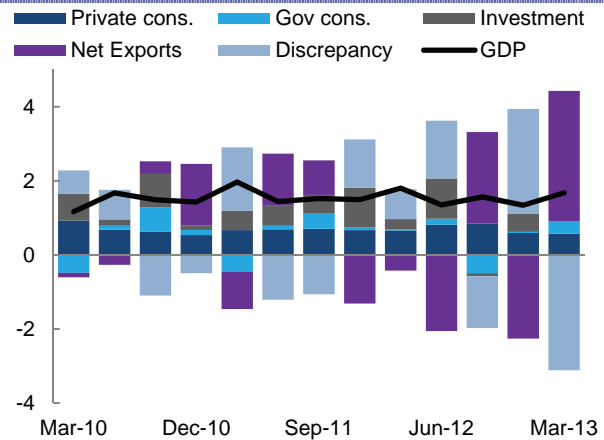
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan
(pertumbuhan PDB riil, persen)



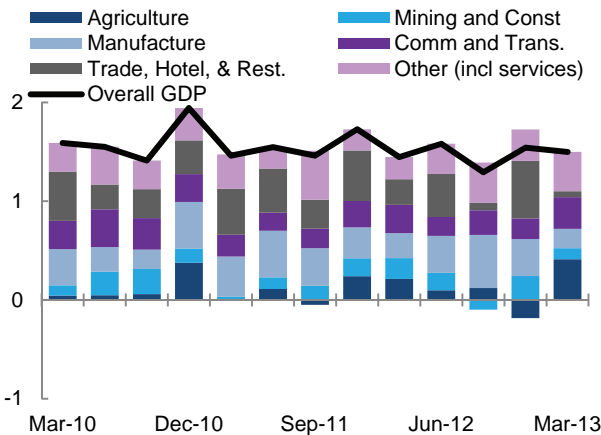
Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw pada Q1 2003 – Q1 2013
Sumber: BPS; World Bank seasonal adjustment

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(kontribusi pertumbuhan PDB riil triwulan-ke-triwulan, dengan penyesuaian musiman, persen)



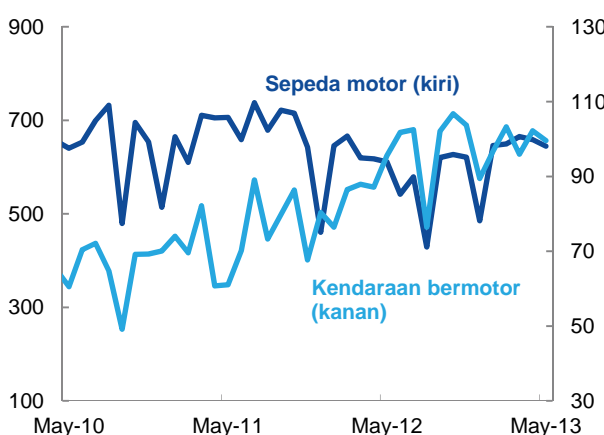
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(kontribusi pertumbuhan PDB riil triwulan-ke-triwulan, dengan penyesuaian musiman, persen)



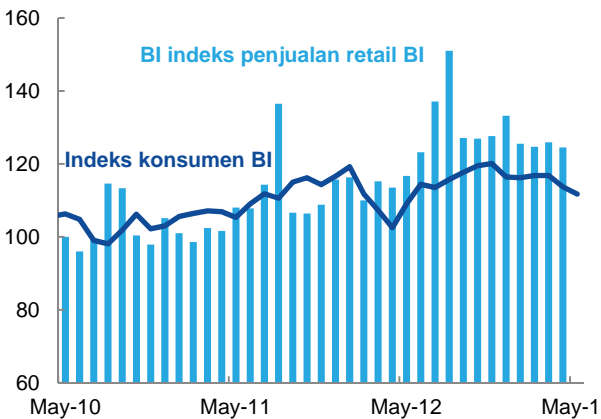
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil
(bulanan, 000 unit)



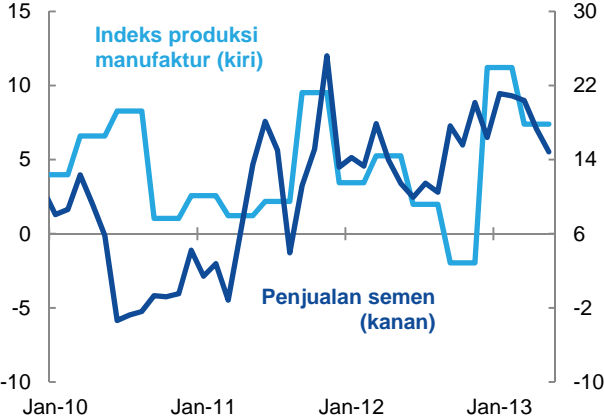
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(indeks)



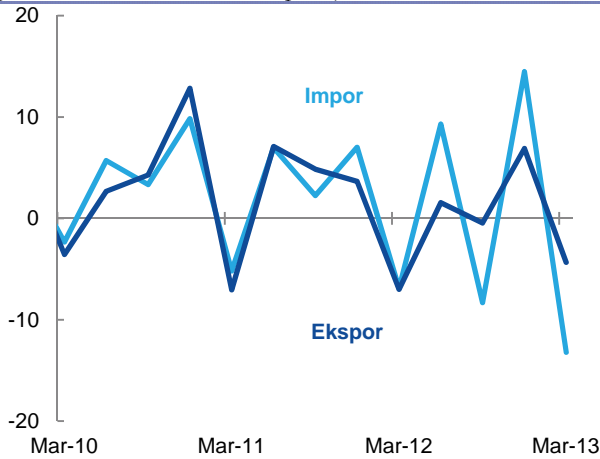
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator kegiatan industri
(rata-rata 3 bulan, pertumbuhan tabun-ke-tabun, persen)



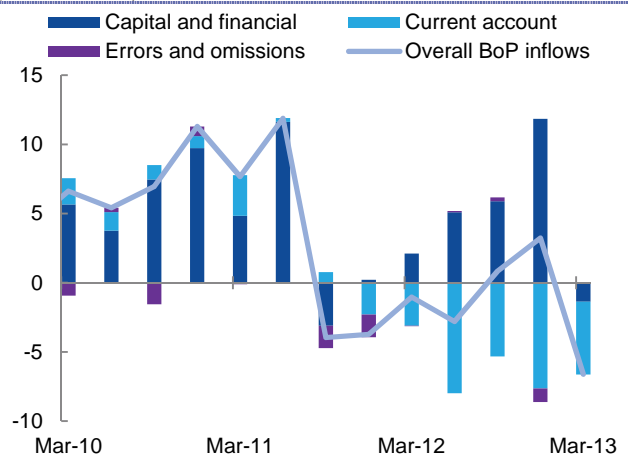
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 7: Aliran perdagangan riil
(pertumbuhan triwulan-ke-triwulan, persen)



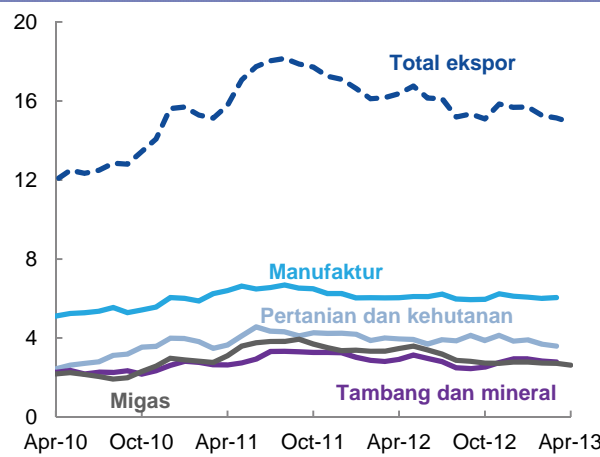
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran
(miliar dolar AS)



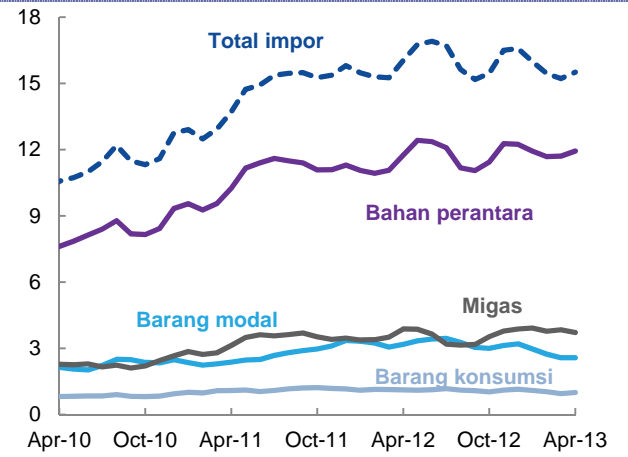
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(miliar dolar AS)



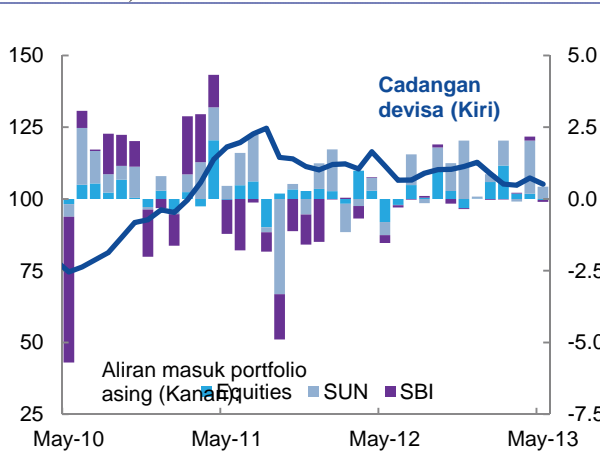
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(miliar dolar AS)



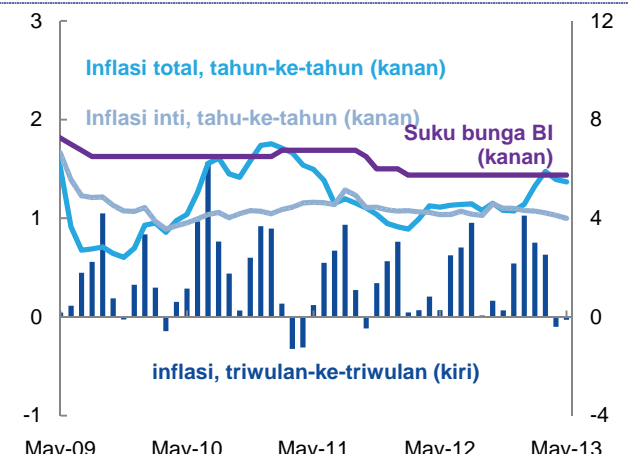
Sumber: BI; CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan aliran masuk portfolio modal asing
(miliar dolar AS)



Sumber: BI; CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

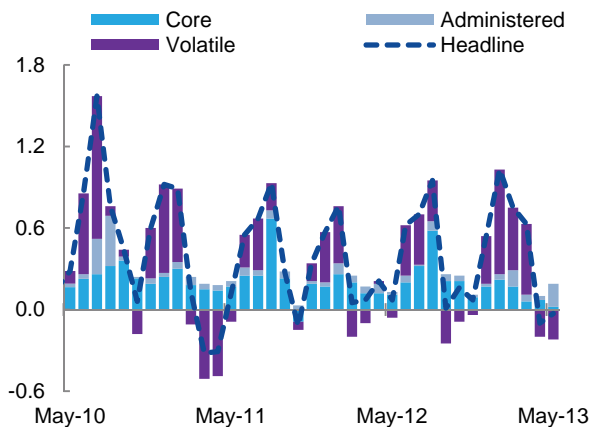
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan tingkat harga konsumen

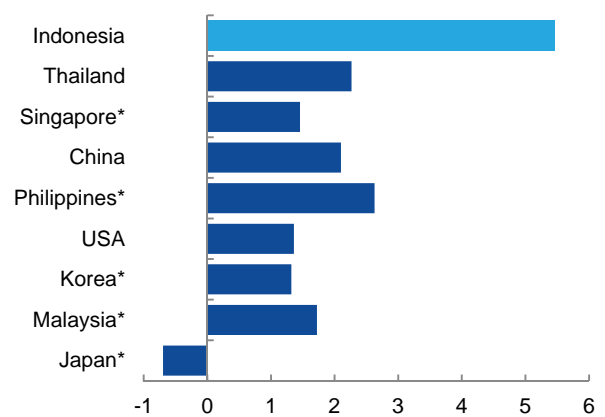
(persentase dari kontribusi terhadap pertumbuhan inflasi bulanan)



Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: perbandingan tingkat inflasi antar negara tetangga

(pertumbuhan tahun-ke-tahun, Mei 2013)

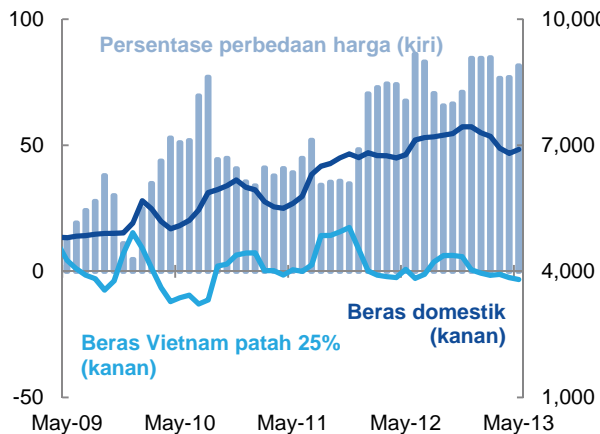


*April merupakan data terkini

Sumber: BPS; CEIC

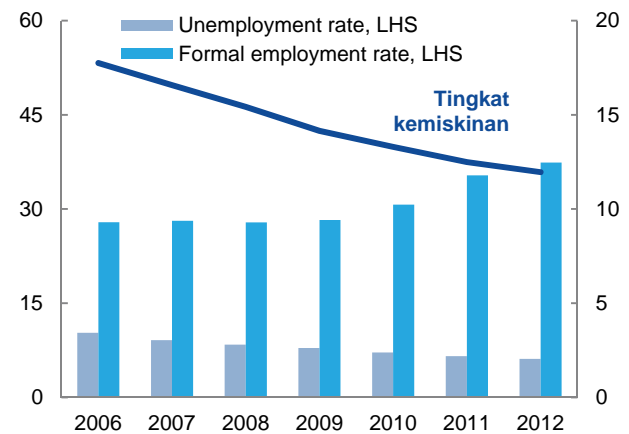
Lampiran Gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional

(persen sebelah kiri, harga grosir, dalam IDR per kg sebelah kanan)



Sumber: PIBIC; FAO; Bank Dunia

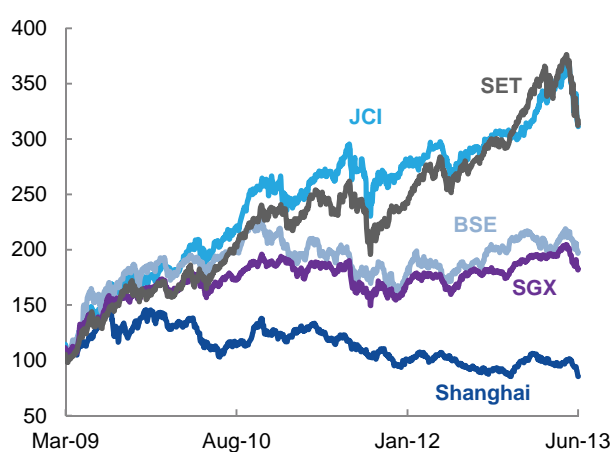
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (persen)



Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional

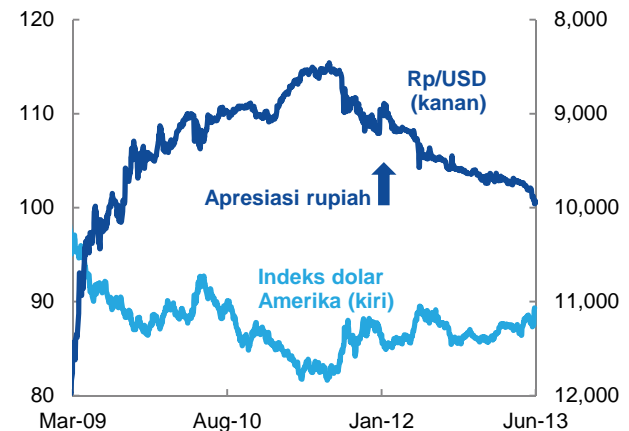
(indeks harian Januari 2009=100)



Sumber: CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

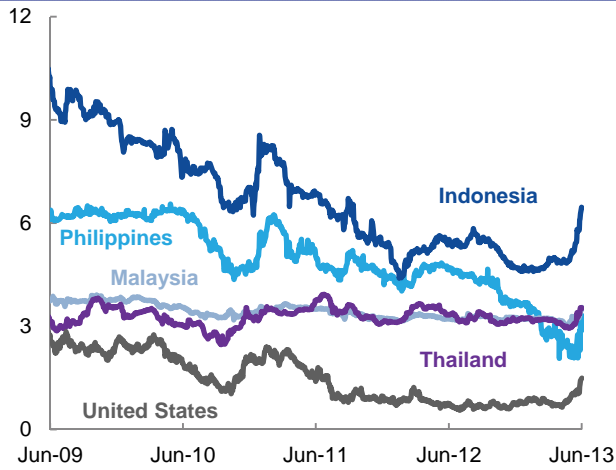
Lampiran Gambar 18: Indeks spot dolar AS dan rupiah

(indeks harga harian, kiri & tingkat harga harian IDR/USD, kanan)



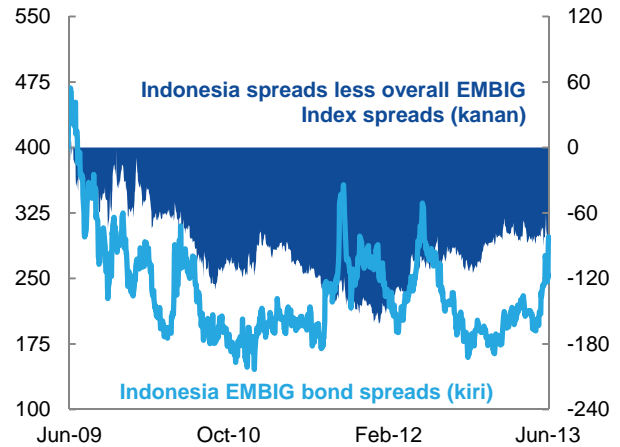
Sumber: CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal
(barisan, persen)



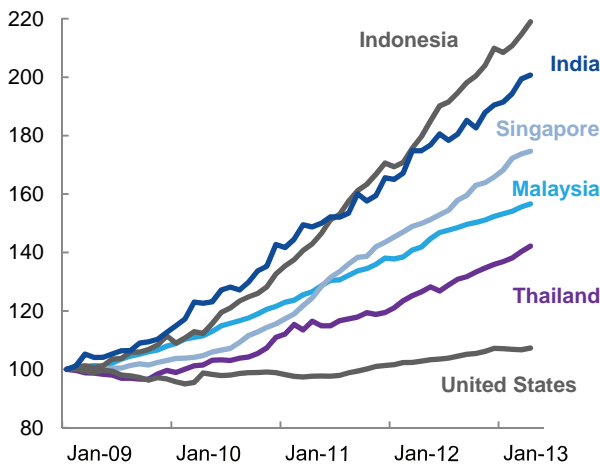
Sumber: CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 20: spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dolar AS
(barisan, basis poin)



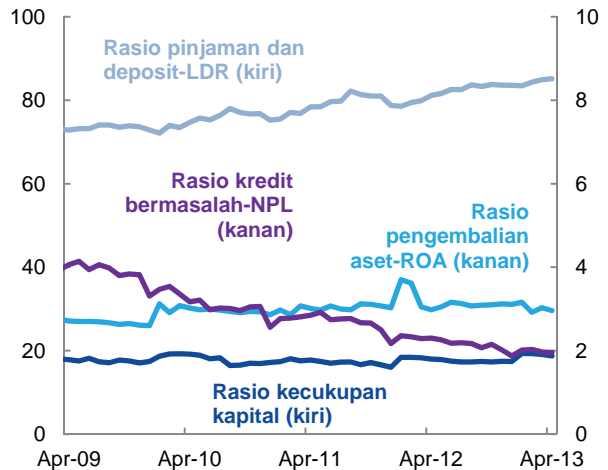
Sumber: JP Morgan; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Tingkat kredit bank umum
(bulanan, indeks Januari 2009=100)



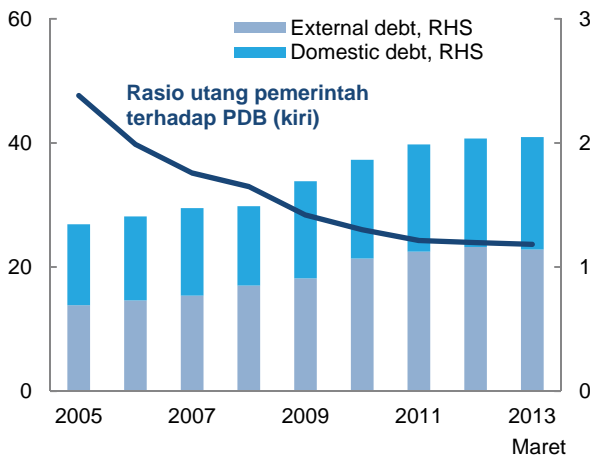
Sumber: CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan
(bulanan, persen)



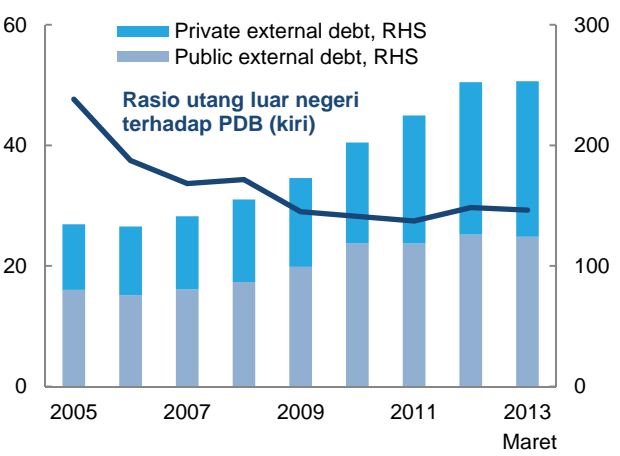
Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah
(persentase dari PDB; miliar dolar AS)



Sumber: Kementerian Keuangan; BI; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri
(persentase dari PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah
(triliun Rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013	2013
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi (tidak diaudit)	APBN	APBN-P
A. Penerimaan negara & hibah	849	995	1,211	1,336	1,530	1,502
1. Penerimaan pajak	620	723	874	980	1,193	1,148
2. Penerimaan non-pajak	227	269	331	352	332	349
B. Belanja	937	1,042	1,295	1,482	1,683	1,726
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1,001	1,154	1,197
2. Transfer ke daerah	309	345	411	480	529	529
C. Keseimbangan primer	5	42	9	-46	-40	-112
D. SURPLUS / DEFISIT	-89	-47	-84	-146	-153	-224
(persen dari PDB)	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-1.7	-2.4

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran
(miliar dolar AS)

	2010	2011	2012	2011		2012				2013
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Neraca pembayaran	30.3	11.9	0.2	-4.0	-3.7	-1.0	-2.8	0.8	3.2	-6.6
<i>Persen dari PDB</i>	4.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
Neraca berjalan	5.1	1.7	-24.1	0.8	-2.3	-3.1	-8.0	-5.3	-7.6	-5.3
<i>Persen dari PDB</i>	0.7	0.2	-2.8	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Neraca perdagangan	21.3	24.2	-2.2	7.1	3.5	1.7	-2.1	0.7	-2.5	-0.7
Pendapatan bersih dan transfer berjalan	-16.2	-22.5	-21.9	-6.4	-5.8	-4.8	-5.9	-6.0	-5.1	-4.6
Neraca modal & keuangan	26.6	13.6	24.9	-3.1	0.2	2.1	5.1	5.9	11.9	-1.4
<i>Persen dari PDB</i>	3.8	1.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
Investasi langsung	11.1	11.5	14.3	2.1	3.1	1.6	3.8	4.5	4.5	3.4
Investasi Portfolio	13.2	3.8	9.2	-4.6	0.2	2.6	3.9	2.5	0.2	2.9
Investasi lain	2.3	-1.8	1.4	-0.7	-3.2	-2.1	-2.5	-1.2	7.2	-7.7
Kesalahan & Omisi	-1.5	-3.4	-0.7	-1.6	-1.6	0.0	0.1	0.3	-1.0	0.0
Cadangan devisa*	96.2	110.1	112.8	114.5	110.1	110.5	106.5	110.2	112.8	104.8

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
<u>Neraca Nasional (% perubahan)¹</u>							
PDB riil	9.0	8.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.2
Investasi riil	25.3	22.6	11.4	10.9	8.5	8.8	9.8
Konsumsi riil	23.2	21.7	4.6	4.3	4.1	4.5	4.8
Swasta	23.9	22.7	3.7	0.9	4.7	4.7	5.3
Pemerintah	18.8	14.7	14.2	6.6	0.3	3.2	1.2
Ekspor riil, barang dan jasa	22.5	18.0	30.6	16.6	15.3	13.6	2.0
Impor riil, barang dan jasa	30.2	29.6	26.6	17.8	17.3	13.3	6.6
Investasi (% PDB)	28	28	20	24	32	32	33
Nominal PDB (milyar dolar AS)	114	202	165	286	709	846	875
PDB per capita (dolar AS)	636	1035	804	1,300	2,984	3,498	3,563
<u>Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)²</u>							
Penerimaan dan hibah	18.8	15.2	20.8	17.8	15.5	16.3	16.2
Penerimaan bukan pajak	1.0	4.8	9.0	5.3	4.2	4.5	4.3
Penerimaan pajak	17.8	10.3	11.7	12.5	11.3	11.8	11.9
Pengeluaran	11.8	13.9	22.4	18.4	16.2	17.4	18.0
Konsumsi	..	3.9	4.0	3.0	3.8	4.0	4.1
Modal	..	4.6	2.6	1.2	1.3	1.6	1.7
Bunga pinjaman	..	1.4	5.1	2.3	1.4	1.3	1.2
Subsidi	6.3	4.3	3.0	4.0	4.2
Surplus/defisit	0.4	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.8
Utang Pemerintah	41.9	32.3	97.9	47.6	26.0	24.3	24.0
Utang luar negeri pemerintah	41.9	32.3	51.4	22.3	9.5	8.3	7.5
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61.0	61.5	87.1	47.7	28.2	27.5	29.7
<u>Neraca Pembayaran (% PDB)³</u>							
Neraca pembayaran keseluruhan	0.2	4.3	1.4	0.0
Neraca transaksi berjalan	-2.6	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.8
Ekspor, barang dan jasa	25.6	26.2	42.8	35.2	24.6	26.2	24.2
Impor, barang dan jasa	24.0	26.9	33.9	32.2	21.6	23.3	24.4
Transaksi berjalan	1.6	-0.8	8.9	3.0	3.0	2.9	-0.2
Neraca transaksi keuangan	0.0	3.7	1.6	2.8
Penanaman modal langsung, neto	1.0	2.2	-2.8	1.9	1.6	1.4	1.6
Cadangan devisa bruto (USD billion)	8.7	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8
<u>Moneter (% change)³</u>							
Deflator PDB ¹	7.7	9.9	20.4	14.3	8.3	8.1	4.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	9.1	6.5	6.6	5.8
Kredit domestik	28.7	17.5	24.4	24.2
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) ⁴	1,843	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,415
<u>Harga-harga (% perubahan)¹</u>							
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.9	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	4.3
Indeks harga konsumen (rata-rata)	7.7	9.4	3.7	10.5	5.1	5.4	4.3
Keranjang harga kemiskinan	10.8	8.7	8.2	6.5
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) ⁵	..	17	28	53	79	112	113

Sumber: ¹ BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia; ² Kementerian Keuangan dan kalkulasi staf Bank Dunia (tahun 1995 adalah FY 1995/1996, dan 2000 mencakup 9 bulan); ³ Bank Indonesia; ⁴ IMF; ⁵ CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas tentang perkembangan indikator sosial Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Kependudukan¹							
Penduduk (juta)	184	199	213	227	240	242	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.7	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	31	36	42	46	50	51	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67	61	55	51	48	48	..
Angkatan Kerja²							
Angkatan kerja, total (juta)	75	84	98	106	117	117	118
Laki-laki	46	54	60	68	72	72	73
Perempuan	29	31	38	38	45	45	45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	55	43	45	44	38	36	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	14	19	17	19	19	21	22
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	44	43
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2.5	7.0	8.1	11.2	7.1	6.6	6.1
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³							
Konsumsi rumah tangga, median (Rp.000)	104	211	374	421	446
Garis kemiskinan nasional (Rp.000)	73	129	212	234	249
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	35	31	30	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19	16	13	12	12
Di perkotaan	15	12	10	9	9
Di perdesaan	22	20	17	16	15
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	16	13	11	10	9
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	13	13	9	10	9
GINI indeks	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	10	9	8	7	7
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	39	41	44	47	47
Pengeluar publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	4.4	3.9	3.9	4.2
Kesehatan dan Gizi¹							
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5)	..	27	25	24	18
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) ⁵	98	..	46	..	44
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	27	19
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	67	..	35	..	34
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	600	420	340	270	220
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran)	36	..	66	..	82
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 1 tahun)	0	..	72	..	76
Pengeluaran untuk kesehatan (% of GDP)	..	1.8	2.0	2.1	2.6
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% of GDP)	..	0.6	0.7	1.0	1.3
Pendidikan³							
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	92	92	92	93
APM perempuan (% dari total partisipasi)	48	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	52	61	60	60
APM perempuan (% dari total partisipasi)	50	50	50	49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	9	16	14	15
APM perempuan (% dari total partisipasi)	55	53	50	54
Angka melek huruf Dewasa (%)	91	91	91	92
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)	2.7	3.4	3.5	3.5
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)	14.5	19.7	19.8	18.9
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹							
Penduduk dengan akses air bersih (% tot penduduk)	70	74	78	80	82
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	91	92
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	74
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	32	38	44	50	54
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	69	73
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	35	39
Lainnya¹							
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	3.3	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8.0	11.3	18.0	18.2	18.6

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS dan Bank Dunia; ⁴ Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, PKH; ⁶ Inter-Parliamentary Union

